

A young man with short dark hair, wearing a blue and red uniform, is crouching in a workshop. He is focused on working on a large black tire that is part of a vehicle on a lift. The background shows a typical industrial or workshop environment with concrete floors and some equipment.

INDONESIA
ECONOMIC
QUARTERLY

Desember 2013

Pertumbuhan melambat; risiko tinggi



THE WORLD BANK | BANK DUNIA

Sharing Development Solutions
for an Emerging Indonesia

**PERKEMBANGAN TRIWULANAN
PEREKONOMIAN INDONESIA**
Pertumbuhan melambat; risiko tinggi

Desember 2013



THE WORLD BANK | BANK DUNIA

Sharing Development Solutions
for an Emerging Indonesia

Kata pengantar

Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia (*Indonesia Economic Quarterly/IEQ*) mempunyai dua tujuan. Pertama, untuk menyajikan perkembangan utama perekonomian Indonesia dalam tiga bulan terakhir, dan menempatkan dalam konteks jangka panjang dan global. Berdasarkan perkembangan ini, serta perubahan kebijakan dalam periode tersebut, laporan ini menyediakan perkembangan terkini secara rutin tentang prospek perekonomian dan kesejahteraan sosial Indonesia. Kedua, laporan *IEQ* ini memberikan penilaian mendalam terhadap isu-isu ekonomi dan kebijakan tertentu, dan analisis terhadap tantangan pembangunan jangka menengah Indonesia. Laporan ini ditujukan untuk khalayak luas termasuk pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, pelaku pasar keuangan, serta komunitas analis dan profesional yang terlibat dan mengikuti perkembangan ekonomi Indonesia.

IEQ merupakan laporan Bank Dunia di Jakarta dan disusun oleh tim kebijakan makro dan fiskal, unit Pengentasan Kemiskinan dan Manajemen Ekonomi (*Poverty Reduction and Economic Management/PREM*), Bank Dunia Jakarta di bawah bimbingan Jim Brumby sebagai *Sector Manager* dan *Lead Economist*, Ndiame Diop sebagai *Economic Adviser* dan *Lead Economist* dan Ashley Taylor sebagai *Senior Economist*. Tim utama penyusun laporan ini dipimpin oleh Alex Sienaert dan bertanggung jawab di bagian A (perkembangan ekonomi dan fiskal terkini), pengeditan dan produksi adalah Arsianti, Magda Adriani, Brendan Coates, Fitria Fitriani, Ahya Ihsan, Eltza Mileva, Violeta Vulovic and Michele Savini Zangrandi. Dukungan administrasi diberikan oleh Titi Ananto dan Sylvia Njotomihardjo. Diseminasi dilakukan oleh Dini Sari Djalal, Farhana Asnap, Indra Irnawan, Jerry Kurniawan, Nugroho Sunjoyo, Marcellinus Winata dan Randy Salim.

Edisi ini juga mencakup kontribusi dari Leni Dharmawan, Lily Hoo, Mattia Makovec, Arvind Nair, Cindy Paladines, Della Temenggung, Violeta Vulovic dan Matthew Wai-Poi. Masukkan utama juga diterima dari The Fei Ming, Neni Lestari, Djauhari Sitorus, Connor Spreng, Ekaterine Vashakmadze dan Anna Wetterberg. Mark Ahern, Jamie Carter, Sjamsu Rahardja, David Nellor dan Bill Wallace (AIPEG), dan Roland Rajah (*Australian Government, DFAT*) juga memberikan tambahan masukan yang penting.

Dokumen ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Nicolas Noviyanto dan diedit oleh Eva Muhctar, Arsianti, Ahya Ihsan dan Soekarno Wirokartono.

Laporan ini disusun oleh para staf *International Bank for Reconstruction and Development* Bank Dunia, dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Australia (Departemen Luar Negeri dan Perdagangan atau *Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT*) melalui program *Support for Enhanced Macroeconomic and Fiscal Policy Analysis* (SEMEFPA).

Temuan-temuan, interpretasi dan kesimpulan-kesimpulan yang dinyatakan di dalam laporan ini tidak mencerminkan pandangan AusAID dan Pemerintah Australia, para Direktur Pelaksana Bank Dunia atau pemerintah yang diwakilinya. Bank Dunia tidak menjamin ketepatan data-data yang termuat dalam laporan ini. Batas-batas, warna, denominasi dan informasi-informasi lain yang digambarkan pada setiap peta di dalam laporan ini tidak mencerminkan pendapat Bank Dunia mengenai status hukum dari wilayah atau dukungan atau penerimaan dari batas-batas tersebut.

Foto sampul depan dan bagian dalam diambil oleh Josh Estey dan Ed Wrey, dan merupakan Hak Cipta Bank Dunia. Semua Hak Cipta dilindungi.

Untuk mendapatkan lebih banyak analisa Bank Dunia terhadap ekonomi Indonesia:

Untuk informasi mengenai Bank Dunia serta kegiatannya di Indonesia, silakan berkunjung ke website ini www.worldbank.org/id

Untuk mendapatkan publikasi ini melalui e-mail, silakan menghubungi madriani@worldbank.org. Untuk pertanyaan dan saran berkaitan dengan publikasi ini, silakan menghubungi asienaert@worldbank.org.

RINGKASAN EKSEKUTIF: PERTUMBUHAN MELAMBAT; RISIKO TINGGI..... I

A. PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL TERKINI..... 1

1. Permintaan global perlahan membaik, namun risiko pembiayaan eksternal tetap ada..... 1
2. Walau konsumsi kuat, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat 3
3. Inflasi IHK telah normal namun inflasi inti meningkat 7
4. Defisit neraca transaksi berjalan Indonesia masih menjadi fokus, walau impor melemah 9
5. Kondisi kredit diperkirakan akan semakin ketat memasuki 2014 15
6. Pertumbuhan pengeluaran publik dan penerimaan pajak telah melemah selama tahun 2013 18
7. Melihat risiko yang ada, dibutuhkan kemajuan lebih lanjut dalam reformasi yang mendukung pertumbuhan..... 21

B. BEBERAPA PERKEMBANGAN TERKINI PEREKONOMIAN INDONESIA..... 24

1. Tinjauan lebih dekat terhadap APBN 2014..... 24
2. *Update* tentang kemiskinan di Indonesia 30

C. INDONESIA TAHUN 2015 DAN SELANJUTNYA: TINJAUAN PILIHAN..... 34

1. Pasar tenaga kerja di Indonesia: pencapaian dan tantangan terkini 34
 - a. Tantangan transformasi struktural yang sedang dilakukan tetapi belum lengkap 37
 - b. “Pekerjaan baik” meningkat, namun banyak pekerja yang tetap informal dan rentan..... 38
 - c. Menangani angkatan kerja yang sebagian besar berketerampilan rendah 39
2. Kapasitas desa dan pembangunan di Indonesia..... 41
 - a. Sejarah singkat pembangunan berbasis masyarakat di Indonesia..... 41
 - b. Memahami perubahan kapasitas desa sejak tahun 2001 42
 - c. Demokratisasi, desentralisasi, CDD, dan kapasitas desa..... 45
 - d. ...dan pentingnya peningkatan pemeriksaan dan penyeimbangan pada tingkat perdesaan..... 47

LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBARAN EKONOMI INDONESIA..... 48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Harga komoditas ekspor utama menunjukkan tanda-tanda stabilisasi, umumnya datar dibanding setahun yang lalu	2
Gambar 2: Biaya pinjaman di pasar global dan berkembang tetap menunjukkan kecenderungan naik.....	2
Gambar 3: Pertumbuhan PDB riil mengalami perlambatan, turun ke 5,6 persen <i>yoy</i> dan 5,0 <i>qoq saar</i> pada triwulan 3... ..	4
Gambar 4: ...walau pertumbuhan PDB nominal naik tajam pada triwulan 3 berkat peningkatan harga secara luas	4
Gambar 5: Pertumbuhan investasi telah melambat secara signifikan sementara pertumbuhan konsumsi tetap kuat.....	4
Gambar 6: ...dengan hanya investasi pergedungan mendorong positifnya keseluruhan pertumbuhan investasi	4
Gambar 7: Tren indikator frekuensi tinggi bercampur namun di bawah nilai tingginya yang pernah tercatat	5
Gambar 8: Harga sejumlah bahan pangan utama mulai stabil setelah tahun yang bergejolak	7
Gambar 9: Deflasi bahan pangan musiman dan pudarnya kenaikan harga transportasi telah menekan inflasi IHK turun.....	8
Gambar 10: ...namun tren inflasi inti telah meningkat secara signifikan	8
Gambar 11: Defisit neraca transaksi berjalan mencapai kestabilan pada 8,4 miliar dolar AS di triwulan 3.....	10
Gambar 12: ...yang dibantu dengan kembalinya neraca perdagangan non-migas ke surplus sejak bulan Agustus	10
Gambar 13: Perlemahan impor didorong oleh kontraksi barang-barang modal.....	11
Gambar 14: Manufaktur dan konstruksi menyerap hampir 70 persen dari impor Indonesia.....	11
Gambar 15: Investasi portofolio yang lebih melemah memperkecil surplus neraca modal dan finansial pada triwulan 3 dibanding triwulan 2.....	12
Gambar 16: ...namun kondisi likuiditas pasar spotvaluta asing dalam negeri telah membaik sejak pertengahan tahun.....	15
Gambar 17: Pertumbuhan kredit bank telah terinflasi oleh pengaruh kurs tukar.....	16
Gambar 18: ...namun telah melambat, terutama secara riil	16
Gambar 19: Likuiditas Rupiah telah mengetat dan biaya pinjaman antar-bank telah meningkat	17
Gambar 20: APBN 2014 menargetkan defisit yang lebih kecil dari tahun 2013 dan penurunan lebih lanjut rasio hutang-PDB	25
Gambar 21: ...namun kebutuhan pembiayaan hutang bruto akan sama dengan tingkatan 2013 yang tinggi	25
Gambar 22: Subsidi energi tetap menghabiskan bagian yang signifikan dari APBN	26
Gambar 23: Laju pengentasan kemiskinan beberapa tahun terakhir merupakan yang paling lambat selama satu dekade.....	30
Gambar 24: Rumah tangga miskin yang masih tersisa di Indonesia berada lebih jauh di bawah garis kemiskinan dibanding sebelumnya pada periode tahun 2000-an... ..	30
Gambar 25: ...sementara peran kaum miskin dan rentan semakin berkurang dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia belakangan ini.....	30
Gambar 26: Dari 121 juta angkatan kerja Indonesia, 114 juta memiliki pekerjaan (kurang dari setengahnya ada di sektor formal)	35
Gambar 27: Peningkatan lapangan kerja di Indonesia sejak 2005 termasuk yang terkuat di kawasan	35
Gambar 28: Pertumbuhan pekerjaan tahun-ke-tahun telah bertahan sejak 2005, walau melambat setelah 2011.....	36
Gambar 29: Pekerjaan formal berkontribusi empat per lima dari jumlah pekerjaan yang tercipta antara 2001 dan 2012.....	36

Gambar 30: Sektor-sektor bernilai tambah rendah dalam jasa mencatat kontribusi terbesar terhadap penciptaan pekerjaan antara tahun 2001 dan 2012.....	37
Gambar 31: Pertumbuhan pekerjaan dan produktivitas pekerja memiliki korelasi yang negatif..	37
Gambar 32: Terdapat perbedaan upah yang penting antar sektor, di dalam sektor dan antar jenis pekerjaan.....	38
Gambar 33: Pekerjaan di sektor formal meningkat, namun kebanyakan pekerja masih bekerja dalam pekerjaan yang rentan	38
Gambar 34: Walau keterampilan angkatan kerja telah meningkat, kurang dari 8 persen memiliki gelar universitas	40
Gambar 35: Lebih dari 40 persen dari tenaga muda Indonesia berusia 15-24 tahun tidak memiliki pekerjaan, pendidikan, atau pelatihan	40

DAFTAR LAMPIRAN GAMBAR

Lampiran Gambar 1: Pertumbuhan PDB.....	48
Lampiran Gambar 2: Kontribusi terhadap PDB pengeluaran.....	48
Lampiran Gambar 3: Kontribusi terhadap PDB produksi.....	48
Lampiran Gambar 4: Penjualan sepeda motor dan mobil.....	48
Lampiran Gambar 5: Indikator konsumen.....	48
Lampiran Gambar 6: Indikator industri penjualan.....	48
Lampiran Gambar 7: Arus perdagangan riil.....	49
Lampiran Gambar 8: Neraca pembayaran.....	49
Lampiran Gambar 9: Ekspor barang.....	49
Lampiran Gambar 10: Impor barang.....	49
Lampiran Gambar 11: Cadangan devisa dan arus masuk modal.....	49
Lampiran Gambar 12: Inflasi dan kebijakan moneter	49
Lampiran Gambar 13: Rincian bulanan IHK.....	50
Lampiran Gambar 14: Perbandingan inflasi beberapa negara	50
Lampiran Gambar 15: Harga beras domestik dan internasional.....	50
Lampiran Gambar 16: Tingkat kemiskinan dan pengangguran	50
Lampiran Gambar 17: Indeks saham regional	50
Lampiran Gambar 18: Indeks dolar AS dan Nilai tukar rupiah.....	50
Lampiran Gambar 19: Imbal hasil obligasi pemerintah 5-tahunan dalam mata uang lokal	51
Lampiran Gambar 20: Spread obligasi dolar AS pemerintah EMBI	51
Lampiran Gambar 21: Pinjaman internasional perbankan komersial	51
Lampiran Gambar 22: Indikator sektor perbankan	51
Lampiran Gambar 23: Hutang pemerintah.....	51
Lampiran Gambar 24: Hutang luar negeri.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan melemah menjadi 5,3 persen pada tahun 2014.....	III
Tabel 2: Menurut skenario dasar (<i>baseline</i>) PDB diproyeksikan tumbuh 5,6 persen untuk 2013 dan 5,3 persen untuk 2014.....	6
Tabel 3: Berlanjutnya defisit neraca transaksi berjalan menjadikan sorotan terhadap kebutuhan untuk mendukung FDI	12
Tabel 4: Tingginya pembayaran hutang eksternal pada triwulan 4, 2013 akan menambah tekanan pada Rupiah... ..	13
Tabel 5: Pencairan APBN yang lebih tinggi menjadi karakteristik periode Jan-Nov 2013, dibanding tahun-tahun yang lalu	19

Tabel 6: Bank Dunia memproyeksikan defisit fiskal 2,1 persen dari PDB untuk 2014, turun dari 2,5 persen untuk 2013	20
Tabel 7: Pertumbuhan konsumsi dan investasi yang sedikit lebih lemah dari perkiraan dapat menyebabkan pertumbuhan PDB tahun 2014 menjadi di bawah 5 persen	21
Tabel 8: Defisit fiskal yang disetujui pada tahun 2014 adalah 1,7 persen dari PDB, sedikit di atas usulan sebelumnya	27
Tabel 9: Asumsi ekonomi makro dan harga telah direvisi ke arah yang konservatif dibanding RAPBN bulan Agustus	28
Tabel 10: Kerangka Anggaran Jangka Menengah memproyeksikan surplus secara keseluruhan pada tahun 2016.....	29
Tabel 11: Perbandingan Aspek Penelitian Utama pada LLI1, LLI2 dan LLI3	44

DAFTAR LAMPIRAN TABEL

Lampiran Tabel 1: Realisasi dan anggaran belanja Pemerintah	52
Lampiran Tabel 2: Neraca Pembayaran.....	52
Lampiran Tabel 3: Perkembangan indikator ekonomi makro Indonesia	53
Lampiran Tabel 4: Sekilas indikator pembangunan Indonesia.....	54

DAFTAR KOTAK

Kotak 1: Potensi dampak jangka pendek dari usulan larangan ekspor bahan mineral mentah terhadap neraca perdagangan Indonesia	14
Kotak 2: Perkembangan terbaru tentang kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia	23
Kotak 3: BLSM, Susenas, dan pengukuran kemiskinan.....	31
Kotak 4: Metodologi Penelitian Kelembagaan Desa	44

Ringkasan eksekutif: pertumbuhan melambat; risiko tinggi



Melihat ke tahun 2014, Indonesia menghadapi perlambatan pertumbuhan dan risiko-risiko ekonomi yang signifikan...

Kuartal akhir tahun 2013 telah mencatat penyesuaian ekonomi Indonesia yang masih berlangsung terhadap terus melemahnya harga-harga komoditas dan kondisi pembiayaan eksternal yang lebih ketat, dan tekanan neraca pembayaran. Sejumlah kebijakan telah menanggapinya, terutama melalui kebijakan moneter yang lebih ketat, depresiasi riil Rupiah yang cukup besar dan belanja investasi dan pertumbuhan produksi (*output*) telah melemah. Perkembangan-perkembangan ini umumnya mendukung keberlangsungan stabilitas ekonomi makro, termasuk membantu menurunkan defisit neraca transaksi berjalan, walaupun dampaknya terus berlangsung, menambah ketidakpastian terhadap perekonomian domestik. Pada saat bersamaan, lingkungan internasional juga bergeser, dengan pertumbuhan global diperkirakan meningkat, membawa potensi perubahan kebijakan, terutama kebijakan moneter Amerika Serikat, yang dapat meningkatkan tekanan pada posisi pembiayaan eksternal Indonesia.

...yang membutuhkan fokus kebijakan tidak hanya pada penyesuaian makro tetapi juga pada implementasi yang kredibel dari reformasi-reformasi investasi jangka panjang dan peningkatan ekspor

Sejalan dengan melambatnya laju pertumbuhan, dan risiko-risiko yang dihadapi oleh ekonomi, ada kebutuhan yang kuat bagi Indonesia untuk semakin meningkatkan kemajuan dari kebijakan yang berfokus pada makro seperti kebijakan moneter yang lebih ketat, penyesuaian kurs tukar dan tekanan impor, dengan reformasi yang lebih dalam untuk mendorong kinerja ekspor dan mendukung aliran masuk modal investasi, terutama penanaman modal langsung/FDI. Kemajuan dalam implementasi yang kredibel dari upaya-upaya tersebut dapat membantu membatasi kerentanan neraca pembayaran Indonesia terhadap kondisi pembiayaan global yang lebih ketat, atau lebih bergejolak, dan dapat membantu mendukung siklus investasi yang kuat, termasuk investasi luar negeri, dan pertumbuhan produksi dalam jangka menengah. Dinamika politik tahun pemilu dapat memainkan peran penting dalam pemilihan kebijakan tahun 2014 namun hal ini juga menambah pentingnya komunikasi dan koordinasi yang jelas terhadap reformasi yang dalam, baik dalam tahap perumusan dan pelaksanaan, dan pencegahan kesalahan pengambilan kebijakan. Hal ini akan mendukung kepercayaan investor dalam dan luar negeri terhadap prospek pertumbuhan Indonesia, dan aliran masuk pembiayaan luar negeri.

Kinerja ekonomi dunia diperkirakan akan semakin membaik pada tahun 2014...

Kondisi ekonomi negara-negara ekonomi terbesar di dunia, dan mitra-mitra perdagangan utama Indonesia, masih tetap tidak merata. Pertumbuhan di AS telah mulai meningkat selama tahun 2013, sementara zona Eropa pada akhirnya berhasil keluar dari resesi yang panjang walau dengan pemulihan yang lambat, sementara pertumbuhan di Jepang telah melemah, namun masih tetap positif. Ekonomi Cina mencatat percepatan pada paruh kedua tahun 2013, dan diikuti oleh India pada beberapa bulan terakhir, namun kegiatan pada perekonomian negara berkembang utama lainnya, seperti Brasil, masih tetap lebih lemah. Memasuki tahun 2014, proyeksi dasar (*baseline*) adalah berlanjutnya penguatan kondisi ekonomi global, dengan semakin membaiknya negara-negara berpenghasilan tinggi, yang mendukung pertumbuhan perekonomian negara berkembang, terutama termasuk Cina, dan mendorong berlanjutnya peningkatan permintaan yang moderat untuk ekspor Indonesia.

...dan harga-harga komoditas telah stabil...

Secara umum harga-harga komoditas internasional telah meningkat pada beberapa bulan terakhir yang mengangkat indeks harga sepuluh komoditas ekspor utama Indonesia sebesar 3,8 persen sejak bulan Agustus (walau masih 2 persen lebih rendah pada tahun 2013 dan 22 persen di bawah nilai puncak terakhirnya pada bulan Februari 2011), yang dibantu oleh peningkatan harga batubara, gas alam dan minyak sawit. Jika terus berlanjut, mulai stabilnya harga-harga komoditas ini akan membantu memperlambat penurunan nilai tukar perdagangan Indonesia yang telah mendorong sebagian besar penurunan dalam neraca pembayaran. Namun, prospek dasar (*baseline*) dengan sedikit membaiknya pertumbuhan dunia, bersamaan dengan kemungkinan pengetatan kondisi likuiditas dunia, dan tekanan turun yang lebih terstruktur terhadap harga dari faktor-faktor sisi penawaran, tidak mencerminkan peningkatan besar dalam harga komoditas untuk tahun 2014.

...namun risiko kebijakan dan kondisi keuangan internasional masih menjadi tantangan bagi Indonesia

Prospek internasional, walau membaik, masih mengandung ketidakpastian dan tantangan kebijakan yang cukup besar. Di Eropa, jalannya pemulihan masih rapuh dan tampaknya tidak akan merata karena tantangan pelaksanaan penurunan hutang dan kebijakan yang cukup besar. Di Asia, kecepatan dan ragam penerapan upaya reformasi struktural yang ambisius di Cina dan Jepang, dan pemilu di India, akan mempengaruhi prospeknya. Di atas semua itu, penetapan waktu dan kecepatan penghapusan bertahap dari program pembelian aset Bank Sentral AS (yang disebut "*tapering*") tidaklah pasti, namun menjaga risiko gejolak pasar dunia dan kondisi pembiayaan eksternal yang lebih sulit tetap menjadi perhatian utama.

Penyesuaian ekonomi dan kebijakan selama tahun 2013 di Indonesia cukup signifikan...

Seperti yang disoroti pada *IEQ* edisi bulan Oktober 2013, perkiraan terjadinya penghapusan bertahap oleh Bank Sentral AS, dan kondisi pengetatan pembiayaan luar negeri yang terkait, mulai bulan Mei, bersama-sama dengan pengaruh semakin rendahnya harga komoditas sejak tahun 2011, telah mendorong sejumlah penyesuaian ekonomi dan kebijakan di Indonesia pada paruh kedua tahun 2013, yang sekarang masih berlangsung. Bank Indonesia (BI) telah meningkatkan suku bunga BI Rate-nya sebesar 175 basis poin sejak bulan Juni, ketika Pemerintah meningkatkan harga BBM bersubsidi sebesar rata-rata 33 persen. Rupiah telah mencatat depresiasi sebesar 24 persen terhadap dolar AS selama tahun berjalan, terutama sejak bulan Agustus, dan secara riil - tertimbang dengan mitra dagang - telah turun sebesar 12,5 persen dari nilai puncak terakhirnya pada bulan Mei hingga Oktober.

...dan pertumbuhan telah melambat, mengurangi permintaan impor, terutama bagi barang-barang modal, dan membantu menstabilkan defisit neraca transaksi berjalan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah melambat secara signifikan, menjadi 5,6 persen tahun-ke-tahun (yoy) pada kuartal ketiga, melanjutkan penurunan pertumbuhan selama lima kuartal berturut-turut sejak pertumbuhan sebesar 6,4 persen yoy pada kuartal kedua tahun 2012. Sebagian besar perlambatan didorong oleh perlemahan investasi, yang sedikit meningkat menjadi 4,5 persen yoy pada kuartal ketiga, yang mencerminkan kontraksi investasi peralatan dan permesinan dibandingkan tahun lalu. Perlemahan investasi mengurangi impor barang modal, nilai impor dolar AS lebih rendah sebesar 16,3 persen yoy dari 3 bulan ke Oktober. Volume impor secara keseluruhan telah melemah dan mencatat kontraksi yang signifikan pada kuartal ketiga. Volume ekspor juga mencatat kontraksi secara berurutan pada kuartal ketiga, namun tidak sebesar kontraksi impor, sehingga selisih ekspor bersih menambah secara signifikan kepada pertumbuhan produksi. Secara keseluruhan, terdapat tanda-tanda bahwa neraca perdagangan Indonesia sedang bergeser menuju stabilisasi dan mulai mempersempit defisit neraca transaksi berjalan secara keseluruhan.

Sejauh ini penyesuaian ekonomi makro membawa dampak umum yang positif bagi stabilitas, namun berbiaya besar...

Secara umum penyesuaian kurs tukar dan kebijakan moneter yang dilaksanakan pada tahun 2013 membawa pengaruh yang positif bagi stabilitas ekonomi makro, dengan depresiasi Rupiah bertindak sebagai “peredam kejutan” bagi perlemahan perdagangan dengan mendorong penerimaan ekspor dan mengurangi permintaan impor. Namun penyesuaian-penyesuaian itu menghabiskan biaya, dan dapat membawa resiko terutama dengan memberi tekanan kepada neraca pemerintah dan swasta melalui peningkatan nilai Rupiah dari hutang luar negeri (terutama jika terdapat selisih penerimaan dan pengeluaran valuta) dan mengikis penerimaan karena lebih tingginya biaya pelunasan hutang dan biaya impor.

...dan sementara APBN 2014 mengambil sikap yang hati-hati, namun tidak mengandung reformasi fiskal besar apapun

Kebijakan penyesuaian moneter dan kurs tukar membawa beban bagi penyesuaian makro jangka pendek. APBN 2014, yang disahkan DPR pada tanggal 25 Oktober, mempertahankan sikap non-ekspansifnya, dengan memproyeksikan penurunan defisit fiskal menjadi sebesar 1,7 persen dari PDB secara keseluruhan. APBN 2014 tidak memiliki rencana reformasi penerimaan atau pengeluaran besar apapun, walau terdapat penurunan alokasi subsidi listrik sebesar 29 persen dibanding tahun 2013, yang mencerminkan rencana untuk melanjutkan penyesuaian naik bagi tarif yang masih berlangsung. Dengan dampak positif kenaikan harga BBM bersubsidi pada Juni 2013 diimbangi oleh perlemahan Rupiah, alokasi untuk subsidi BBM direncanakan tetap signifikan pada 2014 sebesar IDR 211 triliun (atau 2 persen dari PDB), atau naik IDR 11 triliun dibandingkan APBN-P 2013.

Bank Dunia memproyeksikan perlambatan pertumbuhan PDB ke 5,3 persen pada 2014, dan defisit neraca transaksi berjalan mengecil...

Dengan terus berlangsungnya dampak dari lebih rendahnya harga-harga komoditas, lebih ketatnya kondisi pembiayaan eksternal, lebih tingginya suku bunga riil dalam negeri, dan depresiasi Rupiah, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan PDB Indonesia akan melambat menjadi 5,3 persen pada tahun 2014 untuk *base case* (Tabel 1), dari 5,6 persen pada tahun 2013. Dibantu dengan pertumbuhan impor yang relatif lemah dan sedikit peningkatan dalam ekspor, defisit neraca transaksi berjalan akan menyusut, menjadi 23 miliar dolar AS pada tahun 2014 (2,6 persen dari PDB), dari 31 miliar dolar AS (3,5 persen dari PDB) pada tahun 2013.

Tabel 1: Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan melemah menjadi 5,3 persen pada tahun 2014

		2011	2012	2013p	2014p
PDB riil	(Persen perubahan tahunan)	6,5	6,2	5,6	5,3
Harga indeks konsumen	(Persen perubahan tahunan)	5,4	4,3	7,0	6,1
Defisit neraca transaksi berjalan	(Persen dari PDB)	0,2	-2,8	-3,5	-2,6
Defisit APBN	(Persen dari PDB)	-1,1	-1,9	-2,5	-2,1
PDB mitra perdagangan utama	(Persen perubahan tahunan)	3,6	3,4	3,4	3,9

Sumber: BI; BPS; Kementerian Keuangan; proyeksi staf Bank Dunia (2013p dan 2014p)

...namun risiko-risiko di sekitar perkiraan dasar (*baseline*) lebih condong kepada pertumbuhan yang lebih lambat...

Namun proyeksi-proyeksi itu juga mengandung faktor ketidakpastian yang cukup besar, dan risiko-risiko bersifat condong pada pertumbuhan domestik lebih rendah. Secara khusus, proyeksi dasar (*baseline*) bergantung pada kecukupan dukungan kondisi pembiayaan eksternal untuk menghindari penyesuaian neraca eksternal yang lebih tiba-tiba, yang akan menyebabkan gangguan ekonomi dan memperlambat pertumbuhan. Penurunan seperti itu dapat dipicu oleh perkembangan pasar internasional, atau secara lebih khusus lagi karena perkembangan kebijakan dan ekonomi dalam negeri. Selain risiko-risiko yang terkait dengan pertumbuhan, juga terdapat risiko-risiko terhadap prospek fiskal. Sebagai contoh, Bank Dunia memperkirakan bahwa depresiasi Rupiah sebesar 10 persen akan meningkatkan defisit fiskal sebesar 0,3-0,4 poin persentase dari PDB, yang umumnya berasal dari peningkatan biaya subsidi BBM (lihat *IEQ* edisi bulan Oktober 2013).

...dengan perhatian khusus terhadap risiko pertumbuhan investasi, tetapi juga pada daya tahan konsumsi swasta

Proyeksi PDB Indonesia sangat sensitif terutama terhadap prospek investasi yang menghadapi risiko-risiko peningkatan lebih lanjut dari suku bunga riil dan gejolak kurs tukar valuta, dan pengetatan yang lebih besar dari perkiraan kondisi kredit yang berdampak pada pertumbuhan investasi bangunan yang sejauh ini sangat kokoh. Selain itu, terdapat risiko bahwa pertumbuhan konsumsi swasta—walaupun sejauh ini masih kokoh—dapat menerima tekanan yang lebih besar dari peningkatan harga dan suku bunga, penurunan pertumbuhan pendapatan dan pengaruh dari penurunan kekayaan dan kepercayaan. Pertumbuhan

permintaan dalam negeri yang hanya sedikit lebih rendah dari yang diantisipasi (misalnya penurunan konsumsi dan investasi hanya sebesar 0,5 poin persentase) dapat menurunkan tingkat pertumbuhan PDB menjadi di bawah 5 persen. Moderasi permintaan dalam negeri yang lebih kuat, misalnya, karena semakin terbatasnya pembiayaan eksternal atau pengaruh penurunan keyakinan karena kebijakan yang buruk, dapat membawa pertumbuhan tahun 2014 dibawah 4,5 persen.

Terdapat kebutuhan kebijakan untuk mendukung ekspor dan aliran masuk FDI, dan untuk menghindari langkah-langkah yang dapat merusak yang ditujukan pada pembatasan impor

Dengan jumlah barang-barang konsumsi yang berada di bawah 10 persen dari impor Indonesia, penurunan dalam impor, sementara mendukung penurunan defisit neraca transaksi berjalan, juga berarti lebih terbatasnya impor bahan mentah dan bahan setengah jadi yang tersedia bagi produksi barang-barang manufaktur, dan lebih rendahnya impor barang-barang modal. Dengan tidak tersedianya bahan pengganti atau pesaing di dalam negeri, maka hal ini akan secara langsung membebani pertumbuhan produksi saat ini dan masa depan, termasuk bagi ekspor. Sementara penurunan impor karena pengaruh pendapatan dan harga relatif dapat berguna untuk proses penyesuaian jangka pendek, tantangan kebijakan sesungguhnya bagi Indonesia adalah tidak memfokuskan pada tambahan penurunan impor melalui peraturan perundangan, namun dengan meningkatkan ekspor, dan mendapatkan pendanaan yang lebih banyak dan berkualitas lebih tinggi, terutama FDI.

Upaya-upaya untuk memperbaiki lingkungan usaha memiliki peran penting dalam meningkatkan daya tarik Indonesia terhadap aliran masuk FDI...

Sementara aliran FDI ke Indonesia sejauh ini masih tetap kokoh, walau perbandingannya terhadap PDB masih relatif lebih rendah dibanding negara-negara tetangga, didukung oleh tiga faktor yang semuanya terpengaruh oleh taraf yang berbeda-beda di bawah tekanan yang belakangan terjadi: sumber daya alam Indonesia yang besar (tertekan dengan harga komoditas dunia yang relatif lemah), pasar dalam negeri yang besar dan bertumbuh (sedikit tertekan, setidaknya untuk jangka pendek, dengan kendala yang menghadang permintaan dalam negeri) dan potensi Indonesia sebagai pusat produksi wilayah Asia (tertekan oleh ketidakpastian peraturan perundangan dan kesenjangan keterampilan dan infrastruktur). Karenanya, terdapat kebutuhan yang jelas untuk membuat kemajuan lebih lanjut dalam mendukung FDI, dengan mendorong revisi daftar negatif investasi (DNI) yang mendukung investasi, yang menjadi inti dari paket kebijakan Pemerintah pada bulan Agustus yang kini masih menunggu pelaksanaan, dan memperkuat kualitas dari keseluruhan proses penyusunan kebijakan investasi untuk meminimalkan ketidakpastian kebijakan. Pemerintah juga telah meluncurkan paket kebijakan yang cukup berarti untuk meningkatkan kemudahan melakukan usaha, dengan rencana tindakan yang diumumkan pada tanggal 25 Oktober dalam delapan bidang "*Doing Business*". Kini tantangannya adalah melaksanakan paket itu sesuai dengan jadwal waktu yang ambisius pada bulan Februari 2014, untuk memberikan pesan yang positif kepada lingkungan dunia usaha dan komitmen dalam implementasi reformasi.

...dan perbaikan proses dan peraturan perundangan dalam fasilitasi perdagangan dan logistik juga dapat memberikan "hasil cepat" untuk meningkatkan ekspor

Depresiasi riil Rupiah selama 2013, dengan meningkatkan daya saing internasional, membuka kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan kinerja ekspornya. Perlemahan harga-harga komoditas juga dapat menggeser investasi ke sektor-sektor bukan sumber daya alam, termasuk manufaktur dengan orientasi ekspor. Seperti yang disoroti oleh *IEQ* edisi bulan Oktober, tersedia sejumlah "hasil cepat" pada bidang fasilitasi perdagangan dan logistik, dengan fokus pada kinerja perizinan kargo impor pada pelabuhan-pelabuhan seperti Tanjung Priok di Jakarta, yang dengan peningkatan efisiensi dan prediktabilitas dalam logistik perdagangan dapat mendorong ekspor dan memperkuat peran serta Indonesia di dalam jaringan produksi dunia. Dukungan terhadap daya saing ekspor dengan jangka yang lebih panjang juga membutuhkan fokus yang berkelanjutan dalam mengatasi kesenjangan infrastruktur dan keterampilan.

Penekanan yang berkelanjutan pada kualitas belanja, termasuk, melalui reformasi subsidi energi, dapat membantu mencapai sasaran pembangunan jangka panjang...

Seperti yang disoroti pada *IEQ* edisi-edisi yang lalu, subsidi BBM masih menjadi sumber utama risiko fiskal, mengurangi kemampuan kurs tukar valuta yang fleksibel dalam meredam kejutan, dan mengalihkan belanja dari penggunaan yang lebih efisien, termasuk peningkatan investasi publik yang sangat dibutuhkan. Walau peningkatan harga BBM sebarang nampaknya bukan merupakan pilihan yang dapat diterima secara politis menjelang pemilu, keadaan ini menunjukkan betapa pentingnya upaya reformasi lebih lanjut, dan pada saat yang bersamaan memperbaiki jaring pengaman sosial bagi kelompok miskin dan rentan. Reformasi tersebut termasuk yang tidak segera berdampak langsung terhadap harga, seperti penerapan pendekatan berdasarkan aturan (*rule-based*) dalam menentukan harga BBM bersubsidi sedemikian rupa agar secara bertahap dapat membatasi eksposur fiskal terhadap harga BBM dalam denominasi Rupiah..

...termasuk langkah-langkah membuat kemajuan lebih banyak dalam pengurangan kemiskinan, ...

Melakukan re-alokasi belanja subsidi dapat mendukung penguatan program perlindungan sosial Indonesia. Sementara perluasan program bantuan sosial jangka panjang baru-baru ini pada kuartal ketiga 2013 disambut baik, belanja bantuan sosial (sekitar 0.5 persent dari PDB) tetap rendah berdasarkan standar global dan dibutuhkan komitmen terhadap bantuan sosial yang berkembang dan efektifitas pelaksanaan program untuk membantu mempercepat pengurangan kemiskinan. Sebagai contoh, tingkat kemiskinan di Indonesia turun sebesar 0,6 poin persentase dalam setahun hingga Maret 2013, menjadi 11,4 persen sesuai pengukuran resmi. Menuju 2014, lebih tingginya harga-harga dan lebih lambatnya pertumbuhan ekonomi akan menambah tantangan pengentasan kemiskinan. Sesungguhnya, model kemiskinan Bank Dunia memproyeksikan bahwa tingkat kemiskinan pada bulan Maret 2014 akan mencapai 11,0-11,1 persen, yang mengindikasikan perlambatan laju pengentasan kemiskinan yang sedang berlangsung dan menunjukkan bahwa sasaran tingkat kemiskinan Pemerintah untuk tahun 2014 sebesar 8-10 persen tampaknya tidak akan tercapai.

... untuk mengatasi tantangan pasar tenaga kerja jangka panjang dan kapasitas tata pemerintah di tingkat daerah

Untuk membuat kemajuan lebih lanjut dalam pencapaian sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah Indonesia, perubahan struktural yang positif yang sedang berlangsung pada pasar tenaga kerja harus didukung. Hal ini membutuhkan langkah-langkah untuk memfasilitasi pertumbuhan lapangan kerja formal pada sektor-sektor dengan nilai tambah yang lebih tinggi, termasuk meningkatkan dasar keterampilan dari angkatan kerja Indonesia. Edisi *IEQ* ini juga mengupas hasil survey terbaru dari unsur penting lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan, yaitu memperkuat kapasitas tata kelola daerah dalam penyampaian pelayanan yang efektif.

A. Perkembangan ekonomi dan fiskal terkini



1. Permintaan global perlahan membaik, namun risiko pembiayaan eksternal tetap ada

Kinerja pertumbuhan negara-negara mitra dagang utama Indonesia tetap beragam menjelang akhir 2013...

Kondisi ekonomi di ekonomi terbesar dunia, dan para mitra perdagangan utama Indonesia, tetap tidak merata. Zona Eropa akhirnya keluar dari resesi pada triwulan kedua tahun 2013, setelah mencatat kontraksi selama enam triwulan berturut-turut, namun pertumbuhan kembali melemah pada triwulan ketiga (ke 0,4 persen triwulan-ke-triwulan (*quarter-to-quarter, qoq*) pada tingkat disetahunkan dengan penyesuaian musiman (*seasonally-adjusted annualized rate, saar*), menunjukkan jalur pemulihan tidaklah mulus. Pertumbuhan juga melemah di Jepang pada triwulan ketiga, menjadi 1,1 persen *qoq saar*, sementara, sebaliknya, pertumbuhan AS menguat ke 3,6 persen *qoq saar*, yang mencerminkan bahwa ekonomi AS terus meningkat dengan cukup stabil selama tahun 2013. Di antara ekonomi-ekonomi berkembang utama, pertumbuhan di Cina meningkat ke 9,3 *qoq saar*, namun *output* di Brasil berkontraksi pada triwulan ketiga dibanding triwulan kedua, sebesar 0,5 persen (dengan penyesuaian musiman) dan pertumbuhan relatif lemah di India (4,8 persen tahun-ke-tahun (*year-on-year, yoy*)), pada triwulan ketiga) walau belakangan ini tampaknya pertumbuhan akan kembali menguat.

...namun permintaan global diperkirakan akan sedikit membaik pada tahun 2014...

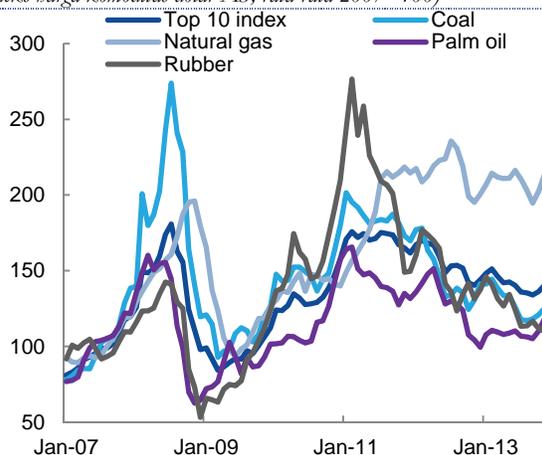
Melihat ke depan ke tahun 2014, pertumbuhan di negara-negara berpenghasilan tinggi diperkirakan akan tetap atau meningkat dari laju saat ini, dengan pemulihan Zona Eropa yang masih rapuh diperkirakan akan berlanjut, dan ekonomi AS diperkirakan akan meningkat dengan laju yang mendekati lajunya sekarang. Didukung dengan ekspansi ringan, pertumbuhan negara-negara berkembang juga diperkirakan akan turut meningkat, dengan ekonomi Cina meningkat sebesar 7,7 persen pada tahun 2014, dan pertumbuhan negara berkembang selain Cina meningkat melampaui 4 persen pada tahun 2014, naik dari sekitar 3,5 persen pada tahun 2013. Sejalan dengan itu, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan para mitra perdagangan Indonesia secara rata-rata tertimbang akan meningkat menjadi 3,9 persen pada tahun 2014, naik sebesar 0,5 poin persentase dari tahun 2013. Dengan demikian, pada *base case*, permintaan internasional akan meningkat secara moderat selama tahun 2014, mendorong keberlanjutan ekspansi yang tidak besar bagi permintaan ekspor Indonesia.

...dan harga komoditas utama Indonesia mungkin akan stabil kembali, setelah mengalami penurunan selama dua tahun

Harga-harga komoditas internasional pada umumnya telah meningkat selama beberapa bulan terakhir. Indeks harga tertimbang untuk sepuluh komoditas ekspor utama Indonesia dalam dolar AS, yang merupakan sekitar setengah dari jumlah penerimaan ekspor, menurun pada bulan September dan kemudian kembali meningkat menjelang akhir bulan November, berkat naiknya harga batubara, gas alam, dan minyak sawit (Gambar 1). Sebagai akibatnya, penurunan tahun berjalan hingga bulan November menurun ke 2,5 persen dari 7 persen pada bulan September. Namun indeks itu masih 22 persen lebih rendah dari nilai puncaknya pada bulan Februari 2011, dengan harga-harga batubara (turun 40 persen), minyak sawit (turun 37 persen), dan tembaga (turun 27 persen) yang mencatat kemunduran drastis dari tingkat harganya pada tahun 2011. Bila tren peningkatan itu berlanjut, stabilisasi harga-harga komoditas yang baru dimulai itu dapat membantu memperlambat penurunan kondisi perdagangan Indonesia yang menjadi pendorong sebagian besar penurunan dalam neraca eksternalnya. Namun, prospek dasar (*base line*) yang hanya melihat peningkatan kondisi pertumbuhan dunia yang moderat selama tahun 2014, bersama-sama dengan kemungkinan pengetatan kondisi likuiditas global dan faktor-faktor sisi penawaran yang lebih struktural yang memberikan tekanan terhadap harga-harga, tidak memproyeksikan peningkatan besar dalam harga-harga komoditas. Selain itu, seperti dibahas pada *IEQ* edisi bulan Oktober 2013, kondisi perdagangan Indonesia masih menghadapi kenyataan bahwa harga minyak dunia, yang mempengaruhi jumlah impor BBM yang cukup besar bagi Indonesia, masih tetap relatif tinggi dibanding harga-harga komoditas bukan energi.

Gambar 1: Harga komoditas ekspor utama menunjukkan tanda-tanda stabilisasi, umumnya datar dibanding setahun yang lalu

(indeks harga komoditas dolar AS, rata-rata 2007=100)



Catatan: Indeks 10 terbesar adalah indeks 10 komoditas ekspor terpenting Indonesia dalam dolar AS, tertimbang menurut bagian dalam ekspor tahun 2012
Sumber: Bank Dunia

Gambar 2: Biaya pinjaman di pasar global dan berkembang tetap menunjukkan kecenderungan naik (yield, persen)



Catatan: Imbal hasil (*yield*) obligasi pasar berkembang dan Indonesia yang diukur oleh indeks EMBIG JP Morgan dan sub-indeks Indonesia
Sumber: JP Morgan

Namun ketidakpastian kebijakan yang terus berlangsung membebani prospek internasional...

Sementara perkiraan adanya sedikit peningkatan dalam pertumbuhan global pada tahun 2014 merupakan hal yang secara umum positif bagi Indonesia karena hal ini akan mendorong permintaan ekspor secara keseluruhan, prospek internasional masih diliputi ketidakpastian kebijakan-kebijakan besar, yang mempertahankan tingginya risiko skenario pertumbuhan global yang lebih buruk. Di Eropa, tingginya tingkat pengangguran (12 persen di Zona Eropa), kesenjangan produksi (*output gap*) yang lebar, dan berlanjutnya kontraksi kredit mendorong risiko deflasi, sementara reformasi yang selama ini telah menyedot sumber daya dapat menyulitkan tercapainya reformasi yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan struktural. Hal ini akan menambah kerumitan pemulihan ekonomi. Di Asia, laju dan bagaimana penerapan upaya reformasi struktural yang ambisius di Cina dan Jepang, dan pemilu di India, akan mempengaruhi prospek.

...dan pembiayaan eksternal dan kondisi pasar masih menantang

Di atas semua itu, dampak terhadap pasar keuangan dunia dan pada akhirnya ekonomi riil, dan waktu, dari penghapusan bertahap program pembelian aset Bank Sentral AS (yang disebut sebagai “*tapering*”) masih tidak pasti, yang menjadikan risiko gejolak pasar internasional dan kondisi pembiayaan eksternal yang lebih sulit menjadi perhatian utama. *Yield* AS tetap lebih tinggi dibanding sebelum rencana penghapusan pada bulan Mei, dengan *yield* obligasi Pemerintah AS 10-tahunan sebesar 2,9 persen pada 11 Desember, naik dari 1,6 persen pada bulan April. Biaya pinjaman surat berharga negara dalam dolar AS untuk pasar-pasar berkembang telah meningkat rata-rata sekitar 160 basis poin pada tahun 2013 (seperti diukur melalui *yield* campuran dari JP Morgan *Emerging Market Bond Index*). Dengan upaya Bank Sentral AS untuk melakukan normalisasi kebijakan moneter, kemungkinan naiknya tekanan pada biaya pinjaman global untuk jangka yang lebih panjang, seiring dengan terjadinya sejumlah gejolak pasar seperti yang terjadi pada upaya penghapusan pada bulan Mei-Agustus, akan tetap menjadi perhatian. Dengan demikian, pasar-pasar berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi pengetatan kondisi likuiditas global, yang memberikan tekanan naik terhadap beban pembiayaan eksternal mereka dan berpotensi mempersulit kebergantungan kepada aliran masuk investasi portofolio bersih untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan eksternal.

2. Walau konsumsi kuat, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat

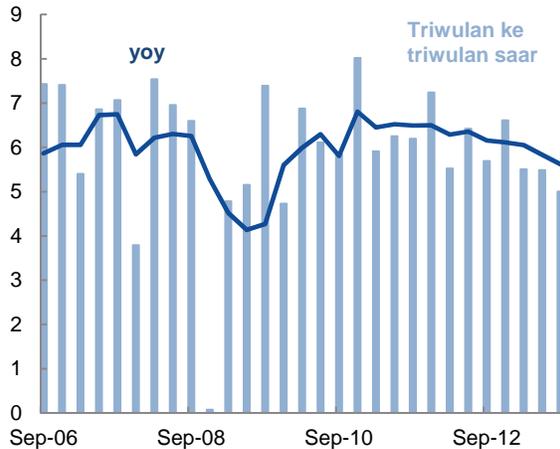
Pertumbuhan ekonomi Indonesia melanjutkan perlambatannya pada triwulan 3...

Pengetatan kondisi pembiayaan eksternal, yang dimulai pada bulan Mei, telah menambah transmisi bertahap dari rendahnya harga-harga komoditas sejak tahun 2011, yang mendorong sejumlah penyesuaian ekonomi dan kebijakan yang penting di Indonesia, dan membebani pertumbuhan. Laju ekspansi ekonomi Indonesia telah melambat, suatu tren yang oleh Bank Dunia diperkirakan akan berlanjut setidaknya hingga masa awal tahun 2014. PDB riil pada triwulan ketiga meningkat 5,6 persen tahun-ke-tahun (*yy*), yang menandai perlemahan pertumbuhan selama lima triwulan berturut-turut secara tahun-ke-tahun, yang turun dari nilai tingginya sebesar 6,4 persen pada triwulan kedua tahun 2012 (Gambar 3). Secara berurutan, pertumbuhan pada triwulan ketiga melambat ke 5,0 persen triwulan-ke-triwulan dengan penyesuaian musiman (*qoq saar*), turun dari 5,5 persen pada dua triwulan yang lalu dan nilai tingginya sebesar 6,6 persen pada triwulan keempat 2012. Berlawanan dengan PDB riil, pertumbuhan PDB nominal meningkat tajam, ke 12,1 persen *yy* pada triwulan 3 dari 8,2 persen *yy* pada triwulan 2, yang mencerminkan peningkatan dalam pertumbuhan deflator PDB—pengukuran harga-harga yang paling luas dalam ekonomi—yang sebelumnya telah jatuh ke tingkat yang sangat rendah. Hal ini sejalan dengan peningkatan tajam dalam harga konsumen pasca kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan Juni (Gambar 4), dan tampaknya juga mencerminkan lebih tingginya harga impor yang berasal dari depresiasi Rupiah.

...terutama mencerminkan pertumbuhan investasi yang lemah...

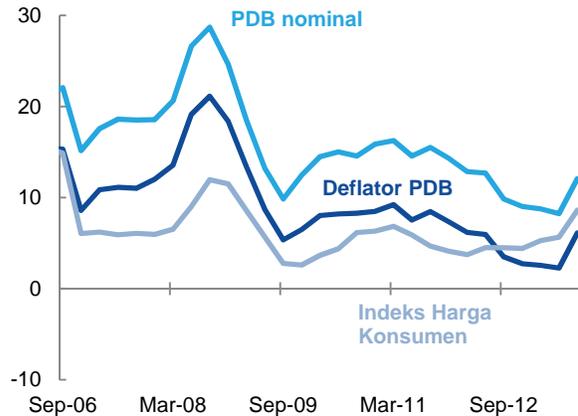
Pendorong utama moderasi pertumbuhan pada triwulan ketiga adalah investasi tetap, yang sedikit meningkat sebesar 2,6 persen triwulan-ke-triwulan dengan penyesuaian musiman (*qoq saar*) menjadi 4,5 persen lebih tinggi *yy*. Pertumbuhan investasi, walau bergejolak lintas triwulanan, telah mencatat tren penurunan sejak nilai puncaknya sebesar 12,5 persen *yy* pada triwulan kedua tahun 2012 (Gambar 5). Investasi bangunan, yang merupakan 85 persen dari jumlah nominal belanja investasi tetap, tetap kokoh, dan bahkan meningkat pesat sebesar 9,5 persen (*qoq saar*) pada triwulan ketiga. Perlambatan dalam investasi secara keseluruhan telah didorong oleh komponen-komponen belanja investasi yang lebih kecil namun lebih bergejolak. Belanja untuk barang-barang mesin, peralatan, dan transportasi dari luar negeri (yang membentuk sebagian besar dari investasi tetap bukan bangunan) hampir datar pada triwulan ketiga dibanding triwulan kedua, sehingga gerakannya jauh di bawah tingkatan setahun yang lalu (dengan barang permesinan dan peralatan luar negeri turun sebesar masing-masing 0,5 persen dan 8,4 persen *yy*).

Gambar 3: Pertumbuhan PDB riil mengalami perlambatan, turun ke 5,6 persen yoy dan 5,0 qoq saar pada triwulan 3... (pertumbuhan PDB riil, persen)



Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 4: ...walau pertumbuhan PDB nominal naik tajam pada triwulan 3 berkat peningkatan harga secara luas (pertumbuhan yoy, persen)

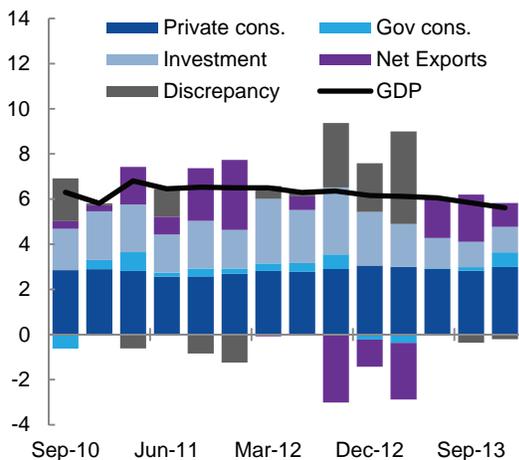


Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

...yang memberikan tekanan pada impor, sementara volume ekspor tetap lemah

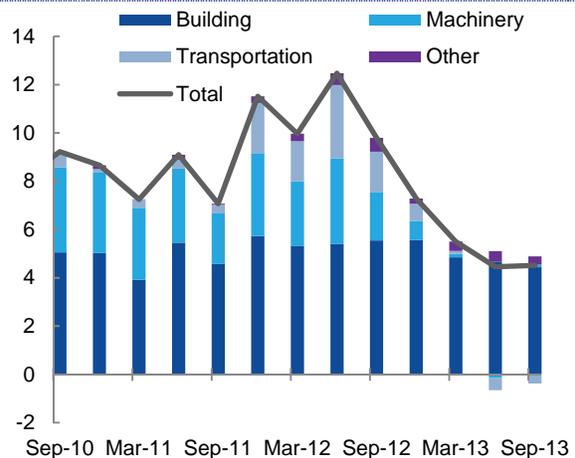
Pemintaan bagi permesinan dan peralatan yang mendarat atau berkontraksi, pada gilirannya, telah membatasi impor. Volume impor mencatat kontraksi tajam pada triwulan ketiga, sebesar 3,0 persen, dari triwulan kedua secara penyesuaian musiman. Volume ekspor hanya sedikit berubah dari triwulan kedua (menurun sebesar 0,8 persen dengan penyesuaian musiman). Secara keseluruhan, ekspor bersih memberi tambahan yang signifikan terhadap pertumbuhan produksi (*output*) pada triwulan ketiga.

Gambar 5: Pertumbuhan investasi telah melambat secara signifikan sementara pertumbuhan konsumsi tetap kuat... (pertumbuhan pengeluaran dan PDB riil yoy, persen)



Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 6: ...dengan hanya investasi pergedungan mendorong positifnya keseluruhan pertumbuhan investasi (kontribusi pada pertumbuhan investasi keseluruhan yoy, persen)



Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Sebaliknya, pertumbuhan konsumsi tetap bertahan kuat

Konsumsi swasta, yang merupakan sekitar 55 persen dari jumlah pengeluaran, meningkat semakin kuat pada triwulan ketiga, sebesar 6,9 persen *qoq saar* menjadi 5,5 persen *yoy*, walau dengan peningkatan harga BBM bersubsidi pada bulan Juni dan kebijakan pengetatan moneter, serta gejolak pasar keuangan dan depresiasi valuta yang terjadi selama triwulan itu. Ketahanan belanja rumah tangga ini sebagian mencerminkan dampak positif dari paket kompensasi Pemerintah sebesar 30 triliun rupiah yang mengikuti peningkatan harga BBM (yang mulai dicairkan pada triwulan ketiga, seperti dibahas lebih lanjut pada bagian B.1, dan dibandingkan dengan perkiraan peningkatan konsumsi selama triwulan itu sebesar 111 triliun

rupiah). Alasan-alasan lain tampaknya termasuk jeda waktu dalam transmisi kebijakan moneter ke ekonomi riil, yang konsisten dengan laju ekspansi kredit yang masih cepat yang tercatat hingga bulan September, dampak tertunda dari pergerakan harga aset yang tercatat selama triwulan itu (yang telah meningkatkan beban pembiayaan dan impor) terhadap harga-harga dalam negeri, dan keterkaitan jangka pendek yang relatif terbatas antara harga aset dan belanja konsumen (yaitu dengan hanya sedikitnya efek kekayaan).

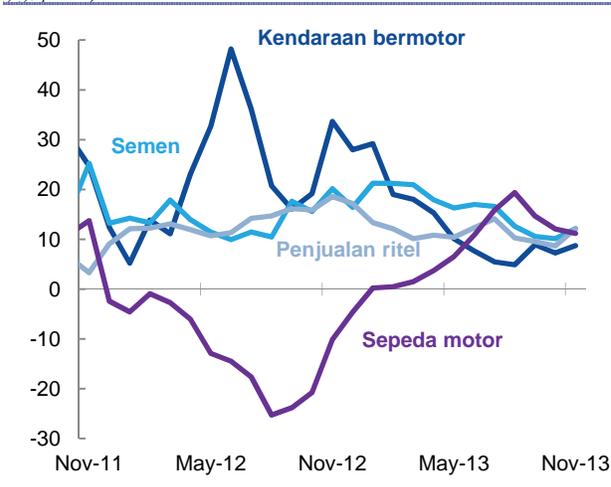
Sektor konstruksi tetap kuat pada triwulan 3, dan sektor jasa terus mendorong pertumbuhan

Pada sisi produksi, penurunan pertumbuhan bersifat luas lintas sektor pada triwulan ketiga, namun sebagian besar terpusat pada manufaktur dan perdagangan, hotel dan rumah makan. Sektor konstruksi tumbuh sebesar 5,9 persen *qoq saar* menjadi 6,2 persen *yoy*; laju yang sedikit lebih lambat dibanding triwulan kedua namun secara umum tetap konsisten dengan pesatnya laju investasi pergedungan yang disinggung di atas. Pertumbuhan sektor jasa secara umum tetap kuat, pada 6,3 persen *qoq saar* (naik 7,3 persen *yoy*), namun moderasi pada sub-sektor jasa yang terbesar—perdagangan, hotel, dan rumah makan—telah tercatat, dengan pertumbuhan produksi (*output*) yang melambat menjadi 2,8 persen *qoq saar*, sehingga peningkatan produksi pada triwulan tiga menjadi 6,0 persen *yoy*, dibanding kenaikan 6,5 persen *yoy* pada paruh pertama tahun 2013. Pertumbuhan produksi industri, di luar pertambangan, menurun ke 2,4 persen *qoq saar* (3,8 persen *yoy*). Produksi pertambangan bergerak mendatar dibanding triwulan kedua menurut penyesuaian musiman, dengan peningkatan produksi sebesar 1,6 persen *yoy*, namun hal ini menutupi tren yang berbeda pada dua sub-sektor utama pertambangan: produksi minyak mentah dan gas alam masih tetap lemah (turun 3,0 persen *yoy*), sementara produksi non-migas meningkat, naik sebesar 3,2 persen *qoq saar*, yang secara potensial mencerminkan peningkatan produksi menjelang penerapan larangan ekspor mineral mentah pada bulan Januari 2014 (lihat Kotak 1).

Tren indikator frekuensi tinggi bercampur, namun secara keseluruhan konsisten dengan laju pertumbuhan permintaan dalam negeri melambat...

Indikator kegiatan ekonomi berfrekuensi tinggi menunjukkan bahwa sentimen konsumen tetap berada di bawah nilai tinggi yang tercatat pada paruh pertama tahun 2013 (yaitu sebelum kenaikan harga BBM bersubsidi bulan Juni), walau sentimen itu tidak berada dalam tren penurunan berkelanjutan. Survei BI mencatat peningkatan penjualan ritel menjadi 12,1 persen *yoy* pada bulan November, namun laju pertumbuhannya tetap di bawah nilai tingginya pada triwulan akhir 2012 pada sekitar 17 persen *yoy*. Pertumbuhan penjualan kendaraan juga melambat relatif dibanding nilai tingginya pada tahun 2012 dan awal 2013, sementara penjualan sepeda motor tetap tinggi sejak hari raya Idul Fitri, namun dengan momentum yang menurun. Pada sisi produksi, penjualan semen pada periode dua bulan setelah Ramadan (yaitu bulan September dan Oktober) meningkat sebesar 12,9 persen *yoy*, sekitar setengah dari pertumbuhan di atas 21 persen *yoy* yang tercatat pada awal tahun 2013 (Gambar 7). *Purchasing Managers Index* (PMI) dari HSBC untuk sektor manufaktur Indonesia menunjukkan kondisi perkembangan yang tipis, pada angka 50,3 untuk bulan November.

Gambar 7: Tren indikator frekuensi tinggi bercampur namun di bawah nilai tingginya yang pernah tercatat
(Indeks penjualan ritel BI, volume penjualan kendaraan dan semen, 3mna *yoy*, persen)



Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

...dan pertumbuhan produksi (*output*) diproyeksikan akan semakin melambat

Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan PDB Indonesia akan semakin melambat, menjadi 5,3 persen untuk tahun 2014 menurut *base case* (Tabel 2). Permintaan dalam negeri menghadapi keterbatasan tidak hanya dari kondisi pembiayaan yang lebih ketat, seperti dibahas lebih lanjut pada Bagian 5, namun juga keterbatasan yang secara potensial lebih berjangka panjang karena harga-harga komoditas dan kondisi perdagangan yang kurang mendukung dibanding tahun-tahun sebelumnya. Secara khusus, konsumsi swasta, andalan ekonomi Indonesia, sejauh ini tetap kokoh, namun tampaknya akan menerima lebih banyak tekanan, sehingga akan mengganggu pertumbuhan. Prospek investasi bergantung pada investasi pergedungan—yang tengah dihadapkan pada kredit yang lebih ketat, penurunan dana yang dapat diinvestasikan dari laba yang berkaitan dengan komoditas, dan peningkatan biaya impor (seperti dibahas pada Bagian 4)—yang tampaknya juga akan melambat. Belanja yang berkaitan dengan pemilu pada tahun 2014 tampaknya akan menambah permintaan dalam negeri secara material, karena kegiatan yang berkaitan dengan kampanye akan meningkatkan konsumsi swasta, walau hanya sementara, dan sebagian darinya dapat tergantikan dengan belanja lainnya. Secara keseluruhan, risiko-risiko terhadap prospek pertumbuhan condong kepada penurunan, seperti dibahas pada Bagian 7.

Tabel 2: Menurut skenario dasar (*baseline*) PDB diproyeksikan tumbuh 5,6 persen untuk 2013 dan 5,3 persen untuk 2014 (*persentase perubahan, kecuali dinyatakan lain*)

	Tahunan			Triwulan tahunan ke Desember			Revisi tahunan	
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2013	2014
1. Indikator ekonomi utama								
Jumlah pengeluaran konsumsi	4,8	5,1	4,8	3,9	4,8	5,2	0,1	-0,2
Pengeluaran konsumsi swasta	5,3	5,1	4,9	5,4	4,4	5,2	0,2	-0,3
Konsumsi pemerintah	1,2	5,0	4,4	-3,3	7,0	5,0	-1,1	-0,1
Pembentukan modal tetap bruto	9,8	4,4	4,4	7,3	3,1	5,4	-0,9	-0,5
Ekspor barang dan jasa	2,0	4,4	5,4	0,5	3,8	7,0	-1,3	-0,3
Impor barang dan jasa	6,6	0,5	3,4	6,8	-1,9	4,0	-1,9	-1,2
Produk domestik bruto	6,2	5,6	5,3	6,1	5,1	5,4	0,0	0,0
Pertanian	4,0	3,7	2,7	2,0	5,3	2,6	0,3	0,3
Industri	5,2	4,5	4,2	5,4	3,8	4,4	0,1	0,2
Jasa-jasa	7,7	7,1	6,8	7,6	6,2	6,8	-0,2	-0,2
2. Indikator eksternal								
Neraca pembayaran (AS\$ miliar)	0,2	-14,0	-12,8	n/a	n/a	n/a	1,4	-8,8
Saldo neraca transaksi berjalan (AS\$ miliar)	-24,4	-30,6	-22,8	n/a	n/a	n/a	-1,4	-0,7
Neraca perdagangan (AS\$ miliar)	-1,7	-9,1	-2,5	n/a	n/a	n/a	-1,2	-1,5
Saldo neraca keuangan (AS\$ miliar)	25,2	17,1	10,0	n/a	n/a	n/a	2	-8,1
3. Pengukuran ekonomi lainnya								
Indeks harga konsumen	4,3	7,0	6,1	4,4	8,6	5,1	-0,3	-0,6
IHK keranjang kemiskinan	6,5	7,8	6,7	5,4	9,7	5,2	0,6	0,4
Deflator PDB	4,6	4,4	6,4	2,7	6,6	5,8	1,8	2,2
PDB nominal	11,0	10,3	12,0	9,0	12,0	11,6	1,9	2,3
4. Asumsi ekonomi								
Kurs tukar (Rp/AS\$)	9419	10600	11800	9630	11800	11800	200,0	400,0
Harga minyak mentah Indonesia (AS\$/barel)	113	104	103	108	105	103	-1,9	-2,0
Pertumbuhan mitra dagang utama	3,4	3,4	3,9	3,1	4,0	4,0	0,0	0,0

Catatan: Proyeksi aliran perdagangan berkaitan dengan neraca nasional. Kurs tukar adalah asumsi dari rata-rata terakhir. Revisi relatif dibanding proyeksi pada *IEQ* edisi bulan Oktober 2013

Sumber: Kemenkeu; BPS; BI; CEIC; proyeksi Bank Dunia

3. Inflasi IHK telah normal namun inflasi inti meningkat

Inflasi di tingkat konsumen bergejolak selama tahun 2013...

Harga-harga konsumen telah bergejolak selama tahun 2013, utamanya mencerminkan pertama-tama dampak pembatasan perdagangan bahan pangan tertentu (yang kemudian dilepaskan) dan dampak peningkatan harga BBM bersubsidi pada bulan Juni. Namun demikian dampak langsung dari peningkatan harga BBM kini telah memudar dan penurunan inflasi bahan pangan telah terjadi pasca Idul Fitri, tekanan-tekanan inflasi yang mendasarinya (seperti diukur melalui IHK inti) telah meningkat secara signifikan sejak bulan Mei. Ke depannya, tantangan kebijakan moneter adalah untuk mengukur risiko berjalan tentang pengaruh yang lebih tinggi dari kurs tukar valuta terhadap harga-harga konsumen (yang sering disebut sebagai “inflasi impor”), dan perkiraan peningkatan harga, yang secara luas diimbangi dengan perkiraan moderasi berkelanjutan dalam permintaan dalam negeri.

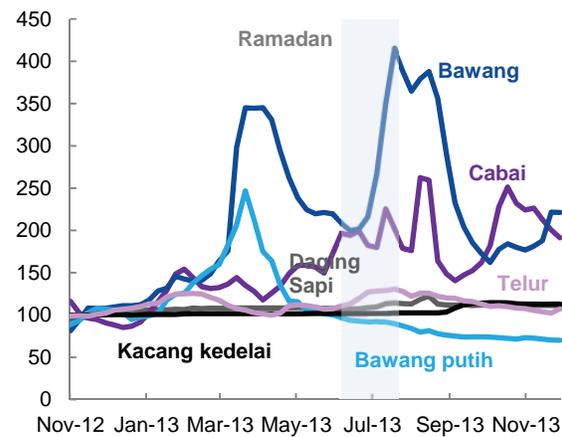
...namun momentum inflasi IHK telah melemah karena pudarnya pengaruh kenaikan BBM bersubsidi dan bulan Ramadan...

Harga-harga konsumen sebagaimana diukur melalui indeks harga konsumen (IHK) meningkat sebesar 5,5 persen dari Juni hingga Agustus, terutama karena peningkatan rata-rata sebesar 33 persen dalam harga BBM bersubsidi mulai tanggal 22 Juni, dan juga dampak musiman bulan Ramadan, yang jatuh pada bulan Juli/Agustus 2013. Kenaikan tingkat harga yang tiba-tiba ini telah mendorong peningkatan harga hingga inflasi tahun-ke-tahun menjadi 8,4 persen pada bulan November. Namun momentum inflasi IHK telah berkurang sejak bulan Agustus, dengan IHK umumnya mendatar secara bulan-ke-bulan selama periode tersebut, karena peningkatan harga yang berkaitan dengan transportasi telah mendatar dan harga bahan pangan telah kembali turun secara signifikan dari peningkatan yang berkaitan dengan bulan Ramadan pada pertengahan tahun (Gambar 9).

...dengan deflasi harga bahan pangan telah terjadi pasca gejolak harga sejumlah bahan pangan utama selama tahun 2013

Harga bahan pangan dalam negeri di Indonesia mencatat pergerakan yang bergejolak selama tahun 2013, naik pada awal tahun karena pembatasan perdagangan yang mendorong kenaikan harga yang signifikan untuk bahan-bahan seperti bawang bombai, cabai dan bawang putih. Pelonggaran peraturan pembatasan itu, yang kemudian dilakukan, memberikan sejumlah keringanan harga pada triwulan kedua, sebelum dampak musiman dari Ramadan pada bulan Juli/Agustus kembali membawa tekanan naik bagi sebagian besar harga bahan pangan (Gambar 8). Dibantu dengan penurunan banyak harga bahan pangan musiman pasca bulan Ramadan, deflasi harga bahan pangan secara keseluruhan bulan-ke-bulan selama tiga bulan berturut-turut hingga bulan November telah menurunkan inflasi harga bahan pangan mentah dari puncaknya sebesar 15,1 persen *yoY* pada bulan Agustus, menjadi 12,2 persen pada bulan November.

Gambar 8: Harga sejumlah bahan pangan utama mulai stabil setelah tahun yang bergejolak
(indeks harga, rata-rata November 2012=100)



Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Harga beras telah sedikit naik, walau tetap berada cukup tinggi di atas harga internasional

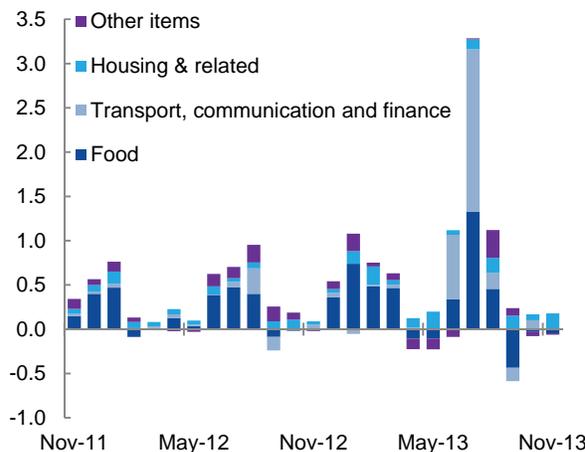
Harga beras dalam negeri, komponen utama dari keranjang konsumsi rumah tangga miskin di Indonesia, meningkat sebesar 5,1 persen *yy* pada bulan November. Peningkatan yang relatif kecil ini disebabkan oleh produksi yang relatif baik. Perkiraan resmi peningkatan produksi beras Indonesia untuk tahun 2013 adalah sebesar 2,6 persen setelah panen terakhir tahun itu, menjadi 70,87 juta ton (44,6 juta ton setelah digiling), terutama mencerminkan peningkatan lahan, karena hasil panen diperkirakan tetap setara dengan catatan hasil panen yang tinggi pada tahun 2012 sebesar 5,1 ton per hektar. Sedikitnya peningkatan dalam harga beras dalam negeri juga berkontribusi dalam semakin kecilnya selisih harga beras di Indonesia dan jenis yang setara di pasar internasional (dari Thailand atau Vietnam). Catatan rekor harga beras di Indonesia adalah 90-110 persen lebih tinggi (bergantung pada kualitas) dibanding harga internasional pada bulan Juni, dan perbedaan itu turun menjadi 50-60 persen lebih tinggi pada bulan November. Penurunan selisih harga beras antara Indonesia dan pasar internasional juga didorong oleh peningkatan dalam harga beras internasional dalam denominasi Rupiah (termasuk peningkatan masing-masing sebesar 8 persen dan 29 persen untuk beras kualitas menengah dari Vietnam dalam dolar AS dan dalam Rupiah).

Namun kenaikan inflasi inti, menunjukkan bahwa masih dibutuhkan kehati-hatian terhadap risiko inflasi...

Walaupun tidak adanya kenaikan dalam IHK merupakan indikasi yang menggembirakan bahwa secara keseluruhan tekanan harga konsumen tetap terkendali, pola inflasi inti yang belakangan terjadi—yang tidak menyertakan barang-barang volatil seperti bahan pangan dan BBM—menuntut kehati-hatian kita (Gambar 10). IHK inti meningkat sebesar 4,8 persen *yy* pada bulan November, catatan bulanan tertingginya sejak bulan September 2011, dan peningkatannya, sebesar 7,7 persen laju yang disetahunkan dari September ke November selama tiga bulan terakhir, merupakan laju yang cukup signifikan.

Gambar 9: Deflasi bahan pangan musiman dan pudarnya kenaikan harga transportasi telah menekan inflasi IHK turun...

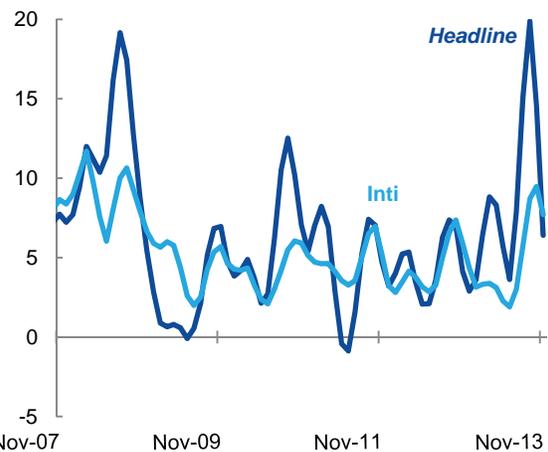
(komposisi peningkatan inflasi IHK bulanan, poin persentase)



Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 10: ...namun tren inflasi inti telah meningkat secara signifikan

(perubahan 3-bulan/3-bulan yang disetahunkan, persen)



Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

...terutama terkait dengan tekanan pendorong biaya (*cost push*) dari perlemahan Rupiah

Salah satu sumber tekanan kenaikan inflasi inti sejak bulan Mei tampaknya adalah depresiasi Rupiah yang, walau secara umum mendukung penyesuaian ekonomi Indonesia terhadap keterbatasan eksternal, juga mendorong tekanan inflasi yang diakibatkan biaya melalui harga barang-barang impor. Dengan depresiasi Rupiah yang cukup signifikan sebesar 24 persen selama tahun berjalan, peningkatan inflasi inti sejauh ini masih relatif kecil. Namun, dengan tidak adanya kontrafakta, perlu dipahami bahwa inflasi mungkin bisa lebih rendah lagi bila tidak ada depresiasi Rupiah. Perlemahan Rupiah tampaknya juga akan terus mendorong terjadinya inflasi dengan jeda waktu, karena importir dapat menyerap beban impor yang lebih tinggi selama jangka waktu tertentu demi menjaga pangsa pasar, namun kemudian mengalihkan beban peningkatan itu sebagai akibat dari terus terkikisnya keuntungan. Selain itu, dengan sebagian besar penyesuaian Rupiah sejauh ini hanya terjadi sejak bulan Agustus,

masih terlalu dini untuk mengetahui apakah depresiasi Rupiah akan mempengaruhi inflasi. Berdasarkan pengalaman, depresiasi Rupiah sebesar 10 persen diperkirakan akan menambah sekitar 0,5 poin persentase terhadap inflasi pada suatu triwulan tertentu.

Pada skenario dasar, inflasi IHK diperkirakan akan tetap di bawah nilai puncaknya, namun tekanan inflasi inti tetap meningkat pada paruh pertama tahun 2014

Pada skenario dasar (*base case*), tekanan inflasi diperkirakan akan tetap terkendali, sejalan dengan prospek pertumbuhan yang lebih lemah, dengan inflasi IHK menurun secara bertahap melalui triwulan kedua 2014 ke kisaran 7,5 persen. Inflasi IHK lalu diperkirakan akan turun dengan tajam karena dampak dari perubahan harga BBM pada bulan Juni 2013 mengubah jatuhnya dasar perhitungan triwulan ketiga 2014, mengikuti IHK yang akan kembali berada di bawah plafon angka sasaran BI pada 3,5-5,5 persen *yy*. Namun, inflasi inti diperkirakan akan terdorong naik pada beberapa bulan ke depan (menjadi sekitar 5,5 persen pada triwulan pertama tahun 2014) karena kurs tukar dan kenaikan upah, termasuk dampak dari upah minimum yang baru untuk tahun 2014 (termasuk peningkatan sebesar 11 persen yang disetujui untuk DKI Jakarta). Risiko terhadap perkiraan inflasi skenario dasar (*base case*) adalah seimbang, dengan prospek tergantung pada pengaruh dari depresiasi Rupiah, penetapan upah minimum tahun 2014, dan faktor-faktor sementara seperti peningkatan belanja pemilu pada triwulan pertama 2014, dibandingkan dengan tren pertumbuhan permintaan dalam negeri yang lebih lemah dan lebih ketatnya kondisi keuangan.

4. Defisit neraca transaksi berjalan Indonesia masih menjadi fokus, walau impor melemah

Tekanan neraca pembayaran tetap penting terhadap prospek ekonomi Indonesia

Defisit neraca transaksi berjalan Indonesia menunjukkan tanda-tanda menuju kestabilan pada triwulan ketiga, tetapi posisi 8,4 miliar dolar AS defisit itu masih cukup jauh berada di atas investasi langsung bersih sebesar 5,1 miliar dolar AS, meninjurkan defisit “neraca dasar” yang signifikan (sebesar 3,3 miliar dolar AS pada triwulan ketiga). Selisih ini menyoroti berlanjutnya ketergantungan Indonesia terhadap aliran masuk investasi portofolio yang berpotensi untuk berubah arah dengan mudah, suatu potensi kerentanan yang tampaknya tetap menjadi fokus utama bagi para pembuat kebijakan dan investor. Selain itu, walau beban hutang luar negeri Indonesia secara keseluruhan tidak besar, pembayaran kembali hutang luar negeri berjumlah signifikan, menambah risiko valuta dan pembiayaan kembali yang dihadapi oleh Pemerintah dan sektor korporat dalam konteks ketidakpastian yang masih terus berlangsung di pasar keuangan internasional. Pada skenario dasar (*base case*), saldo neraca transaksi berjalan diperkirakan akan menyusut selama tahun 2014, namun kemungkinan adanya perbaikan sedikit meningkat, dan biaya ekonomi dari penyusutan impor, menuntut adanya keberlanjutan fokus kebijakan kepada peningkatan kinerja ekspor dan mendukung investasi asing langsung (*foreign, direct investment, FDI*) sebagai sumber pembiayaan eksternal yang berkualitas tinggi.

Defisit neraca berjalan Indonesia menyempit menjadi 3,8 persen dari PDB pada triwulan 3 dari 4,4 persen pada triwulan 2

Pada triwulan ketiga tahun 2013, defisit neraca berjalan mencapai 8,4 miliar dolar AS, atau 3,8 persen dari PDB (Gambar 11), lebih rendah dari defisit 10 miliar dolar AS atau 4,4 persen dari PDB yang tercatat pada triwulan kedua. Indikasi awal untuk triwulan terakhir tahun 2013 adalah bahwa penyempitan bertahap ini akan terus berlanjut, dengan kembalinya neraca perdagangan barang bulanan ke surplus kecil (42 juta dolar AS) pada bulan Oktober, seperti diukur oleh BPS, walau dengan pergerakan yang bejolak.

Ekspor non-migas mencatat penerimaan yang melemah pada triwulan 3 namun menunjukkan tanda-tanda peningkatan memasuki triwulan 4...

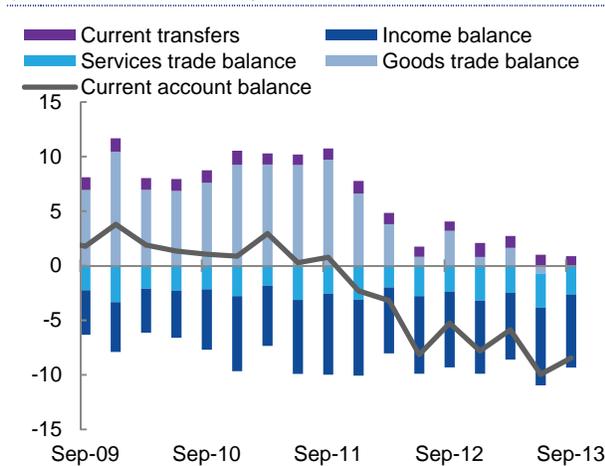
Neraca perdagangan barang non-migas kembali mencatat surplus pada bulan Agustus setelah mengalami defisit selama empat bulan berturut-turut, dan tetap bertahan positif pada bulan Oktober (Gambar 12). Ekspor non-migas melambat selama triwulan ketiga, yang sebagian mencerminkan semakin melemahnya harga-harga komoditas ekspor utama di dunia pada awal triwulan itu, dan dampak perlemahan liburan Idul Fitri terhadap ekspor. Dalam hal ekspor non-migas, penerimaan ekspor manufaktur turun sebesar 2,8 persen dibanding penerimaan pada triwulan ketiga tahun 2012, sementara penerimaan ekspor non-manufaktur (termasuk seluruh komoditas utama non-migas) turun sebesar 8,1 persen dibanding triwulan ketiga tahun 2012. Indikasi-indikasi awal kinerja ekspor pada triwulan keempat cukup baik, dengan penguatan ekspor lintas wilayah, dan penerimaan ekspor non-migas Indonesia meningkat sebesar 2,5 persen *yy* pada bulan Oktober, yang sepertinya terbantu dengan

peningkatan permintaan dari para mitra perdagangan utama seperti AS dan Cina. Seperti dibahas pada Bagian 2, volume ekspor secara umum tampaknya juga tetap bertahan sesuai dengan data triwulan ketiga terakhir yang tersedia, dengan peningkatan sebesar 5,3 persen *yy*, yang menunjukkan pengaruh penurunan penerimaan ekspor dari rendahnya harga-harga dan mengisyaratkan kemungkinan kembali naiknya penerimaan ekspor pada triwulan-triwulan mendatang bila harga komoditas menjadi stabil dan permintaan luar negeri terus meningkat tipis. Namun, terdapat risiko yang signifikan terhadap ekspor, yang berasal dari perdebatan akan pembatasan ekspor bahan mineral mentah, yang dibahas pada Kotak 1.

...sementara defisit perdagangan migas tampaknya relatif tidak terpengaruh oleh peningkatan harga BBM bersubsidi

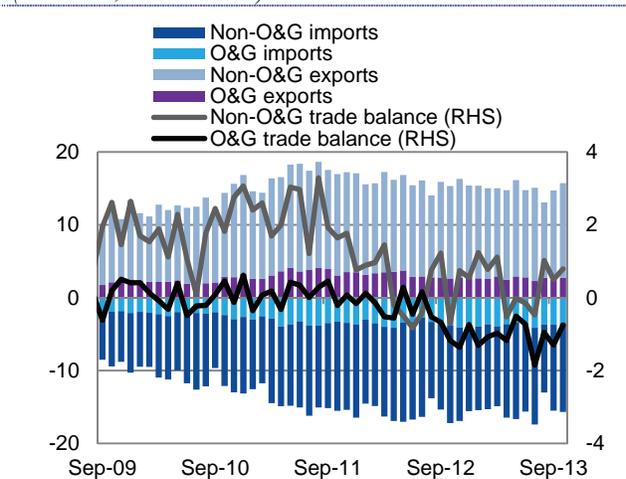
Sebagian besar kelemahan pada keseluruhan neraca berjalan Indonesia sejak akhir tahun 2011 disebabkan oleh jatuhnya surplus perdagangan non-migas, yang umumnya didorong oleh penurunan harga-harga komoditas ekspor. Namun, neraca perdagangan migas bulanan Indonesia juga menjadi beban besar terhadap keseluruhan neraca perdagangan, dan telah menjadi defisit sejak bulan Agustus 2012. Defisit perdagangan migas mencapai 2,4 miliar dolar AS pada triwulan kedua dan meningkat ke 3,9 miliar dolar AS pada triwulan ketiga, yang diperbesar oleh peningkatan permintaan BBM terkait dengan musim liburan, namun juga menunjukkan bahwa permintaan impor minyak telah relatif tidak sensitif terhadap peningkatan tajam harga BBM bersubsidi yang dilaksanakan pada bulan Juni. Data bulanan selanjutnya, untuk bulan Oktober, memang menunjukkan penurunan yang signifikan dalam impor migas—dengan defisit migas menyusut sebesar 50 persen bulan-ke-bulan ke 750 juta dolar AS—namun mengingat volatilitas data bulanan, informasi ini tidak cukup untuk mengukur seberapa signifikan pengaruh dari dorongan impor BBM ini.

Gambar 11: Defisit neraca transaksi berjalan mencapai kestabilan pada 8,4 miliar dolar AS di triwulan 3...
(saldo neraca, miliar dolar AS)



Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 12: ...yang dibantu dengan kembalinya neraca perdagangan non-migas ke surplus sejak bulan Agustus
(saldo neraca, miliar dolar AS)



Catatan: O&G: migas
Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Penyusutan impor kini tampak jelas, meringankan perdagangan dan keseluruhan neraca transaksi berjalan...

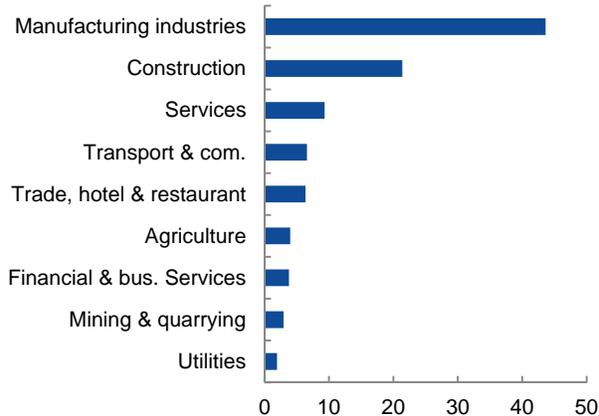
Dengan moderasi pertumbuhan riil dan depresiasi yang dialami Rupiah, perlambatan impor mendukung neraca perdagangan dan penyusutan bertahap dalam keseluruhan neraca berjalan. Barang-barang modal mencatat penurunan 20 persen *yy* pada bulan Oktober (dan turun 16 persen secara rata-rata bergerak 3-bulanan, *yy*), sejalan dengan lemahnya belanja untuk permesinan dan peralatan seperti diuraikan pada Bagian 2. Impor bahan-bahan setengah jadi, di luar migas, turun sebesar 4,1 persen *yy* pada bulan Oktober, secara rata-rata bergerak 3-bulanan. Impor barang konsumsi hanya merupakan bagian impor yang kecil (7 persen dari seluruh beban impor, selama 12 tahun hingga bulan Oktober) namun telah mendarat sejak bulan Agustus pada tingkat yang serupa dengan satu tahun yang lalu. Impor migas merupakan satu-satunya kelompok impor utama yang tetap bertahan tinggi selama triwulan ketiga, namun, seperti disinggung di atas, nilainya pun mencatat perlambatan yang signifikan pada bulan Oktober (Gambar 13).

Gambar 13: Perlemahan impor didorong oleh kontraksi barang-barang modal
(pertumbuhan rata-rata bergerak 3-bulanan komponen impor yoy, persen)



Catatan: Bahan setengah jadi tidak termasuk migas
Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 14: Manufaktur dan konstruksi menyerap hampir 70 persen dari impor Indonesia
(alokasi sektoral nominal impor secara riil, persen)



Sumber: database *World Input-Output 2011*; Perhitungan staf Bank Dunia

...dan dapat terus berlanjut, namun dengan biaya yang nyata terhadap ekonomi

Sektor-sektor ekonomi yang paling banyak menggunakan impor adalah manufaktur dan konstruksi (Gambar 14) yang bersama-sama menyerap hampir 70 persen jumlah impor. Tiga per empat dari jumlah itu—atau setengah dari jumlah impor—merupakan bahan setengah jadi dari manufaktur asing. Selain itu, sekitar 50 persen dari impor manufaktur bagi sektor-sektor yang paling banyak melakukan impor terdiri dari bahan-bahan khusus bagi produksi, terutama produk-produk kimia dan logam, serta peralatan. Karenanya, moderasi yang diperkirakan terus berlanjut dalam pertumbuhan manufaktur dan konstruksi ke tahun 2014 tampaknya akan membantu melanjutkan penurunan beban impor (Gambar 14), namun juga dapat membawa implikasi bagi lapangan kerja dan penerimaan dari sektor-sektor tersebut. Selain itu, seperti diuraikan pada *IEQ* edisi bulan Maret 2013, terdapat komponen *input* impor yang cukup besar yang digunakan dalam produksi ekspor non-komoditas Indonesia. Lebih tingginya biaya *input*-yang-diimpor-ke-produksi—karena depresiasi Rupiah yang terus berlangsung atau kebijakan-kebijakan lain yang bertujuan untuk menekan impor—dengan demikian juga berpotensi untuk membebani daya saing ekspor, yang mengurangi nilai sejumlah manfaat dari depresiasi kurs tukar riil.

Dengan penyesuaian neraca perdagangan terus berlanjut, sorotan terhadap kerentanan pembiayaan eksternal Indonesia tampaknya akan tetap bertahan

Secara keseluruhan, tanda-tanda menunjukkan bahwa neraca perdagangan Indonesia sedang bergeser menuju kestabilan dan mulai memperkecil defisit neraca berjalan secara keseluruhan. Seperti disinggung di atas, volume ekspor barang-barang dan jasa triwulanan, seperti diukur oleh neraca nasional, tetap bertahan, dan penerimaan ekspor barang seperti diukur oleh data perdagangan BPS bulanan untuk pertama kali telah meningkat secara tahunan ke-tahun pada bulan Oktober sejak bulan Maret 2012 (walau hanya tipis sebesar 2,6 persen). Penyusutan impor telah terlihat, seperti diuraikan di atas, dan bahkan defisit perdagangan migas yang telah terjadi sejak bulan Agustus 2012 memperlihatkan sejumlah tanda-tanda penyempitan. Walau baik untuk mengembalikan neraca eksternal Indonesia ke posisi yang berkelanjutan, namun tetap ada harga yang harus dibayar dari penyusutan impor tersebut, sementara laju peningkatan sejauh ini masih berlangsung perlahan. Hal ini berarti kerentanan pembiayaan eksternal tetap akan menjadi sorotan untuk sementara waktu.

Aliran masuk neraca keuangan menurun pada triwulan ketiga dengan aliran masuk portofolio bersih melemah dan aliran valuta dan tabungan menjadi negatif...

Beralih ke sisi neraca keuangan pada neraca pembayaran, neraca modal dan keuangan Indonesia mencatat surplus sebesar 4,9 miliar dolar AS pada triwulan ketiga, menyempit dari 8,4 miliar dolar AS pada triwulan kedua, yang mencerminkan perlemahan dalam aliran masuk modal investasi portofolio dan aliran keluar modal investasi lainnya, walau dengan peningkatan dalam aliran masuk FDI bersih. Aliran masuk modal portofolio bersih melambat ke 1,8 miliar dolar AS (dari 3,4 miliar dolar AS pada triwulan kedua), yang didorong oleh aliran masuk modal bersih ke sekuritas hutang dan ekuitas—hal yang juga dialami oleh pasar-pasar ekonomi berkembang utama lainnya—dan sebagian mencerminkan

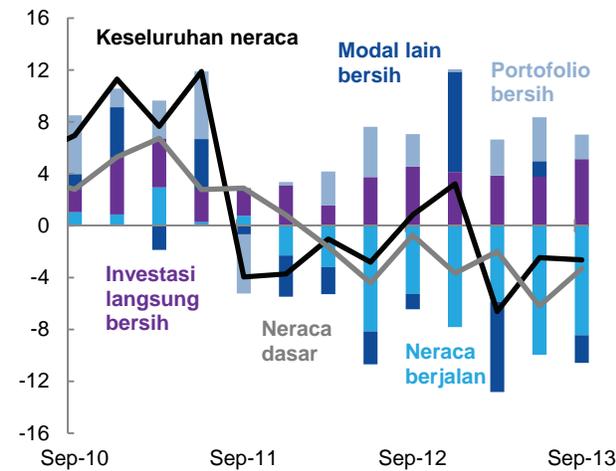
ketidakpastian selama triwulan itu terkait dengan waktu dan laju *tapering* oleh Bank Sentral AS. Lebih lemahnya penerbitan obligasi luar negeri pada triwulan ketiga juga memainkan peran. Investasi lain mencatat jumlah defisit sebesar 2,1 miliar dolar AS umumnya karena aliran keluar valuta dan tabungan. Hal ini membalik surplus yang tercatat pada triwulan kedua, yang berasal dari gabungan aliran masuk valuta dolar AS musiman yang bertujuan untuk melayani permintaan korporat musiman akan valuta dolar AS.

...membuat Indonesia semakin bergantung kepada dukungan aliran masuk FDI

Investasi langsung bersih mencatat surplus sebesar 5,1 miliar dolar AS (dari 3,8 miliar dolar AS), yang mencerminkan aliran masuk investasi langsung ke dalam negeri sebesar 5,4 miliar dolar AS bersama-sama perlemahan investasi langsung ke luar negeri menjadi 0,3 miliar dolar AS. Aliran FDI ke instrumen hutang pada triwulan ketiga tahun 2013 mencapai nilai tertingginya sejak triwulan akhir tahun 2011. Aliran FDI pada triwulan ketiga 2013 itu mencapai 1,9 miliar dolar AS, naik dari 453 juta dolar AS pada triwulan kedua. Aliran FDI ke ekuitas, di sisi lain, turun sebesar 17 persen ke 3,5 miliar dolar AS dibanding triwulan kedua. Secara keseluruhan, aliran modal investasi langsung tampaknya tetap bertahan di tengah perlemahan harga-harga komoditas global pada beberapa triwulan terakhir dan peningkatan ketidakpastian peraturan perundangan pada sektor-sektor utama bagi investasi dalam negeri, terutama pertambangan. Namun, aliran masuk itu dapat besar dan tidak merata (*lumpy*) dan bergantung pada keputusan jangka panjang yang terpengaruh oleh lingkungan kebijakan, yang memiliki risiko-risiko seperti diuraikan pada Bagian 7.

Gambar 15: Investasi portofolio yang lebih melemah memperkecil surplus neraca modal dan finansial pada triwulan 3 dibanding triwulan 2...

(saldo neraca, miliar dolar AS)



Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Tabel 3: Berlanjutnya defisit neraca transaksi berjalan menjadikan sorotan terhadap kebutuhan untuk mendukung FDI

(miliar dolar AS)

	2011	2012	2013	2014
Neraca pembayaran keseluruhan	11,9	0,2	-14,0	-12,8
Sebagai % dari PDB	1,4	0,0	-1,6	-1,5
Neraca berjalan	1,7	-24,4	-30,6	-22,8
Sebagai % dari PDB	0,2	-2,8	-3,5	-2,6
Perdagangan	24,2	-1,7	-9,1	-2,5
Penerimaan	-26,7	-26,8	-25,8	-24,6
Transfer	4,2	4,1	4,2	4,3
Neraca modal & keuangan	13,6	25,2	17,1	10,0
Sebagai % dari PDB	1,6	2,9	2,0	1,2
Inv. langsung	11,5	14,0	16,5	13,2
Inv. portofolio	3,8	9,2	9,9	3,1
Inv. lainnya	-1,8	1,9	-9,4	-6,3
Catatan:				
Neraca dasar	13,2	-10,4	-14,1	-9,6
Sebagai % dari PDB	1,6	-1,2	-1,6	-1,1

Catatan: Neraca dasar = saldo neraca transaksi berjalan + FDI bersih

Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Defisit neraca transaksi berjalan diproyeksikan akan menyempit menjadi 2,6 persen dari PDB pada tahun 2014

Defisit neraca transaksi berjalan diproyeksikan akan mencapai 3,5 persen dari PDB atau sebesar 30,6 miliar dolar AS pada tahun 2013 secara keseluruhan, akibat penyempitan defisit neraca transaksi berjalan pada triwulan terakhir ke sekitar 6,4 miliar dolar AS (atau 3,2 persen dari PDB). Pada tahun 2014, defisit neraca transaksi berjalan diproyeksikan akan tetap bertahan, walau menyusut menjadi 22,8 miliar dolar AS (2,6 persen dari PDB), yang didukung oleh lemahnya pertumbuhan impor dan peningkatan tipis dalam permintaan ekspor (Tabel 3). Namun, skenario dasar (*baseline*) ini tetap bergantung kepada dukungan yang memadai dari kondisi pembiayaan eksternal, sejalan dengan kenyataan bahwa Indonesia tampaknya akan tetap mempertahankan keadaan defisit neraca pembayaran dasarnya pada tahun 2014. Hal ini semakin meningkatkan kebergantungan Indonesia terhadap aliran investasi portofolio yang berpotensi bergejolak. Selain itu, risiko khusus lain bagi neraca perdagangan adalah dampak dari pelarangan ekspor bahan mineral mentah, yang dijadwalkan akan mulai berlaku pada bulan Januari 2014 (Kotak 1).

Defisit neraca transaksi berjalan, bersama-sama dengan amortisasi hutang eksternal yang cukup besar, berkontribusi terhadap tingginya kebutuhan pembiayaan eksternal Indonesia

Sementara defisit neraca berjalan diproyeksikan akan terus menyusut secara bertahap, kebutuhan pembiayaan eksternal bruto Indonesia tetap tinggi. Amortisasi hutang eksternal yang signifikan semakin membebani tingkat defisit neraca transaksi berjalan yang masih cukup besar. Sebagai contoh, menurut Bank Indonesia, pembayaran kembali hutang luar negeri akan mencapai 21,0 miliar dolar AS pada triwulan akhir tahun 2013, dan 25,7 miliar dolar AS pada tiga triwulan pertama tahun 2014 (Tabel 4). Berdasarkan hal ini, jumlah amortisasi hutang eksternal diproyeksikan sebesar 41,2 miliar dolar AS untuk tahun 2013, dibandingkan dengan proyeksi Bank Dunia bagi defisit neraca transaksi berjalan 2013 sebesar 31 miliar dolar AS.

Tabel 4: Tingginya pembayaran hutang eksternal pada triwulan 4, 2013 akan menambah tekanan pada Rupiah...
(*proyeksi pembayaran kembali hutang luar negeri bruto, juta AS\$*)

	Okt - Des 2013	Jan-Sep 2014
Pemerintah dan BI	2.131	10.087
Swasta	18.894	15.617
<i>Bank</i>	3.720	3.074
<i>Non-bank</i>	15.174	12.543
<i>Lembaga keuangan non-bank</i>	1.738	2.199
<i>Perusahaan non-finansial</i>	13.436	10.345
Jumlah	21.025	25.704

Catatan: Berdasarkan posisi hutang luar negeri per September 2013; pembayaran hutang tidak termasuk sekuritas dalam negeri yang dimiliki asing, valuta dan tabungan, dan kewajiban lainnya
Sumber: Bank Indonesia

Kotak 1: Potensi dampak jangka pendek dari usulan larangan ekspor bahan mineral mentah terhadap neraca perdagangan Indonesia

Menjelang tahun 2014, perhatian beralih ke potensi dampak usulan pelarangan ekspor bahan mentah, yang direncanakan akan berlaku mulai bulan Januari 2014. UU Pertambangan tahun 2009 (UU 4/2009) mengharuskan semua pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan kontrak karya (KK) untuk ‘memberikan nilai tambah’ pada produk-produk pertambangannya melalui pemurnian dan pengolahan dalam negeri dalam batas waktu pemenuhan kepatuhan selama lima tahun. Awalnya, peraturan ini direncanakan untuk mulai diberlakukan pada bulan Mei 2012, namun usulan larangan itu ditunda hingga bulan Januari 2014. Berdasarkan peraturan ini, pemegang IUP dan KK tidak diperkenankan untuk mengekspor bijih mineral atau produk olahan, termasuk bijih besi, tembaga, nikel, timah dan bauksit, yang memiliki kandungan mineral di bawah batas minimum – yang semuanya membutuhkan kapasitas peleburan (*smelter*)*.

Pada saat penulisan laporan ini, rincian pelaksanaan usulan larangan tersebut masih dalam pembahasan. Sebagian mencerminkan keprihatinan akan potensi dampak jangka pendek terhadap ekspor mineral Indonesia, tepat pada saat Indonesia sedang menghadapi tekanan pembiayaan eksternal yang signifikan. Komoditas merupakan sebagian besar dari ekspor Indonesia, yang menurut nilainya mencapai sekitar dua per tiga ekspor barang perdagangan. Ekspor mineral yang telah dan belum diproses saja mencapai 10,4 miliar dolar AS pada tahun 2012, sekitar 5 persen dari jumlah ekspor. Keseluruhan bagian dari ekspor mineral yang telah terproses di dalam ekspor mineral telah mencatat kenaikan, dari 40 persen pada tahun 2001 menjadi 52 persen pada tahun 2012.

Secara luas, terdapat tiga jalur perdagangan langsung yang mana larangan ekspor bijih mineral dapat berdampak kepada neraca perdagangan Indonesia. Pertama adalah dampak negatif melalui penurunan ekspor mineral yang belum diproses. Pengaruh kedua bersifat positif terhadap ekspor bila terdapat peningkatan volume mineral yang telah diproses. Pengaruh ketiga, melalui impor barang modal dan bahan setengah jadi untuk membangun dan mengoperasikan fasilitas peleburan, akan memberikan dampak negatif terhadap neraca perdagangan. Dibutuhkan serangkaian asumsi untuk dapat melakukan perkiraan atas pengaruh-pengaruh ini, mulai dari permintaan eksternal masa depan atas mineral mentah dan telah diproses hingga porsi impor dari biaya modal dan operasional peleburan, dan yang terpenting, tentang waktu dan skala investasi yang diperlukan terkait dengan kapasitas peleburan. Dengan demikian, perkiraan apapun yang dilakukan akan memiliki faktor ketidakpastian yang cukup besar.

Terdapat sejumlah besar usulan rencana fasilitas peleburan, namun kemungkinan tidak semua usulan yang telah diumumkan akan dibangun. Selain itu, bagi usulan-usulan yang layak secara ekonomi, masih terus terdapat ketidakpastian apakah fasilitas peleburan yang diusulkan akan dapat mulai beroperasi pada awal tahun 2014, terutama karena panjangnya waktu yang dibutuhkan untuk membangun fasilitas peleburan sebelum operasinya dapat dimulai. Mengingat ketidakpastian ini, dua skenario potensial dapat dipertimbangkan, berkaitan dengan skenario dasar (*baseline*) di mana larangan impor itu tidak diterapkan, untuk mensimulasikan dampak potensial penetapan pelarangan itu terhadap neraca perdagangan Indonesia, yang mencerminkan perbedaan dalam laju mulai diterapkannya usulan kapasitas peleburan baru. Pada skenario pertama, seluruh usulan tambahan peleburan yang dianggap realistis oleh penelitian terbaru dari SEADI (*Support for Economic Analysis Development in Indonesia*) tentang topik ini dibangun sesuai jadwal – fasilitas peleburan akan memulai operasi pada tahun 2014 dan 2015. Pada skenario kedua, tidak ada fasilitas peleburan yang beroperasi pada jadwal waktu yang ditetapkan oleh peraturan dan larangan ekspor diberlakukan.

Pada skenario pertama, dengan fasilitas peleburan yang layak siap beroperasi sesuai antisipasi SEADI, dampak peningkatan ekspor mineral yang telah diproses terhadap neraca perdagangan melebihi penurunan ekspor mineral mentah, setidaknya untuk tahun 2014. Selain itu, impor modal untuk membangun fasilitas peleburan diperkirakan akan memberikan beban yang signifikan terhadap neraca perdagangan. Pada tahun 2014, larangan itu diproyeksikan akan menambah 6 miliar dolar AS terhadap defisit perdagangan. Namun, mulai tahun 2015, larangan itu akan memberi dampak yang relatif netral terhadap neraca perdagangan, relatif terhadap skenario dasar (*baseline*), karena impor modal yang berasal dari pembangunan fasilitas peleburan akan mulai berkurang dan peningkatan dari ekspor bahan terproses dengan nilai yang lebih tinggi mulai mengimbangi penurunan dalam ekspor mineral mentah yang disebabkan oleh larangan tersebut.

Pada skenario kedua, dengan tidak adanya fasilitas peleburan baru yang beroperasi, turunya ekspor mineral mentah sangat membebani neraca perdagangan, tanpa peningkatan apapun dalam ekspor mineral yang terproses. Nilai nominal dari turunya penerimaan ekspor semakin meningkat setiap tahun dari sekitar 5 miliar dolar AS pada tahun 2014 ke sekitar 8 miliar dolar AS pada tahun 2017, yang mencerminkan “hilangnya peningkatan” ekspor mineral mentah selama periode tersebut.

Simulasi tersebut menunjukkan potensi risiko penurunan yang signifikan terhadap neraca perdagangan Indonesia yang berasal dari penerapan larangan tersebut, terutama bila fasilitas peleburan baru di dalam negeri mengalami penundaan yang signifikan, yang mengakibatkan ketidakcukupan kapasitas untuk memproses mineral mentah di dalam negeri, yang akan berdampak terhadap ekspor mineral. Dengan skenario yang relatif lebih optimistis sekalipun (yaitu Skenario 1), dengan semua fasilitas peleburan yang layak secara ekonomi sesuai evaluasi SEADI dapat beroperasi, larangan itu masih akan menyebabkan kejutan negatif yang signifikan terhadap neraca perdagangan Indonesia dengan besaran sekitar 6 miliar dolar AS pada tahun 2014. Kejutan seperti itu akan menambah sekitar 0,6 poin persentase dari PDB terhadap defisit neraca transaksi berjalan Indonesia pada tahun 2014 dan akan menggeser proyeksi defisit neraca transaksi berjalan dari 2,6 persen ke 3,2 persen dari PDB, dengan asumsi hal-hal lain tidak berubah. Hal ini akan mendorong peningkatan kebutuhan pembiayaan eksternal, sementara kondisi pembiayaan dunia sedang tidak mendukung. Selain itu, jika ditinjau dari sudut pandang investor yang melihat pelaksanaan pelarangan itu sebagai sinyal negatif terhadap kualitas lingkungan kebijakan dalam negeri, larangan itu dapat mempengaruhi aliran modal portofolio dan FDI (mengimbangi aliran masuk FDI manapun yang berkaitan dengan proyek-proyek fasilitas peleburan baru manapun). Terkait dengan hal ini, perlu dicatat bahwa simulasi di atas tidak mencakup implikasi jangka yang lebih panjang yang dapat bersifat distorsif dari larangan tersebut terhadap struktur produksi ekonomi, maupun mencakup penilaian yang terperinci tentang tujuan kebijakan ekonomi yang mendasarinya atau kemungkinan efektivitasnya dalam pencapaian tujuan-tujuan tersebut.

*Peraturan Menteri ESDM 7/2012 mengharuskan pemegang KK dan IUP untuk menyusun rencana fasilitas peleburan, menetapkan standar minimum bagi pemurnian dan pengolahan dalam negeri, dan menetapkan pelarangan ekspor bijih mineral mentah dalam waktu tiga bulan sejak peraturan itu ditetapkan (per bulan Mei 2012). Sebagian karena kurangnya kapasitas, pemberlakuan larangan itu kemudian ditunda dengan peraturan Kementerian ESDM 11/2012 hingga bulan Januari 2014. Pada masa jeda dari bulan Mei 2012 hingga Januari 2014, para pemegang KK diperkenankan untuk tetap melanjutkan ekspor mineral mentah tanpa pembatasan tambahan apapun. Para pemegang IUP diperkenankan untuk melanjutkan ekspor mineral mentah dengan membayar pajak ekspor sebesar 20 persen dan dapat memperpanjang izin ekspor bulanan.

Catatan: Daftar usulan fasilitas peleburan baru yang digunakan dalam analisis ini diambil dari laporan “The Economic Effects of Indonesia’s Mineral-Processing Requirements for Export”, USAID, 2013, dibawah proyek SEADI untuk Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

5. Kondisi kredit diperkirakan akan semakin ketat memasuki 2014

Rupiah telah terdepresiasi akhir-akhir ini, mungkin disebabkan oleh kebutuhan pembiayaan eksternal bruto yang signifikan pada triwulan keempat...

...namun kondisi likuiditas pasar valuta telah membaik dibandingkan triwulan ketiga ...

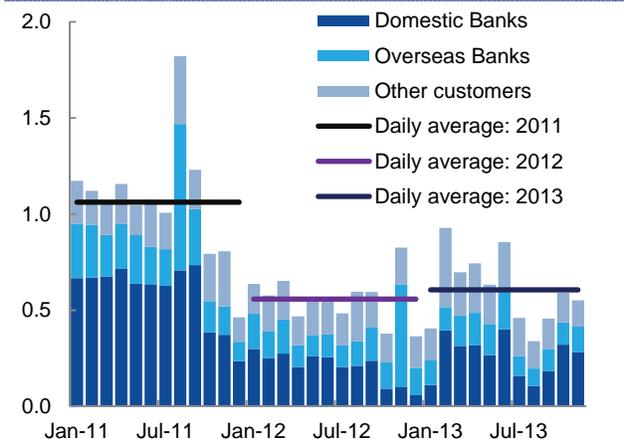
...sementara BI telah mempertahankan fokus dalam memfasilitasi penyesuaian neraca eksternal

Kebutuhan pembiayaan dan jasa hutang luar negeri Indonesia yang cukup besar, yang dengan sendirinya meningkatkan permintaan akan valuta asing, tampaknya merupakan faktor penting di balik perlemahan baru dalam kurs Rupiah sejak bulan Oktober. Setelah menguat menjadi 11.020 rupiah per dolar AS pada akhir bulan Oktober, kurs tukar *spot* Rupiah kemudian melemah menjadi 12.000 rupiah pada tanggal 11 Desember, sehingga sepanjang tahun ini Rupiah telah melemah sebesar 24 persen terhadap dolar AS. Rupiah kini telah mencatat depresiasi hampir 18 persen secara nominal dengan pembobotan perdagangan hingga tanggal 12 Desember 2013, dan sebesar 8 persen secara efektif riil hingga bulan Oktober.

Namun, depresiasi signifikan belakangan ini tidak terjadi secara bersamaan dengan pengetatan yang terlihat pada kondisi pasar valuta hingga bulan November, seperti diukur oleh perputaran rata-rata pada pasar *spot* luar negeri. Hal ini terjadi setelah Bank Indonesia mengambil sejumlah langkah untuk meningkatkan likuiditas pasar luar negeri, dan memfasilitasi penyesuaian dalam kurs tukar Rupiah menuju tingkat ekuilibriumnya. Upaya-upaya itu termasuk pelonggaran persyaratan pembelian dolar AS bagi eksportir, perpanjangan waktu jatuh tempo fasilitas penyimpanan BI dalam dolar AS hingga 12 bulan, dan mengadakan lelang *swap* dolar AS secara teratur untuk memfasilitasi lindung nilai (*hedging*) untuk risiko-risiko valuta. Perputaran harian pasar *spot* valuta asing mencapai nilai rata-rata sebesar 500-600 juta dolar AS hingga akhir bulan November, jauh di atas rata-rata harian sekitar 350 juta dolar AS yang tercatat pada akhir bulan Agustus dan awal September (Gambar 16), sementara selisih (*spread*) antara tingkat *spot* dalam negeri dan *forward* luar negeri tetap ketat.

Sejalan dengan pendekatan fleksibel terhadap Rupiah yang terlihat pada beberapa bulan terakhir, Bank Indonesia telah menyatakan dengan jelas bahwa fokus jangka pendeknya adalah mendukung peningkatan neraca eksternal. Sejak *IEQ* edisi bulan Oktober 2013, BI telah meningkatkan koridor *BI Rate*-nya sebesar 25 basis poin (pada rapat terjadwal Dewan Gubernur BI bulan November), sehingga jumlah peningkatan suku bunga *BI Rate* sejak bulan Juni telah mencapai 175 basis poin. Tingkat cadangan devisa juga telah stabil dan kemudian berangsur-angsur meningkat, menjadi 97,0 miliar dolar AS pada akhir bulan Oktober yang terus bertahan hingga akhir bulan November, naik dari nilai rendahnya sebesar 92,7 miliar dolar AS pada akhir bulan Juli. Sampai bulan September, BI memiliki posisi devisa *short net open forward* sebesar 5 miliar dolar AS, yang umumnya berasal dari lelang *swap* dolar AS yang dilakukan sejak bulan Juli untuk mendukung ketersediaan komersial dari lindung nilai (*hedging*) valuta asing.

Gambar 16: ...namun kondisi likuiditas pasar spotvaluta asing dalam negeri telah membaik sejak pertengahan tahun
(rumah tangga perputaran harian, AS\$ miliar)



Catatan: Rata-rata perputaran pasar *spot* FX menurut rekanan; rata-rata harian 2013 hingga akhir bulan November
Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

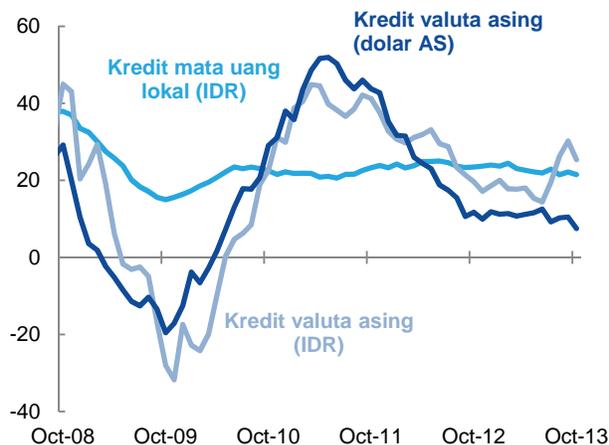
Obligasi dan ekuitas dalam negeri mencatat perlemahan baru pada triwulan keempat

Depresiasi Rupiah, peningkatan suku bunga jangka pendek, dan perlambatan produksi (*output*) semuanya membawa dampak terhadap obligasi dan ekuitas dalam negeri yang — setelah kembali naik dengan kuat dari nilai rendahnya pada akhir bulan Agustus hingga awal bulan September—mencatat perlemahan baru sejak bulan Oktober. Pasar obligasi dalam negeri mencatat pemulihan yang kuat dari pertengahan September hingga akhir Oktober, namun tingkat imbal hasil (*yield*) telah kembali meningkat, mengembalikan suku bunga dalam negeri jangka panjang mendekati nilai puncak yang pernah tercatat pada tahun berjalan (dengan *yield* acuan 10-tahunan pada 8,80 persen, peningkatan sebesar 350 basis poin selama tahun berjalan). Ekuitas dalam negeri awalnya kembali meningkat dengan kuat dari nilai rendahnya pada akhir Agustus, namun harga-harga saham telah kembali melemah, dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia mencatat penurunan sebesar 2,6 persen selama tahun berjalan hingga tanggal 12 Desember. Pada bulan Oktober dan November, investor asing tetap menjadi penjual bersih dari ekuitas-ekuitas Indonesia, dengan jumlah penjualan bersih saham sebesar 6,9 triliun rupiah selama periode itu, meneruskan periode penjualan bersih yang berkelanjutan sejak penurunan dalam kecenderungan risiko (*risk appetite*) global untuk aset-aset pasar berkembang, dengan penjualan kumulatif ekuitas Indonesia sebesar 36 triliun rupiah sejak akhir bulan April. Sebaliknya, investor obligasi asing menjadi pembeli bersih obligasi yang signifikan, dengan pembelian kumulatif sebesar 42,8 triliun rupiah sejak pulihnya aliran masuk modal pada awal bulan September (hingga 6 Desember), membawa tingkat kepemilikan obligasi negara dalam negeri mereka menjadi 32,5 persen.

Pertumbuhan kredit nominal tetap bertahan kuat selama bulan Oktober, didorong oleh pengaruh kurs tukar, namun telah turun secara riil...

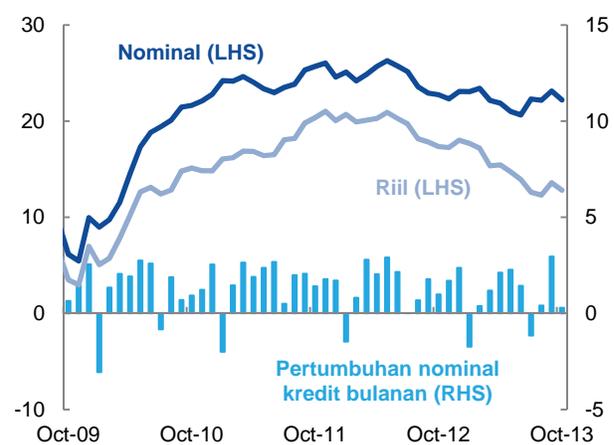
Walau dengan pengetatan dalam kebijakan moneter sejak bulan Juni, pertumbuhan kredit bank tetap tinggi secara nominal, dengan peningkatan sebesar 22,2 persen *yoy* pada bulan Oktober. Namun perlu dicatat bahwa peningkatan kredit telah menerima dorongan dari pengaruh kurs tukar, yang telah meningkatkan nilai Rupiah dari pinjaman dengan denominasi valuta asing, yang merupakan 15 persen dari kredit perbankan yang disalurkan; pertumbuhan *yoy* kredit valas dalam Rupiah telah meningkat dari 15 persen *yoy* pada bulan Mei ke 24 persen *yoy* pada bulan Oktober (Gambar 17). Selain itu, pertumbuhan kredit riil (yang mencatat deflasi berkat inflasi IHK yang sedang berlangsung) terus melambat, menjadi 12,8 persen *yoy* pada bulan Oktober, dari 18 persen *yoy* pada akhir tahun 2012 (Gambar 18).

Gambar 17: Pertumbuhan kredit bank telah terinflasi oleh pengaruh kurs tukar...
(*pertumbuhan yoy, persen*)



Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 18: ...namun telah melambat, terutama secara riil
(*pertumbuhan kredit bank yoy dan bulan-ke-bulan, persen*)



Catatan: Kredit riil dideflasikan dengan IHK; Oktober disimpulkan dari pertumbuhan 22,2 persen *yoy*, seperti dikatakan oleh BI
Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

...dan sementara kredit perumahan meningkat pada triwulan ketiga,

Walau data-data terakhir menyiratkan tingkat pertumbuhan yang kuat, laporan pasar kini mengindikasikan pengetatan dalam kredit yang berkaitan dengan properti oleh sejumlah bank besar, yang sepertinya membebani pertumbuhan harga properti di masa yang akan

laporan pasar menunjukkan kondisi pengetatan kredit yang terkait properti...

datang. Pertumbuhan pada kredit yang berhubungan dengan properti kembali meningkat ke 30 persen *yoY* per bulan September, naik dari 20 persen pada bulan Juni, yang merupakan laju pertumbuhan tercepat sejak penetapan persyaratan uang muka (*loan-to-value*, LTV) yang lebih ketat bagi kredit perumahan pada bulan Juli 2012. Penguatan yang belakangan terjadi pada kredit properti itu mencerminkan peningkatan kredit perumahan, yang merupakan 60 persen dari seluruh kredit yang berkaitan dengan properti. Angka-angka itu juga menunjukkan bahwa upaya-upaya makro-prudensial untuk mengendalikan laju kredit properti hanya memiliki dampak yang terbatas sejauh ini, dengan pengetatan rasio LTV lebih lanjut oleh Bank Indonesia untuk kredit bagi rumah kedua dan ketiga pada bulan Juli 2013. Dengan dukungan kredit properti yang kokoh, harga perumahan terus mencatat peningkatan yang kuat selama triwulan ketiga; harga perumahan nasional meningkat 14 persen selama tahun berjalan hingga bulan September, dipimpin oleh pertumbuhan harga rumah-rumah berukuran lebih kecil. Pertumbuhan harga apartemen telah sedikit melambat sejak akhir tahun 2012, namun masih tetap kuat pada 30 persen *yoY*, demikian juga untuk harga sewa ruang perkantoran dan harga jual tanah-tanah industri.

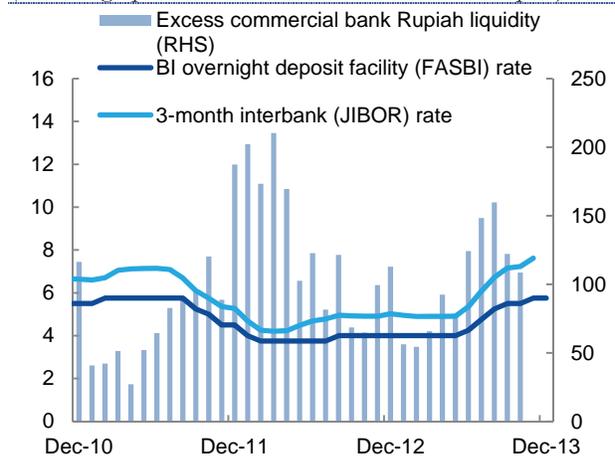
...namun pertumbuhan kredit tampaknya akan melambat di masa depan...

Ke depannya, pertumbuhan kredit bank diperkirakan akan menurun, menjadi sekitar 15 persen *yoY* pada triwulan-triwulan mendatang menurut proyeksi Bank Dunia. Pada bulan Oktober, pertumbuhan uang yang beredar luas (*broad money*, M2) mencapai 13 persen *yoY*, dan pertumbuhan dalam deposito dan tabungan pada khususnya mencapai 11,6 persen *yoY*, jauh di bawah laju pada akhir tahun 2012 yang mendekati 20 persen. Rasio hutang terhadap simpanan (*loan to deposit ratio*, LDR) agregat mencapai 88,9 persen pada bulan September, naik dari 84 persen pada akhir tahun 2012 dan tidak jauh dari batas atas sasaran LDR BI sebesar 92 persen, dan mengindikasikan terbatasnya ruang untuk pertumbuhan kredit akan terus berlanjut, melampaui pertumbuhan simpanan.

...di tengah-tengah pengetatan kondisi likuiditas domestik

Di samping pertumbuhan simpanan yang lebih lemah, bank-bank juga menghadapi kondisi likuiditas yang lebih ketat. Kelebihan likuiditas bank umum yang diukur oleh BI, walau jumlahnya masih besar, telah turun dari nilai puncaknya pada pertengahan tahun, dan siklus pengetatan BI telah meningkatkan suku bunga pinjaman antar-bank, dengan JIBOR 3-bulanan naik dari 4,9 persen sebelum BI memulai siklus pengetatannya pada bulan Juni, menjadi 7,6 persen pada awal Desember (Gambar 19). Laporan pasar juga menunjukkan adanya pengetatan kondisi likuiditas dalam negeri, terutama bagi sejumlah bank-bank berukuran kecil hingga menengah, dengan penurunan batas pinjaman antar-bank akibat keprihatinan akan peningkatan risiko rekanan (*counterparty*), yang berkaitan dengan kurangnya likuiditas antar-bank atau keseluruhan pasar pembiayaan dan sempitnya dasar simpanan. Selain itu, beban pembiayaan luar negeri bank asing telah meningkat, sejalan dengan pengetatan umum dalam kondisi pembiayaan eksternal bagi dunia usaha Indonesia.

Gambar 19: Likuiditas Rupiah telah mengetat dan biaya pinjaman antar-bank telah meningkat
(suku bunga, persen, dan kelebihan likuiditas, triliun Rupiah)



Catatan: Data kelebihan likuiditas tersedia hingga akhir bulan Oktober
Sumber: CEIC

**Indikator agregat
risiko sektor
perbankan tetap sehat**

Peningkatan suku bunga dan daya saing bagi simpanan, seiring dengan semakin ketatnya likuiditas, menyiratkan tekanan naik bagi biaya dana perbankan, yang akan mengakibatkan penyusutan margin bunga bersih, walau jumlahnya akan bergantung kepada struktur pendanaan masing-masing bank dan kemampuan pemberian harga ulang bagi pinjaman mereka. Namun metrik profitabilitas masih tetap kuat sampai akhir bulan Oktober, dan indikator-indikator agregat sektor perbankan lainnya tetaplah stabil, dengan kredit bermasalah (*non-performing loan*) masih di bawah 2 persen, kecukupan modal masih jauh di atas standar minimum, dan metrik profitabilitas dalam posisi kuat. Selain itu, risiko sistemik dari Rupiah yang lebih lemah dan suku bunga jangka panjang yang lebih tinggi tampaknya tetap terkendali; uji daya tahan (*stress test*) Bank Indonesia yang diterbitkan pada *Kajian Stabilitas Keuangan* bulan Maret 2013 menunjukkan bahwa depresiasi Rupiah sebesar 10 persen akan mengakibatkan penurunan dalam rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*, CAR) agregat bank sebesar 1,0 persen. Penurunan nilai obligasi pemerintah sebesar 20 persen akan mengakibatkan penurunan dalam CAR agregat bank sebesar 1,5 persen, dengan penurunan CAR yang lebih besar untuk bank-bank BUMN dan asing, akibat kepemilikan obligasi pemerintah yang lebih besar oleh bank-bank tersebut.

**Kegiatan pembiayaan
non-bank juga
melambat**

Selain kredit bank, akses terhadap bentuk-bentuk pembiayaan lain juga telah mengetat. Pertumbuhan dalam pinjaman perusahaan pembiayaan, yang berjumlah sekitar 10 persen dari seluruh aset sistem finansial, telah melambat menjadi 14 persen *yy* pada September 2013, dari pertumbuhan sebesar 32 persen satu tahun sebelumnya. Ke depan, pinjaman non-bank diperkirakan akan semakin melemah, sejalan dengan kondisi kredit dalam negeri yang semakin ketat dan beban pembiayaan luar negeri yang lebih tinggi (dengan pinjaman dari bank-bank asing yang mencapai 22 persen dari seluruh kewajiban perusahaan pembiayaan, dibanding dengan 35 persen pinjaman bank-bank dalam negeri). Penerbitan obligasi perusahaan juga turun tajam sejak bulan Juni, dengan penerbitan hingga akhir November hanya setara dengan 15 persen dari jumlah penerbitan pada triwulan akhir tahun 2012.¹

6. Pertumbuhan pengeluaran publik dan penerimaan pajak telah melemah selama tahun 2013

**Defisit fiskal hingga
November 2013
berjumlah 50 persen
lebih besar dibanding
periode yang sama
tahun lalu...**

Sektor fiskal Indonesia terus merasakan dampak dari melemahnya harga komoditas internasional dan depresiasi Rupiah. Berdasarkan hasil realisasi sebelas bulan pertama tahun 2013, defisit fiskal selama setahun penuh tampaknya akan relatif sejalan dengan proyeksi ABPN-P 2013, karena penerimaan yang diperkirakan akan berada sedikit di bawah sasaran tampaknya akan diimbangi dengan pencairan pengeluaran yang lebih rendah secara keseluruhan (dengan belanja subsidi yang melampaui sasaran diimbangi dengan belanja modal dan barang yang lebih rendah dari sasaran). Selama periode Januari hingga November 2013, Indonesia mencatat defisit fiskal sebesar 163 triliun rupiah (atau 1,7 persen dari PDB), dibanding 106 triliun rupiah pada periode yang sama tahun lalu. Pengumpulan penerimaan mencatat pertumbuhan yang sedikit lebih tinggi untuk periode ini dibanding pada 2012, sementara pertumbuhan pengeluaran melambat dibanding 2012 namun tingkat pencairannya lebih tinggi (Tabel 5).

**...disebabkan lebih
tingginya tingkat
pencairan belanja...**

Alasan utama dari defisit fiskal yang secara signifikan lebih besar selama sebelas bulan pertama tahun 2013 dibanding periode yang sama tahun lalu adalah peningkatan dalam pencairan belanja. Hal ini terutama terjadi untuk belanja sosial (termasuk selesainya pelaksanaan kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) pasca kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan Juni) dan belanja modal, walau belanja sosial dan modal mencatat pertumbuhan nominal yang lebih lambat secara keseluruhan untuk periode tersebut pada tahun 2013 dibanding pada 2012. Laju pelaksanaan APBN pada bidang-bidang itu tampaknya dibantu oleh kenyataan bahwa alokasinya pada APBN-P 2013 memproyeksikan pertumbuhan nominal yang relatif sedikit dibanding APBN-P 2012. Belanja subsidi BBM selama Januari-November mencatat laju pencairan yang lebih rendah relatif terhadap alokasi APBN-P tahun 2013 dibanding tahun lalu, yang mencapai 87 persen

¹ Data penerbitan obligasi perusahaan dalam negeri hingga 27 November 2013.

dari sasaran belanja untuk tahun ini. Belanja aktuil subsidi BBM tahun 2013 kemungkinan akan kembali melampaui alokasinya pada APBN-P (dengan pencairan subsidi BBM bulan November masih harus ditambahkan kepada angka-angka di atas, selain juga angka bulan Desember). Subsidi listrik telah mencatat pertumbuhan nominal *yoy* yang sedikit lebih cepat pada tahun 2013 dibanding tahun lalu, walau dengan peningkatan tarif listrik secara bertahap yang dilakukan pada tahun 2013, dan pencairan yang sedikit lebih tinggi dibanding APBN-P. Namun, hal ini mungkin lebih mencerminkan perbedaan dalam jadwal pembayaran dan bukan peningkatan belanja tahunan riil.

...sementara penerimaan dibanding sasaran APBN berada pada tingkat yang sama dengan tahun lalu

Tren realisasi penerimaan pada sebelas bulan pertama tahun 2013 umumnya serupa dengan periode yang sama tahun 2012 terhadap target di APBN-P, walau pertumbuhan nominal *yoy* sedikit lebih tinggi. Hal ini diakibatkan oleh, pada satu sisi, moderasi dalam pertumbuhan pungutan pajak, sebesar 9 persen *yoy* dari 13,9 persen *yoy* pada tahun 2012, dan peningkatan tipis dalam penerimaan bukan pajak di sisi yang lain. Pajak perdagangan internasional berkontraksi dibanding tahun yang lalu, terutama akibat penurunan dalam pungutan pajak ekspor, yang sejalan dengan melemahnya ekspor, seperti dibahas pada Bagian 4. Pungutan pajak pendapatan dari sektor migas telah melambat, sementara penerimaan sumber daya alam dari migas meningkat. Pola ini tampaknya berkaitan dengan perbedaan waktu dalam pungutan dari kedua jenis penerimaan tersebut. Walau dengan konsumsi swasta yang relatif kuat, pungutan PPN pada sebelas bulan pertama tahun 2013 mencatat pertumbuhan nominal *yoy* yang lebih lambat dibanding tahun lalu (masing-masing sebesar 13,6 persen dibanding 28,5 persen), dan juga realisasi yang lebih rendah dibanding sasaran tahunan. Karena sekitar 40 persen dari pungutan PPN Indonesia berasal dari impor, perlambatan impor tampaknya berkontribusi secara signifikan terhadap perlemahan ini.

Tabel 5: Pencairan APBN yang lebih tinggi menjadi karakteristik periode Jan-Nov 2013, dibanding tahun-tahun yang lalu

	Nilai nominal (Jan - Nov) (Rp triliun)			Proporsi (Jan - Nov) terhadap APBN-P (Persen)			Pertumbuhan nominal (<i>yoy</i>) (Persen)		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
A. Penerimaan	1.023	1.102	1.224	87,4	81,1	81,5	22,8	7,7	11,1
1. Penerimaan pajak	753	858	936	85,7	84,5	81,5	22,2	13,9	9,0
PPh (migas)	65	74	72	99,5	108,5	96,5	39,8	13,5	-2,7
PPh (non-migas)	317	340	368	86,3	76,2	79,2	19,9	7,4	8,2
Pajak penjualan (PPN)	226	291	330	75,8	86,5	77,9	18,6	28,5	13,6
Pajak dagang int'l	50	46	42	105,6	95,1	86,3	107,6	-8,0	-8,3
2. Pen. bukan pajak	267	240	286	93,3	70,5	81,8	23,9	-10,1	18,8
Migas	154	122	156	89,2	61,6	86,6	33,6	-20,9	28,1
Non-migas	18	19	22	97,7	100,6	94,6	18,0	3,2	15,3
B. Pengeluaran	1.001	1.209	1.387	75,8	78,1	80,3	22,5	20,8	14,7
1. Pemerintah pusat	648	779	910	71,3	72,8	76,0	23,2	20,2	16,8
Pegawai	159	182	204	86,9	85,8	87,8	19,7	14,6	12,2
Barang	85	101	118	59,5	62,1	58,0	17,9	18,4	16,9
Modal	67	91	107	47,2	51,6	57,0	39,7	36,6	18,1
Pembayaran bunga	84	91	104	79,1	77,2	92,6	7,2	7,9	14,6
Subsidi	201	250	298	84,7	101,9	85,7	55,7	24,3	19,4
Energi	175	218	260	89,4	107,8	86,6	62,9	24,9	19,1
BBM	111	148	174	85,4	107,7	87,1	86,8	33,5	17,6
Listrik	64	70	86	97,3	107,9	85,8	33,3	9,9	22,3
Non-energi	26	32	38	62,6	74,0	79,7	20,4	20,4	21,7
Sosial	47	61	77	57,8	70,3	95,0	-13,7	27,9	26,6
2. Transfer ke daerah	353	430	477	85,7	89,9	90,1	21,2	21,8	10,8

Sumber: Kementerian Keuangan; Perhitungan staf Bank Dunia

**Sasaran pembiayaan
sekuritas bruto untuk
tahun 2013 akan
tercapai**

Kebutuhan pembiayaan bruto melalui sekuritas sebesar 326,9 triliun rupiah seperti tercantum dalam APBN-P tahun 2013 pada dasarnya telah terpenuhi, dengan nilai sekuritas hutang bernilai 323,0 triliun rupiah yang telah diterbitkan per tanggal 3 Desember. Penerbitan telah pulih kembali dari masa-masa sulitnya dari bulan Mei ke Agustus, yang hanya mencatat jumlah penerbitan terbatas dari hutang-hutang dengan tenor lebih panjang, yang meningkatkan kebergantungan Pemerintah kepada surat hutang negara dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang. Per tanggal 3 Desember, sejumlah 42,4 triliun rupiah surat hutang negara telah diterbitkan selama tahun 2013, dibanding jumlah penerbitan surat hutang negara sebesar 30,5 triliun rupiah pada tahun 2012. Namun, profil risiko hutang Pemerintah pada akhir tahun 2013, seperti diproyeksikan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU), Kementerian Keuangan RI, tetap kuat secara keseluruhan, dengan rata-rata waktu jatuh tempo hutang pemerintah hanya turun tipis, ke 9,6 tahun (dari 9,7 tahun pada 2012). Selain itu, hanya 15,7 persen dari jumlah hutang merupakan suku bunga variabel, walau paparan valuta tetap signifikan dengan 44,6 persen dari jumlah hutang diproyeksikan oleh DJPU dalam denominasi valuta asing pada akhir tahun 2013.

Tabel 6: Bank Dunia memproyeksikan defisit fiskal 2,1 persen dari PDB untuk 2014, turun dari 2,5 persen untuk 2013
(Rp triliun, kecuali dinyatakan lain)

	2012	2013		2014	
	Aktuil teraudit	APBN-P	Bank Dunia	APBN	Bank Dunia
A. Penerimaan	1.338	1.502	1.462	1.667	1.603
1. Penerimaan pajak	981	1.148	1.115	1.280	1.246
2. Penerimaan bukan pajak	352	349	342	385	353
B. Pengeluaran	1.491	1.726	1.686	1.842	1.819
1. Pemerintah pusat, terdiri dari	1.011	1.197	1.159	1.250	1.234
Pegawai	198	233	230	263	261
Barang	141	203	174	216	184
Modal	145	188	169	184	185
Subsidi, terdiri dari	346	348	369	334	391
Subsidi BBM	212	200	221	211	239
Subsidi listrik	95	100	100	71	100
2. Transfer ke daerah	481	529	527	593	585
C. Neraca primer	-53	-112	-109	-54	-88
D. Surplus/defisit	-153	-224	-225	-175	-216
sebagai persen dari PDB	-1,9	-2,4	-2,5	-1,7	-2,1
E. Pembiayaan bersih	175	224	n.a.	175	n.a.
1. Pembiayaan dalam negeri	199	241	n.a.	196	n.a.
2. Pembiayaan luar negeri	-23	-17	n.a.	-21	n.a.
<i>Asumsi ekonomi utama</i>					
Pertumbuhan ekonomi (persen)	6,2	6,3	5,6	6,0	5,3
IHK (yoy, persen)	4,3	7,2	7,4	5,5	6,8
Kurs tukar (Rp/ AS\$)	9.384	9.600	10.563	10.500	11.800
Harga minyak (AS\$/barel)	113	108	104	105	103
Produksi minyak (ribu barel/hari)	861	840	840	870	870

Sumber: Kementerian Keuangan; Perhitungan staf Bank Dunia

**Bank Dunia
memproyeksikan
defisit anggaran pada
tahun 2013 akan
mencapai 2,5 persen
dari PDB dan 2,1
persen dari PDB untuk
tahun 2014**

Dengan mempertimbangkan realisasi pada sebelas bulan pertama tahun 2013, lebih lemahnya harga komoditas dan depresiasi Rupiah, namun juga peningkatan tipis dalam pertumbuhan PDB nominal pada triwulan keempat berkat lebih tingginya pertumbuhan harga, Bank Dunia telah meninjau ulang proyeksi fiskalnya untuk tahun 2013 dan 2014. Proyeksi defisit fiskal untuk tahun 2013 tetap tidak berubah dari *IEQ* edisi bulan Oktober, pada 2,5 persen dari PDB. Untuk tahun 2014, dengan memperhitungkan pengumuman akan perubahan kebijakan dan juga perubahan asumsi-asumsi ekonomi makro, Bank Dunia sedikit menurunkan proyeksinya untuk defisit fiskal tahun 2014 dari 2,3 persen dari PDB pada *IEQ*

edisi Oktober 2013 menjadi 2,1 persen dari PDB. Bagian B.1 memberikan tinjauan terperinci tentang APBN 2014 yang telah disetujui, dan rincian lebih lanjut tentang asumsi-asumsi Bank Dunia untuk sektor fiskal tahun 2014.

7. Melihat risiko yang ada, dibutuhkan kemajuan lebih lanjut dalam reformasi yang mendukung pertumbuhan

Risiko ekonomi terhadap prospek tahun 2014 cukup signifikan...

Sementara perkiraan dasar (*baseline*) bagi ekonomi Indonesia adalah berlanjutnya penurunan walau tipis, dengan pertumbuhan triwulanan tetap berada di atas 5,0 persen *yoY* hingga akhir tahun 2014, dan semakin menyempitnya defisit neraca transaksi berjalan pada triwulan-triwulan yang akan datang, proyeksi-proyeksi ini mengandung ketidakpastian yang signifikan. Penurunan kondisi pembiayaan eksternal lebih lanjut yang tiba-tiba merupakan risiko khusus yang terus membayangi, sejalan dengan kebutuhan pembiayaan eksternal Indonesia yang besar. Penurunan itu dapat dipicu oleh perkembangan pasar internasional, atau lebih khusus lagi disebabkan oleh perkembangan kebijakan dan ekonomi dalam negeri. Hal ini dapat turut membawa pengaruh negatif terhadap kegiatan ekonomi riil dengan memberikan tekanan naik tambahan terhadap suku bunga, tekanan turun kepada harga-harga aset dan Rupiah, dan dapat menyebabkan tekanan-tekanan tertentu pada sektor dunia usaha yang akan berpengaruh buruk terhadap tingkat kepercayaan sektor swasta.

...terutama bagi prospek investasi, namun konsumsi swasta juga dapat melemah melebihi perkiraan...

Proyeksi PDB Indonesia sangat peka terhadap prospek investasi, yang sangat bergantung pada jalur kurs tukar dan suku bunga riil (seperti diuraikan pada *IEQ* edisi bulan Oktober 2013). Selain itu, terdapat risiko bahwa pertumbuhan konsumsi swasta dapat melambat lebih dari yang diantisipasi pada skenario dasar (*base case*), misalnya, jika tingginya harga dan suku bunga semakin memuncak—terutama bila dibarengi oleh semakin bergejolaknya harga aset-aset—dengan mengikis keyakinan, pendapatan rumah tangga, dan profitabilitas dunia usaha. Hal itu akan menjadi penghambat yang nyata bagi pertumbuhan, karena persentase konsumsi swasta mencapai sekitar 55 persen dari jumlah pengeluaran.

...dan terdapat risiko yang nyata dari pertumbuhan PDB tahun 2014 turun di bawah 5 persen

Dengan demikian, keseluruhan risiko condong pada perlemahan permintaan domestik daripada skenario dasar (*base case*). Bahkan pertumbuhan permintaan yang hanya sedikit lebih lemah saja dari yang diantisipasi (seperti penurunan investasi dan konsumsi swasta sebesar 0,5 poin persentase) dapat menurunkan pertumbuhan PDB menjadi di bawah 5 persen. Moderasi yang lebih besar dalam permintaan dalam negeri (dengan konsumsi swasta dan pertumbuhan investasi turun sebesar 1 poin persentase dibanding skenario dasar (*baseline*)), misalnya karena peningkatan keterbatasan pembiayaan eksternal, dapat menyebabkan pertumbuhan PDB pada tahun 2014 menjadi di bawah 4,5 persen (Tabel 7).

Tabel 7: Pertumbuhan konsumsi dan investasi yang sedikit lebih lemah dari perkiraan dapat menyebabkan pertumbuhan PDB tahun 2014 menjadi di bawah 5 persen
(*pertumbuhan riil, persen, kecuali dinyatakan lain*)

	Konsumsi swasta	Investasi	PDB keseluruhan	Pertumbuhan PDB dibanding <i>baseline</i> (ppt)
Baseline 2014	4,9	4,4	5,3	n.a.
Permintaan domestik sedikit melemah*	4,4	3,9	4,7	-0,6
Permintaan domestik melemah signifikan**	3,9	3,4	4,3	-0,9
Historis 2009 (mencerminkan dampak GFC)	4,9	3,3	4,6	-0,7

Catatan: Skenario mengasumsikan konsumsi dan investasi swasta masing-masing *0,5 ppt dan **1,0 ppt lebih rendah dari *baseline*; GFC: krisis keuangan dunia (*global financial crisis*)

Sumber: Proyeksi staf Bank Dunia

Sejauh ini penyesuaian ekonomi makro membawa dampak umum yang positif bagi stabilitas, namun mengandung biaya...

Penyesuaian kurs tukar dan kebijakan moneter yang dilaksanakan pada tahun 2013 membawa pengaruh yang secara umum positif bagi stabilitas ekonomi makro, dengan depresiasi Rupiah bertindak sebagai “peredam kejutan” bagi perlemahan perdagangan dengan mendorong penerimaan ekspor dan mengurangi permintaan impor. Lebih tingginya suku bunga telah membantu mengurangi permintaan dalam negeri, dan permintaan impor, serta bersifat mendukung aliran masuk investasi portofolio. Namun, penyesuaian-

penyesuaian itu memakan biaya, termasuk dengan adanya tekanan terhadap neraca pemerintah dan swasta melalui peningkatan nilai Rupiah dari hutang luar negeri (terutama jika terdapat selisih valuta) dan mengikis penerimaan karena lebih tingginya biaya jasa hutang dan impor, serta membawa risiko dan ketidakpastian yang lebih sulit dihitung, seperti dampak terhadap sentimen.

...dan penekanan impor secara khusus bukanlah obat yang mujarab...

Pertumbuhan impor telah melambat dan dalam skenario dasar (*base case*) tampaknya akan terus berlanjut, walau bertahap, mendukung penurunan dalam defisit neraca transaksi berjalan Indonesia dan kebutuhan akan pembiayaan eksternal. Namun, seperti disinggung di atas, penyusutan impor akan berarti lebih terbatasnya barang-barang modal, serta bahan mentah dan bahan-bahan setengah jadi bagi produk barang manufaktur, sehingga akan menjadi beban langsung terhadap pertumbuhan produksi (*output*) saat ini dan masa depan. Karenanya tantangan kebijakan yang sesungguhnya bagi Indonesia bukanlah menekan impor melalui peraturan perundangan, namun meningkatkan ekspor, dan mendapatkan pembiayaan eksternal yang lebih banyak dan berkualitas lebih tinggi, terutama FDI.

...menggarisbawahi kebutuhan akan lebih banyak reformasi kebijakan untuk mendukung ekspor dan aliran masuk FDI...

Memasuki tahun 2014 dan selanjutnya, fokus yang baru dan memang dibutuhkan untuk stabilitas ekonomi makro jangka pendek, harus terus dilengkapi dengan lebih banyak langkah untuk mendukung siklus baik investasi yang kuat, termasuk investasi asing, dan pertumbuhan produksi (*output*). Untuk mewujudkan hal ini, dibutuhkan suatu penekanan dalam mendukung ekspor demi memastikan bahwa peningkatan daya saing internasional yang berasal dari perlemahan Rupiah tidaklah hilang, juga peningkatan efisiensi investasi, serta mendukung, dan meningkatkan, aliran masuk FDI. Sementara FDI, secara nominal, sejauh ini masih terbukti tetap kokoh, namun FDI didukung oleh tiga faktor yang semuanya terpengaruh dengan taraf yang berbeda-beda di bawah tekanan yang belakangan terjadi: sumber daya alam Indonesia yang besar (tertekan dengan harga komoditas dunia yang relatif lemah), pasar dalam negeri yang besar dan bertumbuh (sedikit tertekan, setidaknya untuk jangka pendek, dengan kendala yang menghadang permintaan dalam negeri) dan potensi Indonesia sebagai pusat produksi wilayah Asia (tertekan oleh ketidakpastian peraturan perundangan dan kesenjangan keterampilan dan infrastruktur). Kotak 2 menilik kemajuan terakhir yang tidak merata dalam perbaikan iklim investasi Indonesia. Lebih banyaknya kemajuan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini akan dapat memberikan hasil, tidak hanya dalam bentuk pertumbuhan berkelanjutan yang lebih tinggi untuk jangka menengah, namun juga dalam pengelolaan risiko jangka pendek, dengan mendukung keyakinan investor dalam dan luar negeri kepada jalur lintasan perkembangan Indonesia di masa depan dan aliran masuk modal pembiayaan eksternal yang terkait dengannya.

...dan terus menekankan peningkatan kualitas belanja, termasuk melalui reformasi subsidi energi

Pada sektor fiskal, subsidi BBM tetap menjadi sumber risiko fiskal, melemahkan kemampuan kurs tukar yang fleksibel dalam menyerap kejutan (dengan dampak yang signifikan dari depresiasi terhadap peningkatan beban subsidi BBM) dan mengalihkan belanja dari beragam pemanfaatan yang lebih efisien, termasuk investasi publik yang dibutuhkan dalam bidang infrastruktur, perlindungan sosial, dan program kesehatan. Seperti disebutkan pada *IEQ* edisi bulan Oktober, Bank Dunia memperkirakan bahwa depresiasi Rupiah sebesar 10 persen akan meningkatkan defisit fiskal sebesar 0,3-0,4 poin persentase dari PDB, sebagian besar melalui peningkatan beban subsidi BBM. Hal ini menekankan pentingnya reformasi lanjutan, seperti implementasi pendekatan berdasarkan aturan untuk menentukan harga BBM bersubsidi sedemikian rupa agar membatasi eksposur fiskal Pemerintah terhadap peningkatan harga BBM berdenominasi Rupiah, sementara pada saat yang bersamaan meningkatkan jaring pengaman bagi mereka yang lebih tidak mampu untuk menghadapi kejutan, termasuk yang berkaitan dengan harga-harga yang berhubungan dengan BBM.

Kotak 2: Perkembangan terbaru tentang kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia

Pada saat laporan ini disusun, penerapan komponen-komponen paket kebijakan ekonomi bulan Agustus yang dirancang untuk mempercepat investasi telah kembali ditunda. Tiga dari empat tindakan yang dijanjikan masih belum dilaksanakan: (1) mempercepat dan menyederhanakan perizinan investasi; (2) mempercepat revisi daftar negatif investasi (DNI) untuk lebih membuka ekonomi Indonesia bagi investasi asing; dan (3) mempercepat program-program investasi berbasis pertanian (minyak sawit mentah, kakao, rotan) dan logam mineral (bauxit, nikel, dan tembaga) dengan memberikan pembebasan pajak dan keringanan pajak sebagai insentif. Sebagai contoh, penurunan jumlah perizinan pada sektor migas dari enam puluh sembilan ke delapan izin belum dilaksanakan, dan terdapat keprihatinan bahwa perubahan itu hanya akan terbatas kepada pengelompokan izin-izin itu tanpa ada penyederhanaan prosedur sesungguhnya maupun penyingkatan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh izin-izin itu. Revisi peraturan pelaksanaan untuk insentif pajak, dan mekanisme pelaksanaannya, masih belum selesai.

Pemerintah terus memberikan pesan-pesan yang saling berlawanan tentang kemajuan revisi DNI. Pada awal bulan November, Pemerintah mengumumkan bahwa revisi DNI sudah hampir selesai dan menyatakan kembali komitmennya untuk membuka lebih banyak sektor bagi investasi asing dengan membuka Kemitraan Publik-Swasta (KPS) dalam infrastruktur dan melonggarkan partisipasi asing pada sejumlah sektor (seperti apotek, rumah sakit khusus, dan transportasi). Pengumuman ini menuai banyak kritik dari berbagai pihak melalui media*, yang menyatakan bahwa Pemerintah telah gagal melindungi kepentingan nasional. Kalangan usaha dalam negeri juga telah menyatakan dukungan mereka terhadap perlindungan sejumlah sektor dari persaingan dengan pihak asing. Pemerintah kemudian mencoba memperlunak pengumuman itu dengan menyatakan bahwa pembahasannya masih jauh dari selesai dan menegaskan kembali komitmennya untuk melindungi kepentingan nasional. Pembahasan tentang bagaimana kepentingan itu dapat diseimbangkan dalam revisi DNI masih terus berlanjut.

Upaya yang berkepanjangan untuk memperbaharui DNI menunjukkan debat yang lebih luas di Indonesia akan relatif pentingnya keterbukaan terhadap perdagangan dan investasi internasional untuk mendukung prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia. Walau Pemerintah telah mengumumkan bahwa pembaharuan DNI adalah prioritas kebijakan, namun berdasarkan kemajuan terakhir, tidaklah jelas apakah revisi DNI yang akan datang benar-benar membuatnya menjadi ramah terhadap investor dan dengan demikian meningkatkan iklim investasi, seperti dimaksud pada paket kebijakan bulan Agustus. Dengan semakin dekatnya pemilu tahun 2014, masih perlu dilihat seberapa besar pengaruh sentimen nasionalis dan proteksionis terhadap penyusunan kebijakan ekonomi pada bulan-bulan mendatang.

Ke depannya, penguatan kualitas proses penyusunan kebijakan, misalnya melalui peningkatan mekanisme koordinasi dan proses musyawarah serta peningkatan proses reformasi peraturan perundangan (melalui pendekatan dan tinjauan peraturan “keseluruhan pemerintahan”) merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa ketidakpastian kebijakan dapat diminimalkan, untuk mendukung aliran masuk FDI yang akan membantu menjawab kebutuhan pembiayaan eksternal Indonesia, dan untuk memastikan bahwa Indonesia akan memperoleh manfaat sepenuhnya dari FDI. Proses penyusunan kebijakan yang lebih kuat juga akan dapat menjawab keprihatinan penduduk Indonesia yang sah secara lebih baik, yaitu bahwa kebijakan dibuat demi kepentingan masyarakat yang lebih luas, sementara memungkinkan Pemerintah untuk menimbang kepentingan masyarakat luas secara lebih efektif terhadap kepentingan dunia usaha yang lebih sempit dan permintaan akan proteksi yang tidak membawa manfaat kepada keseluruhan ekonomi.

Sebagai catatan positif, pada tanggal 25 Oktober, Pemerintah meluncurkan suatu paket kebijakan yang ambisius untuk meningkatkan kemudahan melakukan usaha. Rencana aksi yang diumumkan terdiri dari tujuh belas tindakan bagi delapan bidang “Melakukan Usaha: (d disesuaikan kepada delapan dari sepuluh indikator pada peringkat negara “*Doing Business*” dari Bank Dunia) dan diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan Februari 2014. Untuk memastikan implementasi dari paket kebijakan ini, dan sebagai tanda koordinasi yang baik dalam proses reformasi tersebut, Pemerintah telah membentuk suatu tim pengawas bersama dengan sejumlah badan pemerintahan yang berbeda, termasuk Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Sektor swasta telah menyambut baik pengumuman paket kebijakan itu (yang memfokuskan ke dalam negeri), suatu hal yang semakin menunjukkan bahwa reformasi sangatlah mendesak dibutuhkan. Indonesia kini berada pada peringkat 120 (dari 189 ekonomi) dalam peringkat *Doing Business* 2014 dari Kelompok Bank Dunia, suatu kemajuan kecil selama beberapa tahun terakhir. Namun prestasi ini masih berada di bawah kinerja rata-rata regional (Asia Timur dan Pasifik) dan negara-negara pembanding: Filipina, Cina, Thailand, dan Malaysia masing-masing berada pada peringkat 108, 96, 18, dan 6. Kinerja keseluruhan Indonesia hanya sedikit lebih baik dari India dan Kamboja.

Catatan: *Lihat, sebagai contoh, Kompas, 7 November 2013 *Asing Makin Mendominasi Indonesia* dan Bisnis Indonesia, 7 November 2013 *Daftar Negatif Investasi Dihapus, Asing makin Leluasa*.

B. Beberapa perkembangan terkini perekonomian Indonesia



1. Tinjauan lebih dekat terhadap APBN 2014

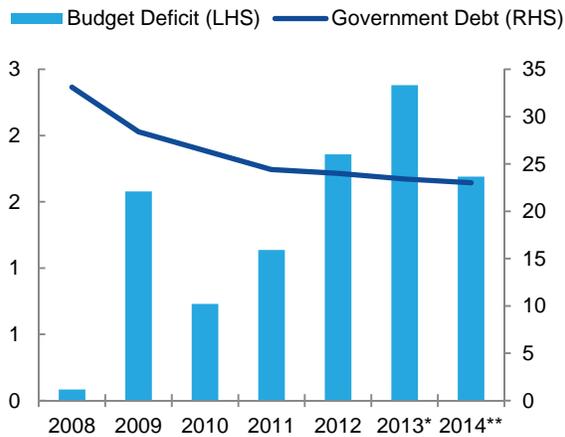
APBN 2014 yang telah disetujui oleh DPR memproyeksikan defisit sebesar 1,7 persen dari PDB, tetapi terdapat risiko yang signifikan terhadap proyeksi penerimaan dan pengeluaran

Pada tanggal 25 Oktober 2013, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia menyetujui APBN Pemerintah untuk tahun 2014. APBN yang disetujui tersebut tidak bersifat ekspansif dan tidak pula menyertakan reformasi besar apapun dalam penerimaan maupun pengeluaran, kecuali kemungkinan penyesuaian tarif listrik. APBN 2014 memproyeksikan defisit fiskal sebesar 1,7 persen dari PDB secara keseluruhan (Tabel 8). Jumlah penerimaan diperkirakan akan mencapai 1.667,1 triliun rupiah, meningkat sebesar 11,0 persen dari proyeksi penerimaan tahun 2013—sedikit diturunkan dari usulan awal Pemerintah sebesar 1.662,5 triliun rupiah pada RAPBN—sementara jumlah pengeluaran ditargetkan sebesar 1.842,5 triliun rupiah, meningkat sebesar 6,7 persen dari proyeksi tahun 2013 dan kenaikan kecil sebesar 1,8 persen dari RAPBN 2014. Namun terdapat risiko penurunan yang signifikan terhadap prospek penerimaan dan pengeluaran akibat asumsi ekonomi makro yang optimis dan kebutuhan pembiayaan fiskal yang meningkat. Asumsi ekonomi makro dan harga Bank Dunia untuk tahun 2014 berbeda dengan APBN yang telah disetujui tersebut (Tabel 9), dengan hasil proyeksi defisit Bank Dunia yang sedikit lebih besar pada 2,1 persen dari PDB. Bagian ini melihat secara lebih rinci tentang prospek APBN tahun 2014.

Proyeksi defisit anggaran yang lebih kecil dibanding 2013, membantu menjaga posisi fiskal yang berhati-hati secara keseluruhan tetapi kebutuhan pembiayaan fiskal bruto tetap besar, yaitu sekitar 3,8 persen dari PDB

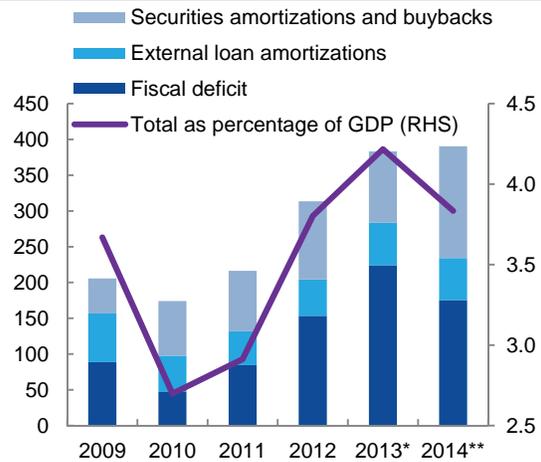
APBN 2014 mengantisipasi penurunan tipis dalam rasio utang terhadap PDB Pemerintah, menjadi 23 persen dari PDB (Gambar 20), yang mencerminkan sasaran defisit APBN yang tidak besar bersama-sama dengan asumsi pertumbuhan PDB sebesar 6,0 persen untuk tahun 2014 dan tingkat inflasi sebesar 5,5 persen. Faktor-faktor ini sebagian diimbangi dengan dampak proyeksi depresiasi kurs Rupiah terhadap utang luar negeri Pemerintah dalam rupiah. Pencairan dan pembelian kembali obligasi diproyeksikan akan meningkat menjadi 156 triliun rupiah pada tahun 2014, naik dari 100 triliun rupiah pada APBN-P tahun 2013. Karenanya, kebutuhan pembiayaan bruto dalam nominal diperkirakan akan meningkat pada tahun 2014 secara nominal (Gambar 21), menurun sedikit terhadap PDB ke 3,8 persen. Kebutuhan pembiayaan sekuritas bruto diproyeksikan menjadi 362 triliun rupiah (3,5 persen dari PDB), naik dari 330 triliun rupiah pada tahun 2013, di mana 80,7 persen dari nilai itu diperkirakan akan dipenuhi melalui penerbitan sekuritas dalam negeri.

Gambar 20: APBN 2014 menargetkan defisit yang lebih kecil dari tahun 2013 dan penurunan lebih lanjut rasio hutang-PDB ...
(persen dari PDB)



Catatan: *APBN-P, **APBN
Sumber: Kementerian Keuangan

Gambar 21: ...namun kebutuhan pembiayaan hutang bruto akan sama dengan tingkatan 2013 yang tinggi
(kebutuhan pembiayaan, Rp triliun dan persentase dari PDB)



Catatan: Berdasarkan target sementara untuk 2014; *APBN-P, **APBN
Sumber: BI; Kementerian Keuangan

Peningkatan sisi penerimaan yang paling signifikan adalah kenaikan proyeksi penerimaan pajak penjualan/PPN

Pada sisi penerimaan, proyeksi peningkatan penerimaan sebesar 11,0 persen berasal dari sasaran penerimaan pajak (naik 11,5 persen dari proyeksi untuk tahun 2013), dan penerimaan bukan pajak (naik 10,4 persen dari 2013, yang merupakan revisi kenaikan yang signifikan dibanding kenaikan 1 persen dari proyeksi RAPBN bulan Agustus). Rasio pajak terhadap PDB diperkirakan sedikit meningkat ke 12,3 persen. Satu-satunya peningkatan yang paling signifikan adalah pada pajak penjualan/ PPN, dengan peningkatan sebesar 16,3 persen dari APBN-P tahun 2013 (walau ini di bawah tingkat RAPBN bulan Agustus dengan kenaikan sebesar 22,5 persen). Sementara belanja yang terkait dengan pemilu pada tahun 2014 dapat mendorong peningkatan pajak penjualan dengan meningkatkan belanja konsumsi, bukti-bukti dari dua pemilu nasional yang lalu tentang kemungkinan besarnya pengaruh pemilu tidaklah jelas karena perbedaan kondisi ekonomi. Sebagai tambahan, proyeksi lebih rendahnya pajak penjualan/PPN pada tahun 2013 (realisasi hingga November 2013 mencapai 77,9 persen dari sasaran APBN-P 2013) berkontribusi kehati-hatian Bank Dunia terhadap proyeksi penerimaan APBN 2014.

Pemerintah berencana untuk kembali meningkatkan tarif listrik pada tahun 2014...

Pada sisi pengeluaran, ciri utama pada APBN 2014 adalah penurunan subsidi listrik sebesar 28,6 persen dibanding tahun 2013 (71,4 triliun rupiah pada tahun 2014 dari 100,0 triliun rupiah pada tahun 2013). Pada tanggal 1 Oktober, PLN melakukan kenaikan tarif listrik tahap akhir untuk tahun ini. Tarif listrik telah ditingkatkan sebesar 4,3 persen setiap triwulan selama tahun 2013, dengan jumlah kumulatif sekitar 15 persen kenaikan tahunan dibanding tahun 2012. Penyesuaian harga itu tidak dikenakan bagi rumah tangga dengan konsumsi daya yang rendah untuk golongan 450 hingga 900 VA. Namun, Pemerintah juga telah menyalahkan 10,4 triliun rupiah dana cadangan untuk subsidi listrik tahun 2014. DPR telah menyetujui peningkatan tarif listrik untuk pengguna industri dan komersial tertentu hingga tingkat pemulihan biaya, namun rincian implementasinya masih dalam pembahasan. Pemerintah juga merencanakan untuk menghapus subsidi listrik bagi pelanggan industri besar, namun waktunya masih didiskusikan.

... namun belanja subsidi energi secara keseluruhan tetap signifikan terhadap jumlah pengeluaran

Jumlah pengeluaran diproyeksikan akan sedikit menurun sebagai persentase dari PDB, dari 18,3 pada 2013 ke 17,8 persen pada 2014 (Gambar 21). APBN 2014 menyertakan penurunan total belanja subsidi sebesar 4,1 persen dibanding APBN 2013 (333,7 triliun rupiah pada 2014 dibanding 348,1 triliun rupiah pada 2013). Penurunan ini diakibatkan penurunan sebesar 28,6 persen dalam subsidi listrik yang dibahas di atas, sebagian diimbangi dengan peningkatan subsidi bukan energi sebesar 6,8 persen, termasuk pupuk, raskin dan bibit (dari 48,3 triliun rupiah pada 2013 ke 51,6 triliun rupiah pada 2014). Anggaran pengeluaran untuk subsidi BBM pada tahun 2014 adalah sebesar 210,7 triliun rupiah, yang merupakan peningkatan sebesar 10,8 triliun rupiah dari proyeksi tahun 2013, mencerminkan proyeksi harga pasar BBM yang lebih tinggi dalam Rupiah, mengimbangi dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan Juni. Dengan demikian, belanja subsidi masih menjadi bagian yang signifikan dari jumlah pengeluaran secara keseluruhan (Gambar 22), sebesar 15 persen dari pengeluaran Pemerintah dalam APBN 2014 (dibanding 17,0 persen yang diproyeksikan untuk tahun 2013) atau 22,6 persen dari belanja Pemerintah pusat.

Belanja pegawai diproyeksi meningkat secara signifikan

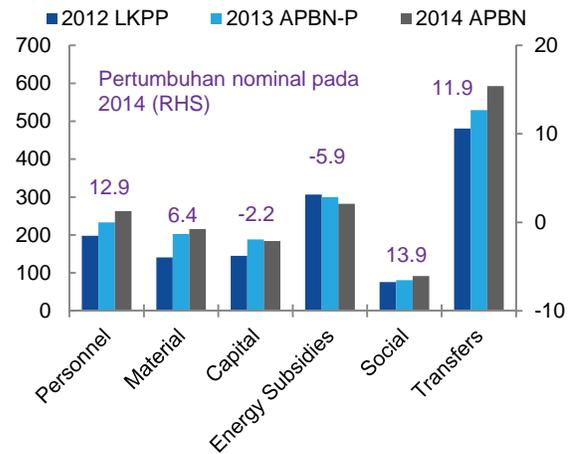
APBN 2014 juga memproyeksikan peningkatan belanja pegawai sebesar 12,9 persen (dari 233,0 triliun rupiah pada 2013 ke 263,0 triliun rupiah), yang mencerminkan rencana peningkatan gaji pokok sebesar 6 persen dan peningkatan pensiun sebesar 4 persen, serta proses reformasi birokrasi yang terus berjalan dalam empat belas kementerian/lembaga (dimana K/L tersebut akan menerima tambahan dana untuk meningkatkan gaji pokok). Belanja barang diproyeksikan akan meningkat sebesar 6,4 persen pada tahun 2014 dibanding sasaran pada APBN-P tahun 2013, walau terdapat rencana penurunan belanja operasional. Anggaran belanja sosial meningkat sebesar 13,9 persen, menjadi 91,8 triliun rupiah pada 2014, termasuk belanja untuk Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang baru sebesar 19,9 triliun rupiah. Namun, penutupan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) pada akhir tahun 2013, membatasi peningkatan belanja sosial secara keseluruhan.

...sementara belanja modal hanya ditargetkan pada 1,8 persen dari PDB

Belanja modal ditargetkan mencapai 184,2 triliun rupiah, turun sebesar 2,2 persen dari alokasi pada APBN-P 2013. Perkembangan ini patut diperhatikan menimbang kenaikan tahunan belanja modal yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir, meskipun peningkatan daya serap dapat meningkatkan realisasi belanja secara nominal daripada alokasi anggaran. Secara relatif terhadap PDB, tingkat sasaran belanja ini hanya mencapai 1,8 persen, tingkat yang sama seperti tahun 2012. Walau tingkat belanja modal ini tampaknya kecil dibanding kebutuhan yang mendesak untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur di Indonesia, tantangan pencairan anggaran merupakan kendala utama dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur.²

Gambar 22: Subsidi energi tetap menghabiskan bagian yang signifikan dari APBN

(Rp triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

² Pembahasan lebih lanjut terhadap tantangan pelaksanaan anggaran dalam sektor infrastruktur di Indonesia lihat *IEQ* Juli 2012. *IEQ* edisi bulan Maret dan Oktober 2013 membahas analisis belanja investasi infrastruktur Indonesia dan stok modal dan membahas pentingnya peningkatan kualitas infrastruktur untuk pertumbuhan kegiatan ekonomi.

Bank Dunia memproyeksikan defisit yang sedikit lebih besar pada 2,1 persen dari PDB untuk tahun 2014

Bank Dunia memproyeksikan besar defisit fiskal pada tahun 2014 akan mencapai 2,1 persen dari PDB, berdasarkan pada asumsi-asumsi ekonomi makro yang berbeda dari asumsi yang digunakan untuk menyusun APBN (Tabel 8). Dengan dampak yang belum pasti dari pengaruh pemilu dalam mendorong belanja konsumsi, proyeksi penurunan lebih lanjut dari harga minyak dunia, dan depresiasi Rupiah, Bank Dunia memproyeksikan bahwa jumlah penerimaan nominal akan meningkat sebesar 9,7 persen dibanding 2013, lebih kecil dibanding sasaran pertumbuhan nominal Pemerintah Indonesia sebesar 11 persen. Selain itu, perlemahan Rupiah semakin menekan pengeluaran, terutama melalui subsidi BBM; seperti disoroti pada *IEQ* edisi bulan Oktober. Akibatnya, penurunan jumlah biaya subsidi BBM diperkirakan tidak akan tercapai pada tahun 2014 dibanding tahun 2013 walau dengan peningkatan harga BBM bersubsidi pada bulan Juni 2013, karena penghematan yang diharapkan telah terkikis oleh harga BBM dalam denominasi Rupiah yang lebih tinggi. Tergantung tren harga-harga minyak mentah dunia dan kurs tukar, terdapat risiko yang signifikan bahwa belanja subsidi energi dapat melampaui anggarannya pada tahun 2014.

Tabel 8: Defisit fiskal yang disetujui pada tahun 2014 adalah 1,7 persen dari PDB, sedikit di atas usulan sebelumnya
(Rp triliun, kecuali dinyatakan lain)

	Rp Triliun				Persen dari PDB			
	2012 Aktuil diaudit	2013 APBN-P	2014 RAPBN	2014 APBN	2012 Aktuil diaudit	2013 APBN-P	2014 RAPBN	2014 APBN
A. Penerimaan, terdiri dari	1.338	1.502	1.663	1.667	16,2	15,9	16,1	16,1
1. Penerimaan pajak	981	1.148	1.310	1.280	11,9	12,2	12,7	12,3
PPh	465	539	592	586	5,6	5,7	5,7	5,7
Migas	83	74	68	76	1,0	0,8	0,7	0,7
Non-migas	382	465	523	510	4,6	4,9	5,1	4,9
Pajak penj./PPN	338	424	519	493	4,1	4,5	5,0	4,8
PBB	29	27	26	25	0,4	0,3	0,2	0,2
Cukai	95	105	114	116	1,2	1,1	1,1	1,1
Pajak dagang int'l	50	48	54	54	0,6	0,5	0,5	0,5
2. Penerimaan non pajak	352	349	351	385	4,3	3,7	3,4	3,7
Sumber daya alam	226	204	198	226	2,7	2,2	1,9	2,2
Migas	206	181	171	197	2,5	1,9	1,7	1,9
Non-migas	20	23	27	29	0,2	0,2	0,3	0,3
Bukan pajak lainnya	126	145	153	159	1,5	1,5	1,5	1,5
B. Pengeluaran	1.491	1.726	1.817	1.842	18,1	18,3	17,6	17,8
1. Pemerintah pusat	1.011	1.197	1.230	1.250	12,3	12,7	11,9	12,0
Pegawai	198	233	277	263	2,4	2,5	2,7	2,5
Barang	141	203	204	216	1,7	2,1	2,0	2,1
Modal	145	188	206	184	1,8	2,0	2,0	1,8
Pembayaran bunga	101	113	120	121	1,2	1,2	1,2	1,2
Subsidi	346	348	336	334	4,2	3,7	3,2	3,2
Subsidi energi	306	300	285	282	3,7	3,2	2,8	2,7
<i>BBM</i>	212	200	195	211	2,6	2,1	1,9	2,0
<i>Listrik</i>	95	100	90	71	1,1	1,1	0,9	0,7
Subsidi non-energi	40	48	52	52	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial	76	81	56	92	0,9	0,9	0,5	0,9
2. Transfer ke daerah	481	529	586	593	5,8	5,6	5,7	5,7
C. Neraca primer	-53	-112	-35	-54	-0,6	-1,2	-0,3	-0,5
D. Keseluruhan neraca	-153	-224	-154	-175	-1,9	-2,4	-1,5	-1,7
E. Pembiayaan bersih	175	224	154	175	2,1	2,4	1,5	1,7
I. Pembiayaan DN	199	241	173	196	2,4	2,6	1,7	1,9
II. Pembiayaan LN (bersih)	-23	-17	-19	-21	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2

Kerangka Anggaran Jangka Menengah memproyeksikan pencapaian surplus secara keseluruhan pada tahun 2016...

APBN 2014 yang disetujui juga menyertakan pembaruan Kerangka Anggaran Jangka Menengah untuk periode tahun 2015-2017, yang memproyeksikan pencapaian surplus secara keseluruhan pada tahun 2016 (Tabel 10) dan penurunan lebih lanjut dari rasio hutang terhadap PDB menjadi 23 persen dari PDB. Pemerintah memperkirakan terus terjadinya aliran bersih negatif untuk pembiayaan luar negeri. Perkiraan prospek fiskal ini didukung oleh sasaran pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen dari PDB mulai dari tahun 2015 dan selanjutnya, disertai dengan laju inflasi yang stabil (3-5 persen) dan kurs tukar Rupiah hingga 10.000 rupiah per dolar AS. Produksi minyak diperkirakan akan berangsur-angsur meningkat selama tiga tahun ke depan, walau proyeksi telah diturunkan dibanding yang tercantum di dalam APBN tahun 2013 (1.010 – 1.030 ribu barel per hari pada tahun 2016). Jumlah penerimaan nominal diperkirakan akan meningkat sebesar rata-rata 13 persen antara tahun 2015 dan 2017, sementara pengeluaran direncanakan akan menyusut secara bertahap sebagai bagian dari PDB, dari hampir 18 persen dari PDB menjadi sedikit di atas 16 persen pada tahun 2017.

... sasaran yang mungkin akan sulit untuk dicapai

Sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang belakangan terjadi dan ekspektasi *base case* Bank Dunia, proyeksi ekonomi makro pada Kerangka Anggaran Jangka Menengah yang diperbarui tampaknya sulit untuk dicapai. Selain itu, pergeseran ke surplus anggaran pada tahun 2016 sebesar 0,2 persen PDB akan membutuhkan pemangkasan belanja sebesar 2 poin persentase, atau peningkatan penerimaan sebesar 1 poin persentase, dari PDB. Kemungkinan kedua lebih mungkin, sementara penurunan belanja sebesar 2 poin persentase tampaknya akan menjadi tantangan dengan terbatasnya ruang diskresioner, kecuali bila dicapai melalui pemangkasan subsidi, yang membutuhkan reformasi besar-besaran. Mengingat kebutuhan pembangunan Indonesia, upaya memperbaiki proporsi belanja yang disertai dengan peningkatan penerimaan terhadap PDB lebih mungkin dibanding menurunkan jumlah belanja untuk mencapai neraca fiskal yang positif.

Tabel 9: Asumsi ekonomi makro dan harga telah direvisi ke arah yang konservatif dibanding RAPBN bulan Agustus

	2012 Aktuil diaudit	2013 APBN-P	2014 RAPBN	2014 APBN	2014 Bank Dunia
Pertumbuhan PDB riil (persen)	6,2	6,3	6,4	6,0	5,3
IHK (yoy, persen)	4,3	7,2	4,5	5,5	6,8
Kurs tukar (Rp/dolar AS)	9.384	9.600	9.750	10.500	11.800
Harga minyak mentah (dolar AS/barel)	113	108	106	105	103
Produksi minyak (ribu barel/hari)	861	840	870	870	870

Tabel 10: Kerangka Anggaran Jangka Menengah memproyeksikan surplus secara keseluruhan pada tahun 2016
(Rp triliun, kecuali dinyatakan lain)

	2013		2014		2015		2016		2017	
	APBN-P		APBN				Proyeksi			
	Triliun Rp	% dari PDB	Triliun Rp	% dari PDB	Triliun Rp	% dari PDB	Triliun Rp	% dari PDB	Triliun Rp	% dari PDB
A. Penerimaan	1.502	15,9	1.667	16,1	1.891	16,5	2.129	16,4	2.381	16,8
1. Penerimaan pajak	1.148	12,2	1.280	12,3	1.513	13,2	1.746	13,4	2.003	14,2
2. Penerimaan bukan pajak	349	3,7	385	3,7	374	3,3	381	2,9	377	2,7
B. Pengeluaran	1.726	18,3	1.842	17,8	1.944	17,0	2.104	16,2	2.306	16,3
I. Pemerintah pusat	1.197	12,7	1.250	12,0	1.268	11,1	1.346	10,4	1.473	10,4
Kementerian/lembaga	622	6,6	n.a.	n.a.	663	5,8	725	5,6	823	5,8
Non-Kementerian/non-lembaga	575	6,1	n.a.	n.a.	606	5,3	620	4,8	650	4,6
II. Transfer ke daerah	529	5,6	593	5,7	675	5,9	759	5,8	833	5,9
C. Neraca primer	-112	-1,2	-54	-0,5	75	0,7	155	1,2	207	1,5
D. Neraca keseluruhan	-224	-2,4	-175	-1,7	-53	-0,5	25	0,2	75	0,5
E. Pembiayaan bersih	224	2,4	175	1,7	53	0,5	-25	-0,2	-75	-0,5
I. Pembiayaan dalam negeri	241	2,6	196	1,9	98	0,9	28	0,2	-22	-0,2
II. Pembiayaan luar negeri, bersih	-17	-0,2	-21	-0,2	-46	-0,4	-53	-0,4	-53	-0,4
<i>Asumsi ekonomi utama</i>										
Pertumbuhan PDB riil (persen)	6,3		6,0		6,4 - 7,2		6,5 - 7,4		6,7 - 7,6	
IHK (yoy, persen)	7,2		5,5		3,0 - 5,0		3,0 - 5,0		2,5 - 4,5	
Kurs tukar (Rp/dolar AS)	9.600		10.500		9.700 - 10.000		9.700 - 10.000		9.700 - 10.000	
Harga minyak mentah (dolar AS/barel)	108		105		100 - 115		100 - 115		100 - 115	
Produksi minyak (ribu barel/hari)	840		870		960 - 980		940 - 960		920 - 940	

Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia

2. Update tentang kemiskinan di Indonesia

Bagian ini melihat tren terakhir dalam kemiskinan, dan prospek penurunan lebih lanjut dalam jangka pendek hingga menengah

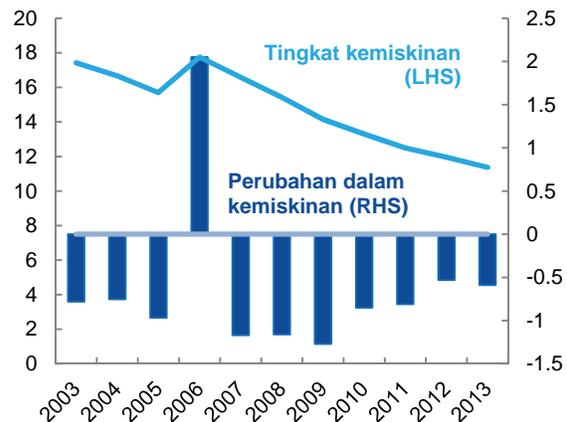
Tingkat kemiskinan nasional Indonesia turun sebesar 0,6 poin persentase selama setahun hingga bulan Maret 2013, melanjutkan tren perlambatan pengentasan kemiskinan pada beberapa tahun terakhir

Laju pengentasan kemiskinan di Indonesia telah melambat pada beberapa tahun terakhir. Bagian ini mencermati faktor-faktor yang berkontribusi kepada fenomena ini. Selain itu, sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi, berlanjutnya risiko inflasi, dan harga beras yang relatif tinggi, prospek tingkat kemiskinan nasional pada paruh kedua tahun 2013 dan paruh pertama tahun 2014 akan dicermati. Bagian ini diakhiri dengan pembahasan tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk mempercepat pengentasan kemiskinan pada masa depan.

Angka resmi tingkat kemiskinan Indonesia per bulan Maret 2013, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), adalah sebesar 11,4 persen, yang merupakan penurunan 0,6 poin persentase dari 12,0 persen pada bulan Maret 2012. Selama empat tahun terakhir, penurunan tingkat kemiskinan tahunan telah lebih kecil dari 1 poin persentase, dan penurunan sebesar 0,5 dan 0,6 poin persentase masing-masing pada tahun 2012 dan 2013 adalah penurunan yang paling rendah selama satu dekade, dengan pengecualian peningkatan hampir 2 poin pada tahun 2006 yang terutama disebabkan oleh lonjakan harga bahan pangan (Gambar 23).

Gambar 23: Laju pengentasan kemiskinan beberapa tahun terakhir merupakan yang paling lambat selama satu dekade

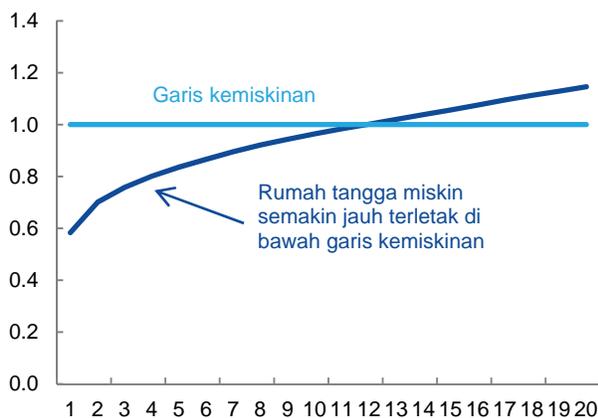
(tingkat kemiskinan, persen, dan perubahan kemiskinan, poin persentase)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 24: Rumah tangga miskin yang masih tersisa di Indonesia berada lebih jauh di bawah garis kemiskinan dibanding sebelumnya pada periode tahun 2000-an...

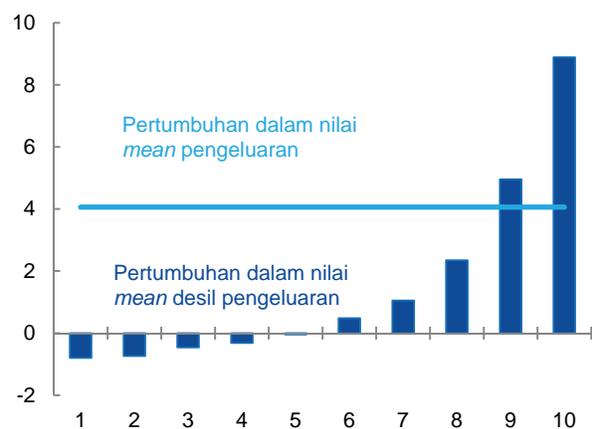
(rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita tahun 2013 menurut persentil, sebagai rasio dari garis kemiskinan nasional)



Sumber: Susenas; Perhitungan staf Bank Dunia

Gambar 25: ...sementara peran kaum miskin dan rentan semakin berkurang dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia belakangan ini

(perubahan tahunan dalam rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita tahun 2013 menurut desil, persen)



Sumber: Susenas; Perhitungan staf Bank Dunia

Faktor yang berkontribusi terhadap perlambatan ini adalah semakin sulitnya mencapai mereka yang masih tergolong miskin, dan masih tidak meratanya pertumbuhan ekonomi

Terdapat sejumlah alasan penyebab perlambatan laju pengentasan kemiskinan. Satu faktor penting adalah bahwa dengan tingkat kemiskinan di Indonesia yang mendekati 10 persen, rumah tangga miskin yang tersisa terletak semakin jauh di bawah garis kemiskinan (Gambar 24). Hal ini berarti dibutuhkan pertumbuhan konsumsi yang lebih tinggi lagi untuk mempertahankan laju tingkat pengentasan kemiskinan tahunan seperti yang tercatat di masa lalu. Pada saat yang sama, kaum miskin dan rentan semakin tidak memiliki andil dalam pertumbuhan ekonomi belakangan ini dibanding penduduk Indonesia yang lebih berada. Setengah dari penduduk Indonesia yang paling miskin mencatat pertumbuhan konsumsi riil per kapita sebesar nol atau bahkan sedikit negatif antara tahun 2012 dan 2013, dibandingkan pertumbuhan nilai mean konsumsi pada keseluruhan populasi sebesar 4 persen dan rata-rata sebesar 7 persen bagi dua desil yang paling berada (Gambar 25). Sementara Kurva Insidensi Pertumbuhan (*Growth Incidence Curves, GIC*) sangatlah peka terhadap pemilihan tanggal awal dan akhir, pola pada Gambar 25 sejalan dengan GIC-GIC lainnya sejak tahun 2003.³

Kotak 3: BLSM, Susenas, dan pengukuran kemiskinan

Dengan peningkatan harga bahan pangan dan bukan pangan akibat peningkatan harga BBM bersubsidi pada bulan Juni 2013 yang diperkirakan akan berpengaruh buruk terhadap rumah tangga miskin dan rentan dalam jangka pendek, Pemerintah Indonesia menyiapkan paket kompensasi berjumlah 29,05 triliun rupiah atau sekitar 74 persen dari jumlah penghematan subsidi BBM. Paket tersebut terdiri dari dua komponen utama: (a) Program Kompensasi Khusus, dan (b) Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) (lihat IEQ edisi bulan Juni 2013 untuk pembahasan lebih lanjut). Komponen utama dari P4S adalah Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sejumlah 150.000 rupiah untuk setiap rumah tangga per bulan selama empat bulan, yang diberikan kepada 15,5 juta rumah tangga dalam dua kali pembayaran.

BLSM dimaksudkan untuk mencegah lonjakan kemiskinan sementara yang disebabkan oleh peningkatan sementara dalam inflasi keranjang kemiskinan sebagai akibat dari naiknya harga BBM bersubsidi. Bank Dunia memproyeksikan bahwa tanpa BLSM, tingkat kemiskinan akan meningkat menjadi 12,1 persen pada bulan September 2013, namun berkat BLSM, tingkat kemiskinan akan dapat terus menurun. Se jauh mana penurunan tersebut, seperti diukur lewat SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh BPS, yang menghitung perkiraan kemiskinan) bulan September, tergantung atas sejumlah faktor. Tepatnya, penetapan waktu pencairan BLSM, dan bagaimana dana itu digunakan, akan berdampak signifikan terhadap seberapa besar pengaruh BLSM terhadap kemiskinan terukur.

Modul konsumsi SUSENAS mengajukan pertanyaan yang terperinci kepada rumah tangga tentang konsumsi pangan dan bukan pangan. Untuk berbagai komoditas bahan pangan, survei tersebut menanyakan konsumsinya selama satu minggu terakhir, dan untuk komoditas bukan pangan, survei itu menanyakan tentang konsumsinya selama tiga bulan terakhir. SUSENAS dilaksanakan selama bulan September 2013. Tahap pertama bantuan dicairkan pada bulan Juli dan Agustus. Jika bantuan itu digunakan untuk bahan pangan, maka tidak akan tercatat pada SUSENAS, karena tidak terjadi pada minggu sebelum survei tersebut. Jika digunakan bukan untuk bahan pangan, maka akan tercatat sebagai terjadi selama tiga bulan terakhir, namun dapat dilaporkan secara kurang tepat karena hanya berdasarkan ingatan responden. Jika dana itu digunakan untuk keperluan lain seperti membayar hutang atau tabungan, maka dana itu sama sekali tidak akan tertangkap oleh survei, yang hanya menanyakan hal-hal terkait dengan konsumsi. Tahap kedua dicairkan pada bulan September, pada waktu yang bersamaan dengan pelaksanaan SUSENAS. Apakah dana itu diterima sebelum survei akan menentukan apakah penggunaannya tertangkap oleh survei itu.

Pelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman pendahulu BLSM, yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT), tentang tanggapan rumah tangga? Dalam rangkaian laporannya pada tahun 2012 tentang Program Bantuan Sosial dan Tinjauan Pengeluaran Publik (*Social Assistance Program and Public Expenditure Review*), analisis Bank Dunia menunjukkan bahwa dana bantuan umumnya dikonsumsi dalam satu minggu setelah diterima (yang berarti waktu pelaksanaan pencairan dana relatif terhadap survei sangat berarti), dan bahwa umumnya dana itu digunakan untuk kebutuhan dasar – bahan pangan, dan juga barang-barang bukan pangan seperti biaya pakaian atau pendidikan. Pengalaman BLT pada tahun 2008-09 mencatat jumlah yang lebih besar yang digunakan bagi pendidikan, karena pencairannya dilakukan menjelang mulainya tahun ajaran baru, sementara pada bantuan tahun 2005-06 lebih banyak digunakan untuk bahan pangan. Dengan dua pencairan pada tahun 2013 dilakukan hanya sedikit setelah dimulainya tahun ajaran baru, mencakup bulan Ramadan, dan menjelang hari raya Lebaran, para rumah tangga tampaknya akan lebih banyak mengonsumsi dan mengurangi penabungannya, namun tidaklah jelas apakah konsumsinya akan untuk bahan pangan atau keperluan lainnya.

Catatan: Untuk analisis lebih lanjut tentang pengalaman BLT, lihat pada Bank Dunia. 2012. *Bantuan Langsung Tunai (BLT) temporary unconditional cash transfer*.

³ Lihat, misalnya, pembahasan tentang perubahan pola peningkatan konsumsi Indonesia dari 1996 sampai 2010 dalam laporan IEQ edisi Maret 2011.

Penggunaan bantuan tunai BLSM sebagai kompensasi rumah tangga miskin dan rentan terhadap kenaikan harga BBM bulan Juni tampaknya akan mencegah kenaikan tingkat kemiskinan jangka pendek bulan September 2013

Tahun ini memiliki karakteristik perlambatan pertumbuhan dan peningkatan inflasi. Secara khusus, peningkatan indeks harga keranjang kemiskinan tahun-ke-tahun (pengukuran harga dari sekeranjang barang-barang dan jasa-jasa yang umumnya dikonsumsi oleh kaum miskin) pada triwulan ketiga tahun 2013 mencapai 8,8 persen, yang didorong oleh pengaruh peningkatan harga BBM bersubsidi dari bulan Juni. Dengan peningkatan ini, biaya hidup untuk kaum miskin tampaknya akan meningkat lebih tinggi dari peningkatan pendapatan atau upah rumah tangga, dan tingkat kemiskinan bulan September 2013 diperkirakan akan meningkat. Dengan menerapkan hasil realisasi ekonomi makro terhadap model data-mikro kemiskinan di Indonesia, dan dengan melakukan abstraksi terhadap dampak paket kompensasi terkait dengan peningkatan harga BBM bersubsidi, tingkat kemiskinan bulan September diproyeksikan akan mencapai 12,1 persen, atau peningkatan sebesar 0,4 poin persentase dari September 2012 (dan 0,7 poin dari Maret 2013). Namun, tingkat kemiskinan dapat menarik manfaat jangka pendek dari pengaruh sementara pembayaran BLSM pada pertengahan tahun, dengan dua pembayaran sebesar 300.000 rupiah kepada 15,5 juta rumah tangga pada bulan Juli/Agustus dan September. Sebagai akibatnya, peningkatan inflasi sementara tampaknya terimbangi oleh peningkatan sementara dalam pendapatan bagi rumah tangga miskin dan rentan, dan Bank Dunia memproyeksikan bahwa tingkat kemiskinan bulan September akan menunjukkan penurunan dalam tingkat kemiskinan. Apakah tingkat penurunan ini berarti atau tidak berarti akan bergantung pada penetapan waktu pencairan, bagaimana dana itu digunakan, dan waktu pelaksanaan survei rumah tangga (lihat Kotak 3).

Namun sasaran tingkat kemiskinan Pemerintah sebesar 8-10 persen pada tahun 2014 tampaknya tidak akan tercapai...

Pembayaran BLSM sementara tidak akan mempengaruhi tren kemiskinan untuk jangka waktu yang lebih panjang, karena BLSM hanya berlangsung selama empat bulan. Dengan tingkat kemiskinan pada bulan Maret 2013 sebesar 11,4 persen, bahkan apabila laju penurunan kemiskinan kembali ke 1 poin persentase per year, angka sasaran Pemerintah sebesar 8-10 persen pada tahun 2014 (RPJM 2009-14) tetap tidak akan tercapai. Selain itu, perlambatan pertumbuhan (diproyeksikan oleh Bank Dunia akan menjadi 5,1 persen tahun-ke-tahun hingga Maret 2014) dan tingginya inflasi (7,2 persen tahun-ke-tahun hingga Maret 2014) menyiratkan bahwa pencapaian penurunan 1 poin persentase pada tahun yang berakhir pada bulan Maret 2014 tidaklah mungkin. Model kemiskinan Bank Dunia memproyeksikan tingkat kemiskinan pada bulan Maret 2014 akan menjadi 11,0-11,1 persen (0,3-0,4 poin lebih rendah dari bulan Maret 2013), yang menunjukkan semakin melambatnya laju pengentasan kemiskinan.

...walau sebagian akan bergantung pada perluasan program bantuan sosial jangka panjang yang belakangan dilakukan

Namun, perluasan bantuan sosial jangka panjang yang dimulai pada triwulan ketiga tahun 2013 (lihat pembahasan berikutnya) dapat mempengaruhi pencapaian tingkat kemiskinan. Selain BLSM yang bersifat sementara, Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) (lihat Kotak 3 dan *IEQ* edisi bulan Juli 2013), juga menyertakan perluasan manfaat yang signifikan dari dua program bantuan sosial jangka panjang – Program Keluarga Harapan (PKH) dan program Bantuan untuk Siswa Miskin (BSM). Pelaksanaan program-program ini secara signifikan (serta waktu pelaksanaan pencairan – lihat Kotak 3) dapat membantu mempercepat pengentasan kemiskinan, dan membuka peluang untuk mewujudkan sasaran tingkat kemiskinan tahun 2014. Namun, pelaksanaan yang signifikan tampaknya baru akan terjadi pada paruh kedua tahun 2014.

Pengentasan kemiskinan berkelanjutan akan membutuhkan perluasan bantuan sosial yang berkelanjutan...

Secara historis, belanja Indonesia untuk bantuan sosial sebagai persen dari PDB (sekitar 0,5 persen) berada di bawah belanja negara-negara tetangganya (1,0 persen) dan negara-negara berpenghasilan menengah pada umumnya (1,5 persen).⁴ Walaupun perluasan yang baru dilakukan pada program-program jangka panjang yang telah disebutkan di atas merupakan langkah maju yang cukup baik, tetap dibutuhkan komitmen terhadap peningkatan bantuan sosial yang berkelanjutan untuk membantu mempercepat pengentasan kemiskinan. Sama pentingnya, pelaksanaan yang tepat bagi program-program tersebut juga akan menentukan efektivitas mereka sebagai alat pengentas kemiskinan.⁵

⁴ Lihat Bank Dunia (2012) Melindungi yang Miskin dan Lemah di Indonesia - *Protecting the Poor and Vulnerable in Indonesia*.

⁵ Lihat juga Bank Dunia (2012), Melindungi yang Miskin dan Lemah di Indonesia - *Protecting the Poor and Vulnerable in Indonesia*.

...dengan Pemerintah baru-baru saja meningkatkan Program Keluarga Harapan-nya secara signifikan...

Program Keluarga Harapan (PKH) telah diperluas dari 1,1 juta rumah tangga penerima menjadi 2,4 juta pada tahun 2013, dengan rencana perluasan lebih lanjut menjadi 3,2 juta rumah tangga pada tahun 2014. Bersamaan dengan itu, tingkat rata-rata bantuan akan meningkat dari 1,4 juta rupiah menjadi 1,8 juta rupiah per tahun per rumah tangga. Peningkatan jumlah bantuan ini tampaknya akan meningkatkan kecukupan bantuan program dalam mengimbangi biaya layanan kesehatan dan pendidikan bagi keluarga-keluarga miskin.

...dan program bantuan dana bagi siswa miskin

Serupa dengan hal tersebut di atas, jumlah pelajar miskin yang berhak menerima Bantuan untuk Siswa Miskin (BSM) akan meningkat hampir dua kali lipat pada tahun 2013 dari 8,7 juta menjadi 16,6 juta penerima bantuan. Namun, dampaknya terhadap kemiskinan akan bergantung kepada penggunaan program tersebut oleh siswa di rumah tangga miskin. Besar bantuan juga akan meningkat secara signifikan: bantuan bagi sekolah dasar (SD) akan meningkat dari 360.000 rupiah ke 450.000 rupiah per tahun per siswa, sementara bantuan untuk sekolah menengah pertama (SMP) akan meningkat dari 550.000 rupiah ke 750.000 rupiah per siswa per tahun.

Pemerintah juga meningkatkan subsidi Raskin untuk sementara bagi kelompok berpenghasilan rendah, walau program ini terus menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya

Program-program bantuan sosial tetap lainnya juga diubah menurut P4S, namun hanya untuk sementara, dan tampaknya hanya akan memberikan dampak yang kecil bagi pengentasan kemiskinan pada jangka panjang. Dengan program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin), rumah tangga penerima berhak membeli tambahan 15 kg beras per bulan selama tiga bulan (Juni, Juli, dan Agustus) pada harga yang sangat disubsidi. Alokasi kedua ini menambah alokasi awal sebesar 15 kg beras yang dapat dibeli setiap bulan. Namun, karena tantangan yang dihadapi oleh sistem penyampaian Raskin, para rumah tangga berisiko tampaknya hanya dapat membeli jumlah beras yang jauh lebih kecil dari jumlah yang dialokasikan kepada mereka melalui program kompensasi tersebut. Hal ini mempengaruhi besarnya manfaat *de facto* yang akan diterima oleh para rumah tangga melalui program Raskin, serta melemahkan manfaat dan dampak program. (lihat laporan Bank Dunia tahun 2012 tentang Program Bantuan Sosial dan Tinjauan Pengeluaran Publik (*Social Assistance Program and Public Expenditure Review*) untuk penjelasan lebih lanjut tentang tantangan pelaksanaan Raskin).

Perlu digarisbawahi, reformasi bantuan sosial akhir-akhir ini telah disertai dengan peluncuran Kartu Perlindungan Sosial dan Basis Data Terpadu penerima bantuan

Pelaksanaan reformasi program melalui P4S juga disertai dengan peluncuran Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan sejalan dengan Basis Data Terpadu (BDT) yang merupakan basis data terpadu penerima potensial dari program perlindungan sosial. Penggunaan KPS dan BDT memiliki implikasi penting bagi potensi bantuan lintas program, terutama bagi penduduk yang sangat miskin. Sebagai contoh, keluarga penerima PKH secara otomatis akan memiliki akses ke BSM, BLSM, dan Raskin. Ketika dilaksanakan secara selaras, program-program itu berpotensi untuk saling memperkuat manfaat program satu sama lain, sehingga mendorong terwujudnya upaya pengentasan kemiskinan yang lebih kuat.

Pengentasan kemiskinan masa depan tidak hanya melalui peningkatan program perlindungan sosial namun juga melalui upaya membangun pertumbuhan inklusif, seperti fokus pada keterampilan dan penciptaan pekerjaan yang berkualitas

Berlanjutnya perluasan manfaat dan cakupan program-program perlindungan sosial tetap, termasuk PKH dan BSM, dapat membantu memperkuat pengentasan kemiskinan pada masa depan. Peluncuran program-program baru yang melindungi risiko-risiko yang kini belum terlindungi, termasuk program bantuan tunai dan natura yang menargetkan kaum manula dan berkebutuhan khusus, juga akan membantu melindungi penduduk yang rentan. Melalui perluasan dan integrasi lebih lanjut dari program-program perlindungan sosial yang ada, dan peluncuran program-program baru untuk memberi perlindungan terhadap risiko-risiko yang belum terlindungi, sistem perlindungan sosial itu akan semakin mampu melindungi para keluarga secara memadai dari berbagai guncangan dan membantu mereka mengelola risiko yang mempengaruhi mereka sepanjang siklus kehidupan. Program-program yang memberikan pelatihan keterampilan dan menyokong lapangan kerja formal juga dibutuhkan untuk mendorong perkembangan pasar tenaga kerja dan semakin meningkatkan pengentasan kemiskinan (seperti dibahas pada Bagian berikutnya).

C. Indonesia tahun 2015 dan selanjutnya: Tinjauan pilihan



1. Pasar tenaga kerja di Indonesia: pencapaian dan tantangan terkini

Indonesia telah berhasil dalam menciptakan lapangan pekerjaan, dan kini pasar tenaganya yang berkembang harus mengatasi sejumlah tantangan...

...seperti peningkatan pertumbuhan ketenagakerjaan dalam sektor produktivitas yang lebih tinggi serta tingginya informalitas dan kelangkaan pekerja terampil

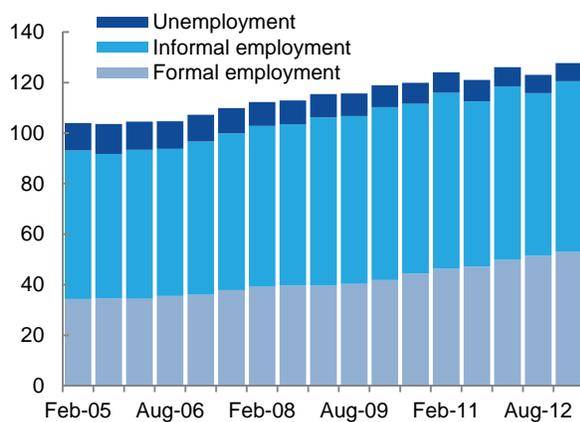
Pasar tenaga kerja Indonesia telah menunjukkan pemulihan berkelanjutan sejak pertengahan tahun 2000-an, setelah penurunan akibat krisis keuangan Asia Timur tahun 1997/1998. Kinerja Indonesia terkait laju ketenagakerjaan merupakan salah satu yang terkuat di wilayah Asia Timur Pasifik. Keberhasilan Indonesia di dalam penciptaan lapangan kerja pada dasarnya karena adanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, lingkungan ekonomi yang mendukung, dan sektor jasa yang berkembang pesat. Hal ini telah mendorong kemajuan bertahap dalam ketersediaan lapangan pekerjaan di sektor jasa dan formalisasi ekonomi, terutama di daerah-daerah perkotaan, umumnya melalui peningkatan dalam pekerjaan formal yang bergaji. Walau mengalami berbagai perkembangan yang menggembirakan tersebut, Indonesia menghadapi tantangan dalam menciptakan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik seiring dengan terus berlanjutnya transformasi struktural negara ini (seperti pergerakan pekerja dari kegiatan-kegiatan yang kurang produktif ke kegiatan-kegiatan yang sangat produktif). Bagian ini meninjau pencapaian-pencapaian terbaru dalam pasar tenaga kerja Indonesia dan memaparkan tantangan-tantangan utama yang dihadapi.

Secara khusus, terdapat tiga tantangan utama yang harus diatasi. Pertama, sektor ekonomi terbesar dalam hal ketenagakerjaan masih memiliki nilai tambah yang rendah, dan penciptaan pekerjaan sejak tahun 2001 telah didorong oleh perluasan sektor-sektor berproduktivitas rendah. Kedua, sektor informal masih berukuran besar, yang mempekerjakan lebih dari 50 persen dari seluruh jumlah penduduk yang bekerja, dengan pekerjaan-pekerjaan informal yang memiliki upah yang lebih rendah, stabilitas yang lebih rapuh dan tanpa disertai akses kepada tunjangan. Ketiga, investasi pada sektor-sektor dengan produktivitas yang lebih tinggi terbentur kendala terbatasnya ketersediaan tenaga kerja yang terampil. Jika tantangan-tantangan tersebut tetap tidak tertangani, terdapat risiko bahwa peningkatan kesejahteraan yang baru terjadi akan menemui kendala, yang kemudian berdampak terhadap perlambatan laju pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketidaksetaraan.

Angkatan kerja Indonesia, yang merupakan nomor 4 terbesar di dunia, mencapai 121 juta pekerja pada awal 2013 dan lapangan kerja yang terus berkembang...

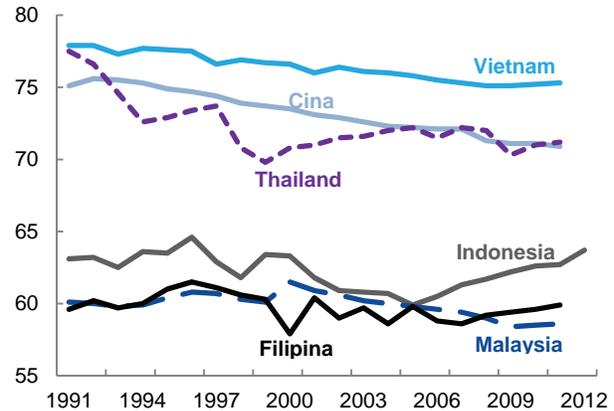
Menurut data terbaru Sakernas bulan Februari 2013, dari 175 juta penduduk berusia di atas 15 tahun, jumlah angkatan kerja Indonesia adalah 121 juta, yang mana 114 juta memiliki pekerjaan (Gambar 26). Sejak bulan Februari 2006, tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja meningkat dengan lambat namun stabil, dari 66,7 persen menjadi 69,2 persen, sementara, pada periode waktu yang sama, persentase jumlah pekerja terhadap penduduk usia kerja meningkat dengan lebih cepat, dari 59,0 persen ke 65,1 persen, menyamai tingkatan yang tercatat pada pertengahan tahun 1990-an. Sejalan dengan hal itu, antara tahun 2006 dan 2012, elastisitas lapangan kerja terhadap pertumbuhan (nilai tambah riil)⁶ mencapai 0,56 (yang berarti peningkatan 1 persen dalam nilai tambah riil akan meningkatkan lapangan kerja sebesar 0,56 persen, secara rata-rata lintas sektor, selama periode tersebut), dibanding 0,47 yang tercatat antara tahun 2001 dan 2005, dan 0,79 pada awal tahun 1990-an, dengan rata-rata elastisitas diperkirakan sama dengan 0,5 antara tahun 1990 dan 2012 (dan tidak berbeda secara signifikan dari 0 selama krisis tahun 1998-99). Selain tren ketenagakerjaan yang positif ini, tingkat pengangguran juga terus menurun (dari 10,4 persen pada bulan Februari 2006 ke 5,9 persen pada bulan Februari 2013). Namun, indikator tingkat pengangguran agregat tidak terlalu memberikan gambaran yang baik tentang pasar tenaga kerja di Indonesia, seperti di negara-negara berpenghasilan menengah lainnya, akibat tingginya tingkat pekerja informal, seperti dibahas di bawah.

Gambar 26: Dari 121 juta angkatan kerja Indonesia, 114 juta memiliki pekerjaan (kurang dari setengahnya ada di sektor formal)
(pekerja, pengangguran, dan pekerjaan formal, juta)



Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia menggunakan Sakernas

Gambar 27: Peningkatan lapangan kerja di Indonesia sejak 2005 termasuk yang terkuat di kawasan (tingkat ketenagakerjaan, persen; tingkat ketenagakerjaan didefinisikan sebagai pekerja berusia 15+ tahun sebagai persentase jumlah penduduk usia 15+ tahun)



Sumber: WDI Bank Dunia dan Perhitungan staf Bank Dunia menggunakan Sakernas untuk Indonesia

...walau tingkat ketenagakerjaan Indonesia terus tertinggal di belakang sejumlah negara tetangga

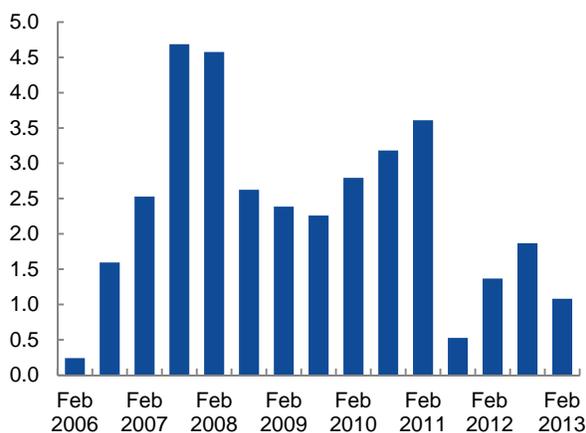
Dibanding negara-negara tetangganya, Indonesia telah melampaui Filipina dan Malaysia pada paruh kedua tahun 2000-an (Gambar 27), walau masih tertinggal dari sejumlah negara pembandingnya yang setara, seperti Kamboja, Vietnam, Cina, dan Thailand, terutama karena relatif buruknya partisipasi perempuan dan tenaga muda usia di pasar tenaga kerja. Sesungguhnya tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan di Indonesia baru-baru saja menembus angka batas 50 persen, dan partisipasi tenaga muda di bawah 25 tahun masih berada di bawah 40 persen, masih belum pulih ke tingkatannya pada awal tahun 1990-an (sebesar 47 persen), setelah penurunan berkepanjangan dan pemulihan yang lambat yang baru dimulai pada pertengahan tahun 2000-an. Yang lebih memprihatinkan, rendahnya partisipasi tenaga kerja usia muda juga diikuti dengan tetap tingginya tingkat NEET (tenaga muda yang sedang tidak bekerja, tidak belajar, maupun tidak dalam pelatihan), seperti dibahas di bawah.

⁶ Diperkirakan dengan menggunakan data panel lapangan kerja dan nilai tambah riil bagi 9 sektor perekonomian (ditetapkan pada Gambar 30) antara tahun 1990 dan 2012.

Sebagian besar penciptaan lapangan kerja berada pada sektor formal, dan dalam sektor jasa

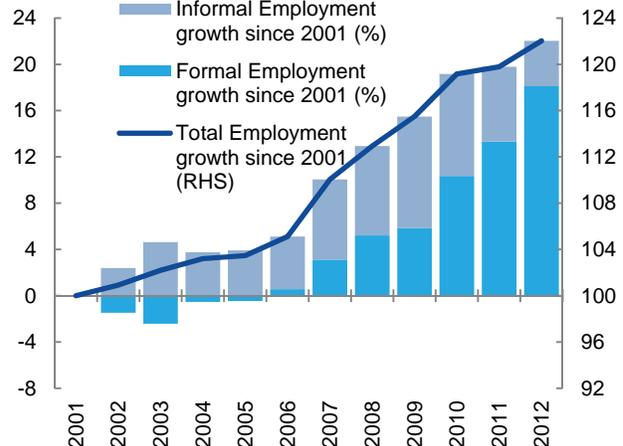
Antara bulan Agustus 2001 dan Agustus 2012, lebih dari 20 juta pekerjaan baru telah tercipta (pertumbuhan sebesar 22 persen), dengan rata-rata pertumbuhan pekerjaan tahunan sebesar 2,3 persen sejak bulan Februari 2006 (Gambar 28). Dari 20 juta pekerjaan yang tercipta tersebut, 16,4 juta (82 persen) merupakan pekerjaan formal, sesuai dengan definisi pekerjaan formal yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sejak 2001⁷. Sektor jasa berkontribusi terhadap sebagian besar peningkatan kesempatan kerja ini, dengan 16,8 juta pekerjaan baru tercipta untuk sektor tersebut (84 persen dari jumlah keseluruhan), dan sebagai akibatnya persentase dari sektor jasa terhadap jumlah pekerjaan telah mencapai 43 persen. Sektor industri hanya mampu menciptakan 4 juta pekerjaan baru dan saat ini merupakan 21 persen dari jumlah pekerjaan, sementara pada sektor pertanian (dengan 35 persen dari jumlah pekerja masih dipekerjakan) sekitar 860.000 pekerjaan telah hilang selama periode tersebut. Perluasan pekerjaan dalam bidang jasa juga telah mendorong peningkatan pekerjaan pada sektor formal, dengan 85 persen dari pekerjaan yang tercipta pada sektor jasa sejak tahun 2001 merupakan pekerjaan formal, dibanding 57 persen di sektor industri.

Gambar 28: Pertumbuhan pekerjaan tahun-ke-tahun telah bertahan sejak 2005, walau melambat setelah 2011
(pertumbuhan pekerjaan tahun-ke-tahun, persen)



Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia menggunakan Sakernas

Gambar 29: Pekerjaan formal berkontribusi empat per lima dari jumlah pekerjaan yang tercipta antara 2001 dan 2012
(kontribusi kumulatif terhadap pertumbuhan jumlah pekerjaan dengan pekerjaan pada tahun 2001=100)



Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia menggunakan Sakernas

Penciptaan pekerjaan lebih tinggi di perkotaan, dan perbedaan geografis dalam tingkat pekerjaan tetap ada

Penciptaan pekerjaan lebih kuat di daerah-daerah perkotaan, dengan peningkatan kesempatan kerja sebesar 45 persen sejak tahun 2001 dibanding pertumbuhan sebesar 6 persen yang tercatat di daerah perdesaan. Pertumbuhan pekerjaan perkotaan secara bertahap telah melampaui tingkat pertumbuhan perdesaan selama dekade yang lalu, dan sejak tahun 2008 pekerjaan di daerah perkotaan telah meningkat lebih cepat dibanding populasi angkatan kerja. Urbanisasi juga sangat terkait dengan peningkatan pekerjaan formal, dengan 72 persen pekerjaan yang tercipta pada daerah perkotaan merupakan pekerjaan formal. Peningkatan

⁷ Menurut definisi baru pekerja formal/informal yang digunakan oleh BPS sejak tahun 2001, pekerja informal didefinisikan menurut sejumlah karakteristik yang terkait dengan “status pekerjaan” dan “jabatan”. “Jabatan” mencakup 9 kategori: Tenaga Profesional; Teknisi dan yang sejenis; Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan; Tenaga Tata Usaha dan yang sejenis; Tenaga Usaha Penjualan; Tenaga Jasa; Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Perburuan; Tenaga Produksi, Operator Alat Angkutan dan Pekerja Kasar; Lainnya. “Status pekerjaan” termasuk 7 kategori: Berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, pekerja, pekerja bebas dalam sektor pertanian, pekerja bebas dalam sektor non-pertanian, pekerja keluarga tak dibayar. Pekerja informal didefinisikan sebagai: semua pekerja keluarga tak dibayar; semua pekerja bebas atau yang bekerja sendiri, kecuali mereka yang bekerja sebagai Tenaga Profesional, Teknisi dan yang sejenis, Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan, Tenaga Tata Usaha dan yang sejenis; berusaha dibantu buruh tidak tetap dalam pertanian atau bidang usaha lain. Perubahan utama dari definisi yang lama adalah sebelum tahun 2001 tidak ada kelompok “pekerja bebas” di dalam Sakernas, sehingga pekerja bebas dalam bidang pertanian dan konstruksi disertakan di dalam sektor formal sebagai buruh/karyawan dibayar.

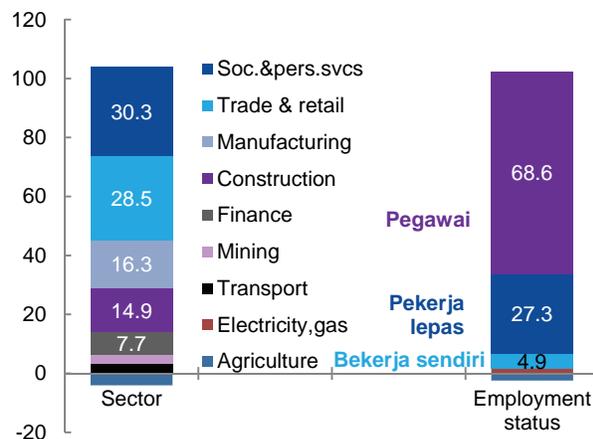
pekerjaan formal ini dapat dijelaskan dengan peningkatan jumlah buruh/karyawan yang dibayar (atau pekerja yang bergantung/dependen pada gaji) yang berkontribusi terhadap hampir 70 persen dari jumlah penciptaan pekerjaan (Gambar 30). Dari segi geografis, walau terdapat sejumlah konvergensi tingkat pekerjaan provinsi dengan tingkat nasional yang dapat ditunjukkan selama dekade yang lalu, perbedaan yang penting masih dapat terlihat pada daerah-daerah dengan tingkat pekerjaan yang tinggi (di atas 75%), seperti Bali dan Papua (yang kinerjanya tampaknya dapat dijelaskan sebagai akibat meroketnya industri ekstraksi sumber daya alam, terutama dalam minyak sawit), dan daerah-daerah dengan tingkat pekerjaan yang tetap bertahan rendah (sedikit di atas 55%) seperti Sulawesi Utara dan Aceh.

a. Tantangan transformasi struktural yang sedang dilakukan tetapi belum lengkap

Sebagian besar pertumbuhan pekerjaan terjadi pada sektor-sektor dengan nilai tambah dan keterampilan yang rendah

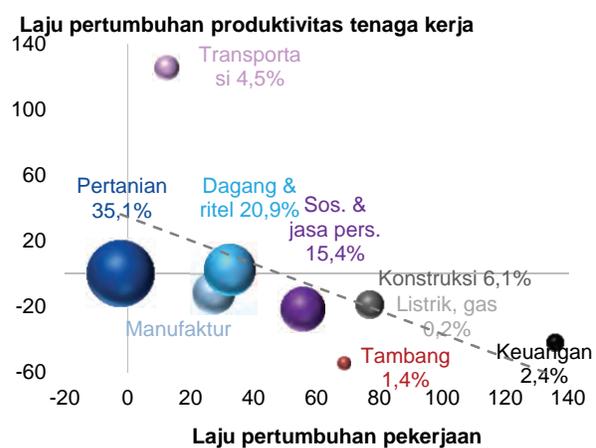
Sisi lain dari perkembangan pasar tenaga kerja yang menggembirakan itu adalah bahwa sektor-sektor dengan produktivitas tenaga kerja yang rendah (dengan produktivitas tenaga kerja didefinisikan sebagai nilai tambah dibagi dengan jumlah pekerja) dengan lebih rendahnya jumlah pekerja berpendidikan tinggi, masih mendominasi lapangan kerja, dan penciptaan pekerjaan umumnya terkonsentrasi pada sektor-sektor berproduktivitas rendah yang tidak memerlukan keterampilan tinggi. Dari jumlah pertumbuhan pekerjaan yang tercatat dari tahun 2001 hingga 2012, 30 persen terjadi pada jasa kemasyarakatan, sosial dan personal (dengan 6,9 juta pekerjaan baru yang tercipta), dan 28 persen dalam sektor perdagangan besar, perdagangan, dan eceran (5,7 juta). Manufaktur hanya menyumbang 16 persen dari jumlah pertumbuhan (3,3 juta), sedikit di atas konstruksi (14 persen, setara dengan 2,9 juta pekerjaan baru). Korelasi yang negatif antara pertumbuhan pekerjaan dan pertumbuhan produktivitas antara tahun 2001 dan 2012 (Gambar 31), tampaknya menunjukkan bahwa penciptaan pekerjaan tidak sepenuhnya meningkatkan produktivitas, dan masih terdapat ruang untuk meningkatkan efisiensi alokasi ulang tenaga kerja dari pertanian ke industri dan jasa, serta dari kegiatan berproduktivitas rendah ke tinggi baik di dalam maupun lintas sektor.

Gambar 30: Sektor-sektor bernilai tambah rendah dalam jasa mencatat kontribusi terbesar terhadap penciptaan pekerjaan antara tahun 2001 dan 2012 (kontribusi sektor dan status pekerjaan terhadap jumlah pertumbuhan pekerjaan antara 2001 dan 2012, persen)



Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia menggunakan Sakernas

Gambar 31: Pertumbuhan pekerjaan dan produktivitas pekerja memiliki korelasi yang negatif (pertumbuhan pekerjaan dan produktivitas tenaga kerja, 2001-2012, persen)



Catatan: Ukuran gelembung menunjukkan bagian tiap sektor dalam jumlah pekerjaan pada 2012.

Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia menggunakan Sakernas

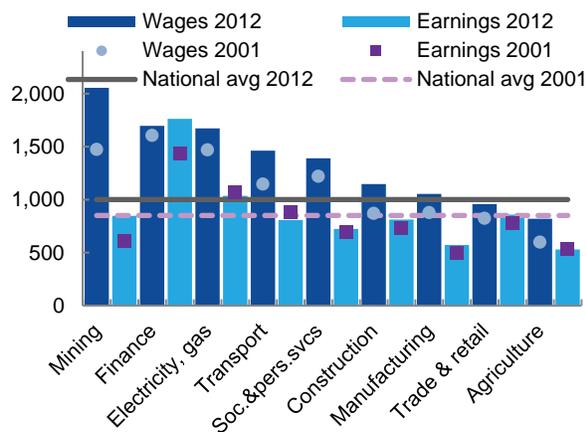
Sebagai akibatnya, upah hanya tumbuh secara moderat, namun kesenjangan pendapatan yang penting tetap bertahan antara pekerja formal dependen dan pekerja non-dependen...

Bukti ini konsisten dengan temuan-temuan bahwa rata-rata upah riil hanya naik relatif sedikit pada periode tahun 2002 hingga 2012 dibanding pertumbuhan produktivitas secara agregat. Upah riil (termasuk upah dari pegawai di sektor formal) meningkat sebesar 21 persen sejak tahun 2001 (Gambar 32), rata-rata sebesar 2 persen secara pertumbuhan tahunan riil, yang tampaknya cukup moderat dibanding rata-rata pertumbuhan PDB riil tahunan sebesar 5,4 persen, dan terhadap jumlah pertumbuhan produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan yang hampir mencapai 50 persen selama periode yang sama. Gambar 32 juga menunjukkan bahwa pertumbuhan dalam penerimaan riil (pendapatan dari pekerjaan bagi yang berusaha sendiri dan pekerja bebas, baik formal maupun informal) berjalan jauh lebih lambat, hanya sebesar 5 persen selama seluruh periode itu, yang mengakibatkan tetap bertahannya jurang pendapatan antara pekerja formal dependen (buruh/karyawan dibayar) dan pekerja non-dependen.

...dan terdapat variasi pertumbuhan upah yang besar lintas sektor

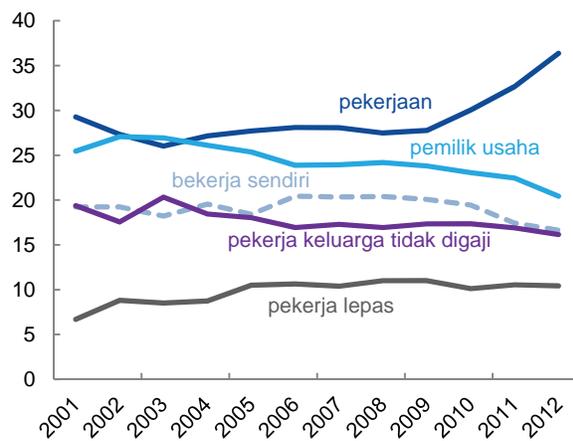
Pembagian per sektor juga menunjukkan perbedaan lain yang tidak kalah penting: upah pada pertambangan telah meningkat dua kali lebih cepat dari rata-rata nasional, yang mencerminkan lonjakan pendapatan pada sektor itu yang berasal dari harga komoditas dan permintaan dunia selama periode tersebut. Namun, potensi perluasan pekerjaan di sektor ini tetap terbatas. Sebaliknya, jumlah upah pada sektor yang secara potensial membutuhkan keterampilan tinggi seperti manufaktur telah meningkat lebih rendah dari rata-rata nasional, yang mencerminkan buruknya pertumbuhan produktivitas. Selain itu, variasi dalam upah riil di dalam sektor jasa, mulai dari keuangan hingga perdagangan dan eceran, telah terlihat jelas, sekali lagi mencerminkan perbedaan dalam intensitas keterampilan.

Gambar 32: Terdapat perbedaan upah yang penting antar sektor, di dalam sektor dan antar jenis pekerjaan
(rata-rata pendapatan bulanan riil dari pekerjaan per sektor, ribu Rp, 2007 sebagai tahun rujukan)



Catatan: Penerimaan merujuk pada pendapatan dari pekerjaan untuk pekerja sendiri dan bebas, baik formal maupun informal
Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia menggunakan Sakernas

Gambar 33: Pekerja di sektor formal meningkat, namun kebanyakan pekerja masih bekerja dalam pekerjaan yang rentan
(komposisi pekerjaan menurut status, persen)



Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia menggunakan Sakernas

b. “Pekerjaan baik” meningkat, namun banyak pekerja yang tetap informal dan rentan

Walau jumlah “pekerjaan baik” meningkat, lebih dari 50 persen jumlahnya masih bersifat informal dan tingkat kerentanan bagi banyak pekerja tetap tinggi

Keberadaan sektor informal yang besar, yang masih mempekerjakan lebih dari 50 persen dari jumlah pekerja (70 persen di daerah pedesaan) tetap menjadi salah satu tantangan yang paling serius bagi pasar tenaga kerja Indonesia. Walau persentase “pekerjaan baik” terhadap keseluruhan pekerjaan (didefinisikan sebagai persentase dari pekerja formal dependen) meningkat dari 27,7 persen ke 36,4 persen antara bulan Agustus 2001 dan Agustus 2012 (Gambar 33), sebagian besar pekerja masih dalam keadaan sangat rentan, termasuk 18 juta pekerja keluarga yang tidak dibayar dan 11,5 juta pekerja bebas (masing-masing 16 persen dan 10 persen dari keseluruhan pekerjaan). Selain itu, penurunan dalam jumlah pekerja bebas

dalam bidang pertanian telah diimbangi dengan peningkatan pekerja bebas dalam sektor-sektor bukan pertanian, dan walau jumlah penduduk bekerja sebagai buruh tetap telah meningkat, penduduk yang bekerja sebagai buruh tidak tetap masih berjumlah 82 persen dari seluruh penduduk yang bekerja. Akhirnya, walau jumlah penduduk yang berusaha sendiri (atau bekerja sendiri dalam pengertian yang ketat), yang lebih memiliki kemungkinan untuk rentan dan berproduktivitas rendah, menurun jumlahnya, mereka masih merupakan 18,5 juta (17 persen dari keseluruhan pekerjaan). Pekerjaan yang rentan menawarkan perlindungan yang lebih rendah terhadap risiko maupun gejolak, tidak memungkinkan akses terhadap tunjangan sosial, dan memberikan pendapatan yang lebih rendah. Sebagai contoh, pada bulan Agustus 2012, masing-masing pekerja bebas dan pekerja sendiri mencatat penghasilan rata-rata sebesar 48 persen dan 65 persen dari rata-rata upah pegawai, dibanding 45 persen dan 75 persen pada tahun 2001, yang kurang lebih dapat menjelaskan meningkatnya ketidakesetaraan secara keseluruhan yang tercatat di Indonesia selama periode tersebut.

Terdapat variasi yang tinggi dalam proporsi pekerja yang rentan lintas sektor dan daerah geografis

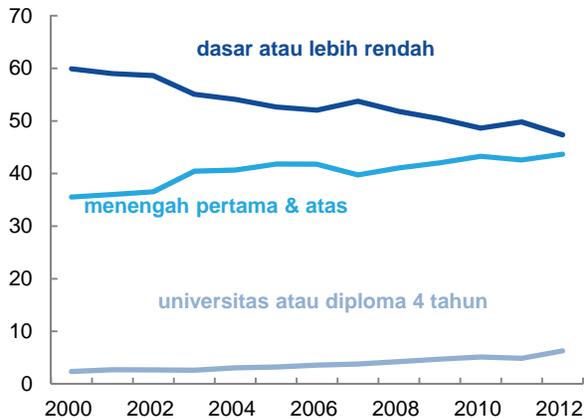
Keberadaan bentuk pekerjaan yang rentan menunjukkan variasi yang tinggi antar sektor dan provinsi, selain juga diakibatkan ketidakpatuhan yang persisten terhadap kebijakan Upah Minimum (lihat *IEQ* edisi bulan Desember 2012). Keterbatasan data merintangi kemungkinan pengukuran dampak peningkatan yang tajam dalam tingkatan upah minimum lintas provinsi terhadap pekerjaan pada tahun 2013, (Jakarta mencatat peningkatan yang melebihi 40 persen). Namun, data Sakernas menunjukkan bahwa hingga tahun 2012, sektor dengan jumlah pekerja tertinggi (perdagangan besar dan eceran, dan jasa kemasyarakatan, sosial dan personal) mencatat persentase yang tinggi dari pekerja yang dibayar dengan upah di bawah aturan minimum: masing-masing sebesar 50 persen dan 45 persen, yang meningkat secara tajam bagi pekerja informal (masing-masing sebesar 80 persen dan 86 persen). Angka-angka ini bahkan lebih tinggi pada sektor pertanian, dengan hampir 80 persen dari seluruh pekerja menerima pembayaran di bawah upah minimum. Pada tingkat provinsi, ketidakpatuhan mencapai lebih dari 60 persen di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Barat (lebih dari 75 persen bagi pekerja informal), dan mendekati atau lebih dari 50 persen pada 12 provinsi lain (termasuk Jakarta dan Yogyakarta, dan sangat tinggi di Lampung, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan).

c. Menangani angkatan kerja yang sebagian besar berketerampilan rendah

Angkatan kerja Indonesia umumnya tidak terampil, dengan hanya 6,3 persen yang berpendidikan tinggi...

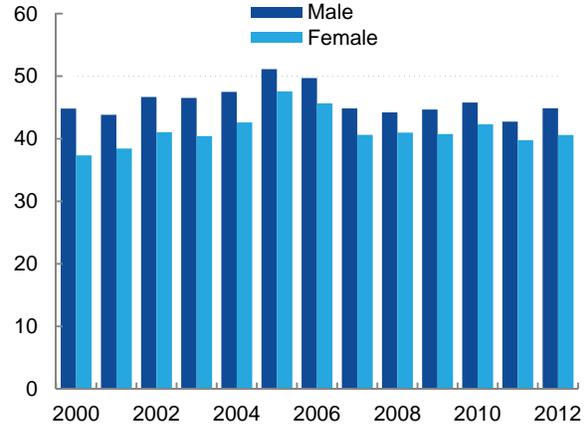
Hampir 50 persen dari angkatan kerja Indonesia hanya memiliki pendidikan dasar, sementara hanya 6,3 persen yang memiliki gelar universitas, atau diploma 4 tahun (Gambar 34). Kenyataan ini terjadi meskipun Indonesia mencatat kemajuan besar dalam meningkatkan pendaftaran pada pendidikan menengah dan tinggi bagi generasi termuda, dan peningkatan persentase angkatan kerja dengan pendidikan menengah pertama dan atas dari 35 persen menjadi 44 persen antara tahun 2001 dan 2012. Angkatan kerja berketerampilan rendah merupakan tantangan serius bagi peningkatan produktivitas dan untuk memenuhi permintaan pemilik usaha dalam pasar tenaga kerja yang cepat berubah, terutama dengan rendahnya kecenderungan perusahaan-perusahaan Indonesia untuk memberikan pelatihan. Sebagai akibat dari masalah ketidaksesuaian ini, suatu persentase yang cukup dramatis, yaitu lebih dari 40 persen, dari tenaga muda berusia 15-24 tahun, tetap tidak memiliki pendidikan, pelatihan, atau pekerjaan per tahun 2012 (Gambar 35), tanpa terlihat adanya tren peningkatan sejak tahun 2001. Hal ini akan benar-benar dapat merintangi kemungkinan mereka menemukan pekerjaan yang baik di masa depan.

Gambar 34: Walau keterampilan angkatan kerja telah meningkat, kurang dari 8 persen memiliki gelar universitas (komposisi tenaga kerja menurut pendidikan tertinggi, persen)



Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia menggunakan Sakernas

Gambar 35: Lebih dari 40 persen dari tenaga muda Indonesia berusia 15-24 tahun tidak memiliki pekerjaan, pendidikan, atau pelatihan (tenaga muda usia 15-24 tahun yang sedang tidak bekerja, belajar atau berlatih, persen)



Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia menggunakan Sakernas

...yang merupakan salah satu tantangan pasar tenaga kerja yang dihadapi oleh para pembuat kebijakan

Secara ringkas, pasar tenaga kerja Indonesia, yang didukung oleh penciptaan pekerjaan yang kuat, sedang bertransformasi menuju formalisasi yang lebih besar bagi angkatan kerjanya. Namun, terdapat sejumlah tantangan penting yang masih tersisa: sebagian besar pekerjaan yang tercipta pada dekade lalu berasal dari sektor-sektor berproduktivitas rendah; lebih dari 50 persen dari pekerjaan yang ada masih merupakan pekerjaan informal, tanpa perlindungan kepada pekerja; sebagian besar angkatan kerja masih tidak terampil, dan, perempuan dan tenaga muda masih mencatat tingkat partisipasi yang rendah dalam angkatan kerja. Tantangan-tantangan tersebut harus ditangani oleh para penyusun kebijakan dan semua pemangku kepentingan, sebelum berakhirnya bonus demografis dari peningkatan jumlah angkatan kerja. Selain itu, integrasi wilayah regional yang lebih besar sejalan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 akan membawa tekanan persaingan yang lebih tinggi lagi terhadap pasar tenaga kerja dalam negeri.

2. Kapasitas desa dan pembangunan di Indonesia

Temuan penelitian baru menjelaskan tentang perubahan kapasitas masyarakat perdesaan dan peran pemerintahan desa dalam menangani masalah desa dalam Indonesia yang terdesentralisasi dan demokratis

Demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia pascareformasi tahun 1998 turut membawa perubahan hubungan antara Pemerintah dan masyarakat. Pada masyarakat perdesaan, warga desa kini bebas menggunakan hak pilihnya untuk memilih kepala desa tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pemerintah tingkat kabupaten. Kepala desa kini memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya kabupaten. Juga terjadi penekanan yang semakin meningkat pada pembangunan berbasis masyarakat (*community-driven development*, CDD) di seluruh penjuru negeri, yang memberi lebih banyak suara dan kekuasaan untuk mengambil keputusan kepada masyarakat dalam memilih dan menerapkan proyek-proyek pembangunan yang paling sesuai dengan kebutuhan desa. Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang apakah dan bagaimana kapasitas masyarakat terpengaruh oleh pergeseran kebijakan nasional dalam demokratisasi, desentralisasi, dan CDD serta interaksinya yang rumit pada tingkat desa atau yang setara sejalan dengan waktu, melalui penelaahan hasil-hasil penelitian terbaru Bank Dunia tentang Penelitian Kelembagaan Tingkat Daerah yang ketiga (*World Bank Local Level Institutions Study*, LLI3), yang dilaksanakan pada tahun 2012.⁸

a. Sejarah singkat pembangunan berbasis masyarakat di Indonesia

Program pembangunan berbasis masyarakat utama di Indonesia, yaitu PNPM, berpijak pada kapasitas masyarakat ...

Tahun 2013 merupakan ulang tahun ke-15 dari penerapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), program CDD terbesar di dunia. Sejak prakarsanya pada tahun 1998 sebagai Program Pengembangan Kecamatan (*Kecamatan Development Program*) atau PPK, PNPM bekerja berdasarkan prinsip bahwa masyarakat desa memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, memprioritaskan, memilih, dan menerapkan proyek-proyek pembangunan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka demi meningkatkan kesejahteraan mereka.⁹ Prinsip ini disarikan dari temuan Penelitian Kelembagaan Tingkat Lokal pertama (LLI1) yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 1996.

...mengikuti penelitian yang menemukan bahwa sementara masyarakat masih memiliki kapasitas bertindak kolektif untuk mengatasi masalah bersama, hal ini dirintangi oleh kebijakan dan proyek pembangunan pemerintah dari atas ke bawah (*top-down*) yang tidak memperhitungkan kebutuhan desa

Selaras dengan peningkatan fokus masyarakat pembangunan global pada lembaga-lembaga desa dan modal sosial pada waktu itu, LLI1 dilaksanakan dengan tujuan untuk memahami peran lembaga-lembaga tingkat desa dan modal sosial dalam penyampaian layanan dasar dan peningkatan kesejahteraan. Penelitian ini – yang dilakukan pada 48 desa di tiga provinsi (Jawa Tengah, Jambi, Nusa Tenggara Timur) – menemukan bahwa, walau pada saat itu Indonesia masih berada di bawah pemerintahan yang sangat tersentralisasi dan otoriter, kapasitas desa – yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah bersama secara kolektif atau gotong royong – tetap mengakar di sebagian besar desa yang diteliti. Namun, kapasitas ini kerap dilemahkan oleh pemerintah desa, yang melaksanakan proyek-proyek pembangunan berdasarkan prinsip atas ke bawah (*top-down*) tanpa memperhitungkan kebutuhan khusus di tingkat desa.¹⁰ Temuan-temuan ini membuka jalan bagi perancangan dan penerapan PPK, yang memberikan ruang terbuka alternatif untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan dan sumber daya guna melaksanakan proyek-proyek yang dipilih. Hanya setahun setelah dimulainya PPK, Indonesia mengalami perubahan politik yang besar dengan jatuhnya rezim Suharto pada tahun 1998 dan dimulainya era desentralisasi pada tahun 2001.

Demokratisasi dan desentralisasi mulai membuka ruang untuk

Terbitnya fajar demokrasi dan desentralisasi menimbulkan pertanyaan tentang dampak dari perubahan-perubahan tersebut terhadap kapasitas desa dan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Secara khusus, apakah pembukaan ruang politik membawa kesempatan yang

⁸ Catatan ini mengambil dari Wetterberg, A., Dharmawan, L., & Jellema, J.R. (2013, forthcoming) The Local Level Institutions III: Overview Report. World Bank/PNPM Support Facility. Jakarta. Untuk informasi lebih lanjut tentang fasilitas pendukung PNPM, silakan kunjungi <http://pnpm-support.org>

⁹ Pada tahun 2007, Pemerintah Indonesia memperluas KDP dan proyek kembarannya untuk perkotaan bernama *Urban Poverty Project*, UPP, dan meluncurkan program-program itu di bawah naungan satu program yang disebut PNPM.

¹⁰ Chandrakirana, K. (1999). Local capacity and its implications for development: The case of Indonesia. *World Bank/Bappenas. Local Level Institutions Study*, Jakarta; Evers, P. (2003). Village governments and their communities. *World Bank/Bappenas. Local Level Institutions Study*, Jakarta.

meningkatkan hubungan antara penduduk dan pemerintah desanya, dan memperkuat kapasitas desa...

lebih baik bagi masyarakat desa untuk turut serta di dalam pengambilan keputusan untuk proyek-proyek pembangunan dan dengan demikian meningkatkan kesesuaian antara proyek-proyek dan kebutuhan desa? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, penelitian lanjutan LLI2 dilakukan pada tahun 2000-2001 dengan penekanan kepada perubahan-perubahan di dalam hubungan pemerintah-masyarakat desa dan bagaimana perubahan-perubahan itu mempengaruhi tata kelola dan kesejahteraan desa.

Penelitian itu menemukan bahwa kapasitas desa masih bertahan pada sebagian besar daerah yang diteliti dan terdapat indikasi peningkatan kesempatan bagi partisipasi masyarakat desa dalam pengambilan keputusan proyek-proyek pembangunan, walau sebagian besar proyek-proyek tidak memberikan hasil yang memuaskan. Sebagai contoh, insiden protes terhadap para kepala desa meningkat, namun umumnya tanpa membawa perubahan riil atau berkelanjutan apapun. Badan Perwakilan Desa (BPD) yang baru dibentuk, dengan tugas meminta akuntabilitas kepala desa, mulai bekerja di beberapa daerah, walau kesimpangsiuran akan fungsi dan keterbatasan mereka dalam hal dukungan operasional agak membatasi kemampuan pelaksanaan kerja mereka.¹¹ Namun, kesan belum adanya perubahan yang berarti ini memang dapat dipahami, karena penelitian itu dilakukan hanya beberapa tahun setelah gejolak ekonomi dan politik pada tahun 1997/1998 dan sekitar masa reformasi desentralisasi tahun 2001.

...namun apakah perubahan tetap berlangsung setelah lebih dari satu dekade?

Lebih dari satu dekade pascapergeseran politik tahun 1998, desentralisasi tahun 2001, dan penerapan PPK/PNPM di lebih dari 60.000 desa, perubahan-perubahan itu diperkirakan telah mempengaruhi kapasitas desa. Untuk lebih memahami perubahan-perubahan tersebut, penelitian LLI ketiga dilakukan pada tahun 2012, dengan tujuan untuk menelusuri perkembangan kapasitas desa sejak LLI2, yang dilakukan lebih dari satu dekade yang lalu, untuk mengetahui apakah telah terdapat pergeseran dalam pengaruh kelompok masyarakat yang berbeda-beda kepada pengambilan keputusan pemerintah, implementasi proyek dan sumber daya negara pada tingkat kabupaten dan perdesaan, dan apakah pergeseran-pergeseran tersebut memiliki keterkaitan dengan perubahan pada kapasitas lokal.

b. Memahami perubahan kapasitas desa sejak tahun 2001

Penelitian LLI mengumpulkan data tentang jenis dan jumlah masalah bersama, apakah ditangani, dan jika ya, apakah berhasil

Pada penelitian-penelitian LLI, kapasitas desa didefinisikan sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah bersama secara kolektif. Untuk mengukur hal ini, penelitian-penelitian itu mengumpulkan dan menelusuri data tentang jenis dan jumlah masalah-masalah bersama yang dihadapi oleh desa-desa yang diteliti dan menyelidiki apakah masalah-masalah itu dipecahkan secara bersama dan, jika ya, bagaimana tingkat keberhasilannya. Desa-desa itu kemudian dikelompokkan ke tiga kelompok kapasitas (tinggi, menengah, rendah) berdasarkan frekuensi tindakan kolektif dan tingkat keberhasilan dalam menghadapi masalah. Kotak 4 memaparkan ikhtisar dari metodologi survei tersebut.

Masyarakat melaporkan tingkat masalah sosial yang lebih rendah pada 2012 dibanding 2001, namun lebih banyak masalah ekonomi dan penyampaian layanan

Untuk menelusuri perubahan kapasitas sejak LLI2, penelitian LLI3 pertama-tama mentabulasi jumlah dan jenis-jenis masalah yang dijumpai pada desa-desa yang diteliti dan kemudian melihat kepada jumlah masalah yang berhasil diselesaikan secara kolektif. Penelitian itu menemukan bahwa masyarakat menjumpai lebih sedikit masalah bersama dibanding LLI2 dan bahwa sifat dari masalah-masalahnya telah bergeser. Secara khusus, masyarakat melaporkan lebih banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi dan penyampaian layanan, sementara masalah-masalah sosial (seperti judi dan minuman keras) hampir tidak pernah disinggung. Juga terdapat lonjakan dalam jumlah masalah “besar” yang sulit diselesaikan pada tingkat daerah, seperti bencana alam dan tingginya harga *input* bagi produksi pertanian.

¹¹ Dharmawan, L. (2002). Dynamics of Local Capacity and Village Governance: Findings from the Second Indonesian Local Level Institutions Study *Central Java Report*.

Secara keseluruhan, kemungkinan keberhasilan masyarakat dalam menyelesaikan masalah tidak berubah, namun terdapat variasi yang besar dalam perubahan kapasitas lintas desa

Angka tindakan kolektif untuk menyelesaikan masalah bersama mencatat penurunan pada seluruh bidang penelitian. Hal ini sebagian dapat dijelaskan oleh peningkatan jumlah masalah “besar” yang tidak dapat ditangani oleh kemampuan masyarakat tersebut. Tingkat keberhasilan penyelesaian masalah bersama, seperti yang ditemukan oleh LLI3, relatif sama seperti pada LLI2. Namun, pola-pola umum ini menutupi adanya variasi yang cukup besar dalam perubahan kapasitas lintas desa-desa yang diteliti. Dari dua puluh desa yang diteliti kembali pada LLI3, hampir setengah (sembilan desa) mempertahankan kapasitas yang sama. Secara khusus, lebih dari setengah desa-desa yang digolongkan sebagai berkapasitas tinggi oleh LLI2, telah menunjukkan kegigihan dengan melanjutkan keberhasilan mereka dalam mengatasi masalah-masalah yang lebih baru. Hal ini menunjukkan bahwa desa-desa berkapasitas tinggi memiliki daya tahan yang kokoh, walau menghadapi pergeseran politik pada dekade yang lalu.

Upaya mandiri penduduk desa dengan dukungan kepala desa yang reformis telah membantu meningkatkan kapasitas pada desa-desa yang sebelumnya berkapasitas rendah

Seperempat dari desa-desa yang diteliti (lima desa) mencatat peningkatan kapasitas. Sangatlah menggembirakan melihat bahwa seluruh desa kecuali satu yang mencatat peningkatan kapasitas berasal dari desa berkapasitas rendah pada LLI2. Desa-desa berkapasitas rendah, sesuai definisinya, memiliki sejarah tidak berjalannya mobilisasi secara kolektif, dan tampaknya peningkatan kapasitas desa-desa tersebut pada umumnya didorong oleh upaya penduduk desa itu sendiri, seperti menemukan sumber pendapatan yang lebih baik, mendapatkan kembali kendali atas sumber daya alam, dan menggunakan berbagai mekanisme untuk meminta akuntabilitas dari para kepala desa. Faktor-faktor lain yang juga memperkuat upaya masyarakat di desa-desa ini adalah kepala desa yang bersifat reformis yang mendengarkan dan bekerja untuk kepentingan penduduk desa, dan, dalam taraf yang lebih kecil, untuk agen-agen eksternal seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dalam kaitannya dengan sengketa penggunaan tanah dan hutan.

Masalah yang terus bertahan tentang penurunan sumber daya alam, seperti akses kepada air minum atau sengketa lahan, diperburuk oleh pemimpin yang tidak reformis, akan menghancurkan kapasitas desa

Sekitar sepertiga dari desa-desa (enam desa) mencatat penurunan kapasitas. Desa-desa tersebut terus mengalami berbagai masalah terkait dengan menurunnya sumber daya alam, seperti akses kepada air minum dan sengketa lahan. Juga terdapat tanda-tanda penurunan gotong-royong pada desa-desa itu, yang menunjukkan penurunan modal sosial. Tiga dari desa yang mencatat penurunan kapasitas merupakan desa-desa yang mengalami penurunan status dari desa menjadi kelurahan. Hal ini berarti bahwa desa-desa itu tidak lagi memiliki kepala desa terpilih yang bertanggung jawab kepada para penduduk desa.¹² Selain itu, sebagian besar kepala desa pada tiga desa yang tersisa bukanlah kepala desa yang tegas (tidak mampu menerapkan keputusan). Pemimpin yang tidak tanggap dan tidak bekerja bagi kepentingan penduduk desa merupakan salah satu faktor utama yang mendorong penurunan kapasitas desa.

¹² Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang ditunjuk oleh bupati sehingga hanya bertanggung jawab kepada kabupaten, dan bukan kepada penduduk desa.

Kotak 4: Metodologi Penelitian Kelembagaan Desa

Penelitian Kelembagaan Tingkat Lokal Indonesia (LLI) bersifat longitudinal, menggunakan metode kuantitatif maupun kualitatif, bertujuan untuk mengidentifikasi prakondisi untuk dan kendala-kendala yang merintang kapasitas desa—yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan masalah bersama secara kolektif—dan taraf di mana struktur negara melengkapi atau menghambat upaya pemecahan masalah penduduk desa. LLI pertama kali dilakukan pada tahun 1996 pada 48 desa di tiga provinsi (Jawa Tengah, Jambi, dan NTT). Lokasi-lokasi itu dipilih untuk menjamin variasi secara geografis dan sosial-ekonomi. Kabupaten Batanghari dan Merangin di Jambi mewakili Sumatera, dengan ekonomi yang umumnya berdasarkan pada tanaman perkebunan dan perdagangan (karet, kelapa sawit, kopi dll.), infrastruktur transportasi yang relatif baik dan kepadatan penduduk tingkat menengah.

Kabupaten Banyumas dan Wonogiri di Jawa Tengah mewakili pulau Jawa, daerah dengan populasi terpadat di Indonesia. Kabupaten Ngada dan Timor Tengah Selatan (TTS) di NTT mewakili Indonesia Timur, yang lebih gersang, dengan populasi yang kurang padat dan rata-rata pendapatan yang lebih rendah. Desa-desa tempat penelitian dipilih untuk mencakup masyarakat dataran tinggi maupun rendah dengan berbagai akses ke ibukota kecamatan. Pada LLI2, hanya 40 desa yang ditinjau kembali karena pada saat itu TTS tidak dapat dikunjungi karena alasan keamanan. Pada LLI ketiga yang paling akhir, 20 desa ditinjau kembali untuk pengumpulan data kualitatif sementara data kuantitatif dikumpulkan dari seluruh 40 desa dari LLI2. Tabel 11 menunjukkan perbandingan aspek penelitian utama dari ketiga pelaksanaan LLI.

Bagi komponen kualitatif dari penelitian itu, para peneliti melakukan wawancara dengan para narasumber utama yang relevan pada tingkat kabupaten dan desa, seperti bupati (atau sekretaris daerah tingkat kabupaten), pejabat-pejabat dari kantor kabupaten (bidang perencanaan, pembangunan perdesaan/masyarakat), anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten, LSM, kepala desa, perwakilan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan tokoh-tokoh masyarakat/agama/adat. Wawancara itu membantu mengumpulkan data tentang, antara lain, pemecahan masalah, kepemimpinan, profil jaringan dan kelembagaan, serta profil-profil proyek (termasuk PNPM). Penelitian itu juga melakukan serangkaian diskusi kelompok fokus (FGD) dengan anggota masyarakat. Topik-topik FGD termasuk (1) penggunaan lahan, jaringan listrik, dan ancaman sumber daya alam, (2) produksi, konsumsi, ancaman kelangsungan dan kemajuan, (3) peran dan hubungan Pemerintah, serta (4) pemecahan masalah.

Bagi komponen kuantitatif, penelitian tersebut melakukan survei panel rumah tangga, termasuk modul-modul tentang karakteristik dan konsumsi rumah tangga, keterlibatan/keturutsertaan rumah tangga di dalam organisasi (formal maupun informal) dan manfaat-manfaat, masalah-masalah umum yang dihadapi oleh rumah tangga di daerahnya, pola kepemilikan lahan dan sumber daya lainnya, kepercayaan dan interaksi sosial, krisis-krisis yang baru terjadi dan mekanisme penyelesaian krisis, pemerintahan desa (kepuasan, transparansi, dan akuntabilitas).

Catatan: lihat Wetterberg dkk. 2013 (akan datang) untuk informasi lebih lanjut

Tabel 11: Perbandingan Aspek Penelitian Utama pada LLI1, LLI2 dan LLI3

	LLI1 (1996)	LLI2 (2000/2001)	LLI3 (2012)
Masalah utama	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas desa • Modal sosial • Tata kelola desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas desa • Modal sosial • Tata kelola desa • Tanggapan krisis 	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas desa • Modal sosial • Tata kelola desa • Tata kelola kabupaten • PNPM
Metode penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data kualitatif • Survei rumah tangga 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data kualitatif • Survei rumah tangga • Etnografi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data kualitatif • Survei rumah tangga
Kunjungan (kembali) ke kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batanghari 2. Merangin 3. Banyumas 4. Wonogiri 5. Ngada 6. Timor Tengah Selatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batanghari 2. Merangin 3. Banyumas 4. Wonogiri 5. Ngada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batanghari 2. Merangin 3. Muara Jambi 4. Banyumas 5. Wonogiri 6. Ngada 7. Nagakeo
Jumlah desa	48	40	20 (kualitatif) 40 (kuantitatif)

c. Demokratisasi, desentralisasi, CDD, dan kapasitas desa...

Demokratisasi telah memungkinkan penduduk desa untuk memilih kepala desa yang reformis dan pro-masyarakat yang mendukung kapasitas desa...

Berkat diterapkannya demokratisasi, penduduk desa kini dapat memiliki kepala desa dengan legitimasi yang kuat, karena mereka dipilih secara demokratis oleh para penduduk desa. Pada masa mantan presiden Suharto, para calon kepala desa harus mendapat persetujuan dari pemerintah kabupaten untuk dapat berkampanye dan diangkat. Pemilihan kini dilakukan secara teratur dan para calon tidak langsung ditetapkan oleh pemerintahan dengan tingkatan di atas desa. Juga terdapat batas masa bakti, dengan maksimal dua kali masa bakti selama enam tahun, bagi para kepala desa yang diangkat pasca tahun 2001. Demokratisasi juga telah membantu memperkecil ruang bagi kepemimpinan gaya dinasti, yang umum dijumpai pada masa lalu, dan telah memperluas cakupan pencalonan.

...dan memberikan keunggulan baru bagi para kepala desa, memungkinkan mereka untuk memainkan peran yang lebih besar dalam pemecahan masalah

Pemilihan yang bebas telah membuat para kepala desa lebih tanggap terhadap kepentingan warga desa dan mendorong mereka untuk memainkan peran yang lebih kuat dalam memecahkan masalah-masalah bersama yang teridentifikasi. Kepala desa yang kuat dapat menjadi lebih efektif dalam berurusan dengan pelaku-pelaku eksternal (seperti para investor) dan pemerintahan dengan tingkat di atas desa untuk memecahkan masalah masyarakat. Sebagai contoh, satu kepala desa pada daerah penelitian turut serta dalam kelompok tiga puluh kepala desa yang meminta persetujuan perbaikan jalan provinsi yang melewati desa-desa mereka sebelum pemilihan kembali gubernur petahana (*incumbent*). Contoh ini menunjukkan keterampilan organisasi yang hebat dan juga kecerdasan para kepala desa untuk mengambil manfaat dari pemerintahan dengan tingkatan di atas desa. Kepala desa yang lain menggerakkan jaringannya, termasuk bekerja sama dengan LSM wilayah dan nasional, untuk mengambil kembali lahan warga dari konsesi yang diberikan oleh pemerintah pusat (walau sayangnya, para warga juga mencurigai bahwa kepala desa itu menerima manfaat yang tidak selayaknya dari upaya tersebut).

Desentralisasi telah meningkatkan akses kepala desa terhadap sumber daya tingkat kabupaten...

Kuatnya posisi kepala desa semakin ditingkatkan dengan kenyataan bahwa desentralisasi memberikan akses langsung bagi kepala desa kepada bupati dan dinas-dinas sektoral kabupaten yang mengelola dana dalam jumlah yang cukup signifikan dari pemerintah pusat. Sebelumnya kontak seperti ini harus melalui kecamatan. Namun, untuk mendapatkan dana (dan proyek-proyek) dari kabupaten, kepala desa harus bertindak pro-aktif dan memiliki jaringan yang baik, mengunjungi dinas-dinas sektoral dan DPRD, dan secara aktif meminta dukungan terkait dengan proyek-proyek tersebut. Kepala desa dengan jaringan yang terbatas harus bergantung kepada proses resmi perencanaan pembangunan tahunan (yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang) untuk mendapatkan proyek-proyek, suatu proses yang oleh sebagian kepala desa dipandang sebagai formalitas yang tidak produktif. Hal ini menguntungkan kepala desa yang dapat menggunakan akses langsung tambahan, walau kadang-kadang tidak resmi, yang timbul berkat desentralisasi.

...namun tanpa mekanisme pengendalian, warga desa tidak dapat membuat kepala desa untuk bekerja demi kepentingan warga

Namun, penguatan kepala desa tidak secara otomatis turut menguatkan warga desa, terutama ketika mekanisme pengendalian tidak dapat menekan para kepala desa untuk bekerja bagi kepentingan warga. Hal ini dapat terlihat pada desa-desa dengan kepala desa yang kuat namun berkapasitas rendah. Masyarakat pada desa-desa tersebut tidak dapat memanfaatkan perubahan-perubahan pada lingkungan politik dan meminta agar kepala desa bekerja demi kepentingan warga. Desa-desa seperti itu umumnya bergantung kepada pemilihan untuk menyingkirkan para pemimpin yang tidak responsif pada akhir masa jabatannya. Namun, desa-desa dengan kapasitas yang lebih tinggi dapat membuat para kepala desa untuk menggunakan posisi mereka yang lebih kuat untuk mengatasi masalah warga dan meminta akuntabilitas kepala desa itu melalui mekanisme seperti hukum adat dan tradisi atau BPD yang telah mempertahankan peran awalnya seperti yang ditemukan oleh LLI2.

Perlemahan posisi BPD dibanding kepala desa telah menyurutkan kapasitas desa...

BPD pertama kali dimandatkan pada UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai suatu badan perwakilan desa dengan anggota-anggota yang dipilih untuk memberikan fungsi pemeriksaan dan penyeimbangan dalam pemerintahan desa. Dengan demikian kepala desa bertanggung jawab kepada BPD dan bupati (yang memberikan dana bagi pemerintahan desa). Namun mekanisme ini kemudian diubah dengan UU No 32/2004, dan namanya diubah walau singkatannya tetap sama. Kepanjangan BPD kini adalah Badan Permusyawaratan Desa, dan anggotanya dipilih secara kemufakatan dan pada dasarnya tidak memiliki kewenangan atas kepala desa. Perubahan-perubahan ini juga menurunkan kemampuan warga desa dalam memantau kepala desanya dan dalam memastikan bahwa pemerintah desa bekerja demi kepentingan bersama yang lebih luas, dan bukan demi kepentingan perorangan atau kelompok tertentu.

BPD yang dibentuk pada tahun 1999 terbukti menjadi mekanisme akuntabilitas yang efektif dalam himpunan bagian perdesaan yang mana badan itu dapat bekerja sebelum dilemahkan oleh peraturan perundangan pada tahun 2004. Sejumlah kecil desa-desa di Jawa Tengah, misalnya, tetap mempertahankan peran BPD seperti awalnya sementara sejumlah desa di Jambi tetap mempertahankan mekanisme pengendali hukum adatnya. Pada kalangan masyarakat tersebut, lembaga adat dan BPD telah meningkatkan kapasitas desa dengan menyalurkan kebutuhan warga desa kepada para pejabat dan memastikan bahwa pemerintahan desa bekerja untuk menangani prioritas masyarakat yang telah teridentifikasi.

...dengan pemerintah kabupaten tidak menyerahkan kendali dan pengawasan terhadap kepala desa, kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi

Walau tanpa mekanisme pemeriksaan dan penyeimbangan pada desa-desa yang disebabkan oleh perlemahan BPD, tidak terdapat peningkatan pengendalian atau pengawasan atas kepala desa oleh kabupaten untuk akuntabilitas kepala desa itu sebagai penyeimbang perlemahan BPD. Kabupaten hanya memberikan pengawasan dan pemantauan yang minim dalam hal apakah para kepala desa melakukan tugasnya atau apakah dana digunakan secara efektif. Dalam keadaan ini, posisi kepala desa yang lebih kuat dapat secara potensial mendorong penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Di salah satu desa yang diteliti LLI3, sebagai contoh, seorang kepala desa membangun suatu balai desa bernilai ratusan juta rupiah, yang idenya dilontarkan pada masa awal jabatannya namun dihalangi oleh BPD pada tahun 2001. Untuk mendanai balai itu, sang kepala desa menggunakan dana pembangunan desa, dilaporkan memaksa warga untuk memberi sumbangan dana, dan bahkan dilaporkan mengalihkan bantuan raskin kepada rumah tangga miskin untuk membantu pendanaan pembangunan balai desa itu.

Proyek-proyek CDD bekerja lebih baik pada desa-desa berkapasitas lebih tinggi dibanding meningkatkan tata kelola pada desa-desa yang berkapasitas lebih rendah

Penelitian LLI3 juga menjelaskan tentang pengaruh program CDD terhadap kapasitas desa. Proyek-proyek partisipatif secara potensial dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas desa dengan memberikan ruang bagi pengambilan keputusan secara kolektif untuk memecahkan masalah desa dan dengan meningkatkan akuntabilitas. Namun, walaupun desa-desa LLI3 melaporkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi, transparansi yang lebih luas, dan pemeliharaan yang lebih baik bagi PNPM dibanding proyek-proyek bukan CDD, tingkat partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa tidak meningkat secara keseluruhan. Secara khusus, pada desa-desa dengan kapasitas yang lebih rendah, proyek-proyek CDD belum memfasilitasi peningkatan dalam partisipasi pengambilan keputusan dan tata kelola. Di lain pihak, desa-desa berkapasitas tinggi dapat dengan lebih baik memanfaatkan perencanaan dan pengambilan keputusan secara terbuka di dalam proyek-proyek tersebut untuk memecahkan sebagian masalah-masalah kolektif mereka.

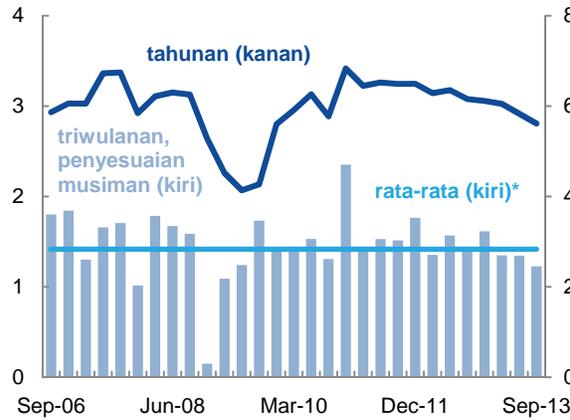
d. ...dan pentingnya peningkatan pemeriksaan dan penyeimbangan pada tingkat perdesaan

Dibutuhkan mekanisme pemeriksaan dan penyeimbangan yang lebih kuat pada tingkat perdesaan dan strategi yang lebih baik dalam proyek-proyek CDD untuk membantu mendukung kapasitas lokal

Secara keseluruhan, penelitian LLI3 menunjukkan bahwa kapasitas desa pada desa-desa sampel di Indonesia pada umumnya telah terpelihara, dengan desa-desa berkapasitas tinggi dapat memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang dibawa oleh perubahan dalam kebijakan nasional. Sejumlah desa-desa berkapasitas rendah telah mampu meningkatkan kapasitas mereka secara organik dengan menangani kendala-kendala sumber daya dan menggunakan mekanisme pengendalian yang ada untuk meminta akuntabilitas pemerintahan desanya. Desa-desa itu juga memperoleh manfaat dari demokratisasi, yang memungkinkan warga desa untuk memilih kepala desa yang reformis dan pro-masyarakat yang bekerja demi kepentingan warga desa, dan dari desentralisasi, yang memberikan akses langsung bagi kepala desa reformis kepada kabupaten untuk memperoleh dukungan yang dibutuhkan dalam memecahkan masalah-masalah yang telah teridentifikasi. Namun, sejumlah desa telah mengalami penurunan kapasitas, karena tidak mampu menangani masalah yang terus bertahan terkait dengan penurunan sumber daya alam dan meminta pertanggungjawaban pemerintahan desa. Pada sejumlah kasus, penurunan kapasitas desa ini dapat dikaitkan dengan hilangnya kemampuan untuk mengangkat kepala desa karena perubahan status dari desa menjadi kelurahan. Temuan-temuan ini secara kuat menyiratkan kebutuhan untuk memperkuat mekanisme pemeriksaan dan penyeimbangan pada tingkat perdesaan guna membantu warga desa menuntut akuntabilitas pemerintah desa. Dengan demikian, sementara proyek-proyek CDD telah membantu desa-desa berkapasitas tinggi dan menengah dalam memecahkan sebagian masalah kolektifnya, masih banyak hal yang harus dilakukan untuk memungkinkan desa-desa dengan kapasitas lebih rendah untuk memetik manfaat dari proses itu pula.

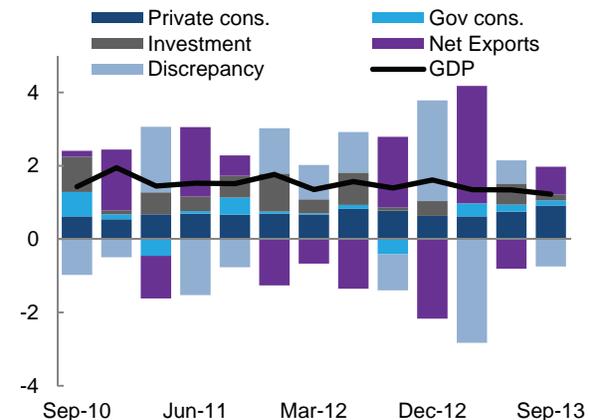
LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBARAN EKONOMI INDONESIA

Lampiran Gambar 1: Pertumbuhan PDB
(pertumbuhan PDB riil, persen)



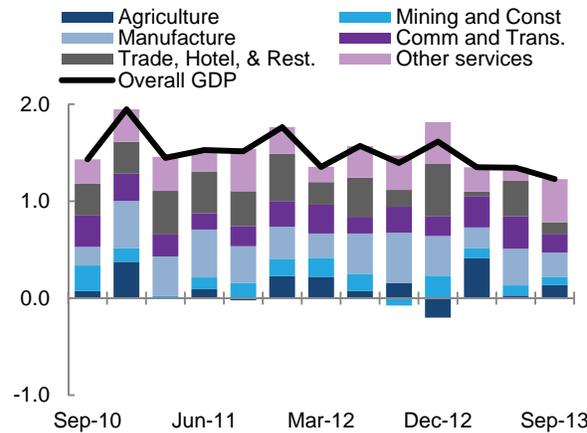
Catatan: * Rata-rata pertumbuhan Tw-k-Tw Q3 2003 – Q3 2013
Sumber: BPS; World Bank seasonal adjustment

Lampiran Gambar 2: Kontribusi terhadap PDB pengeluaran
(kontribusi pertumbuhan PDB riil qoq, dengan penyesuaian musiman, persen)



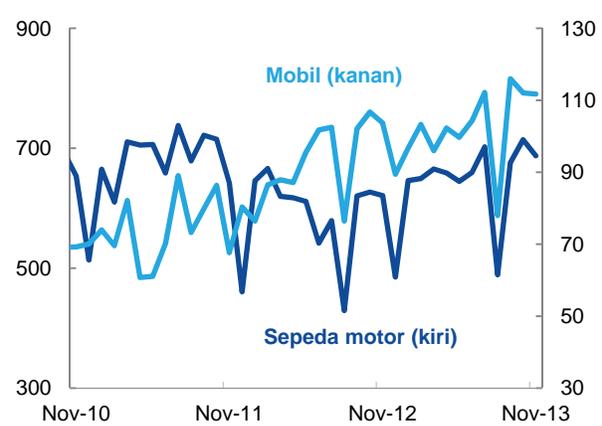
Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 3: Kontribusi terhadap PDB produksi
(kontribusi pertumbuhan PDB riil qoq, dengan penyesuaian musiman, persen)



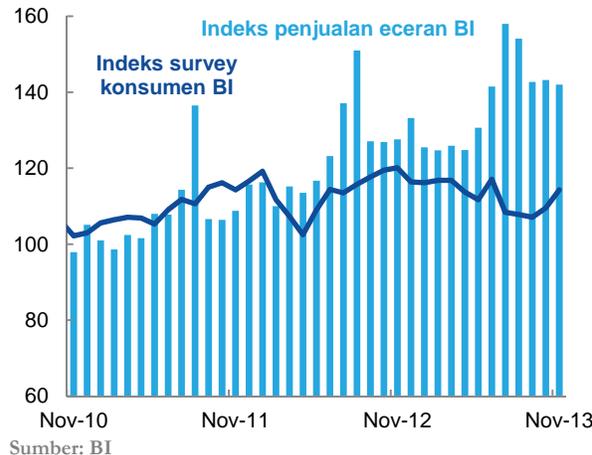
Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 4: Penjualan sepeda motor dan mobil
(penjualan bulanan, 000 unit)



Sumber: CEIC

Lampiran Gambar 5: Indikator konsumen
(indeks)



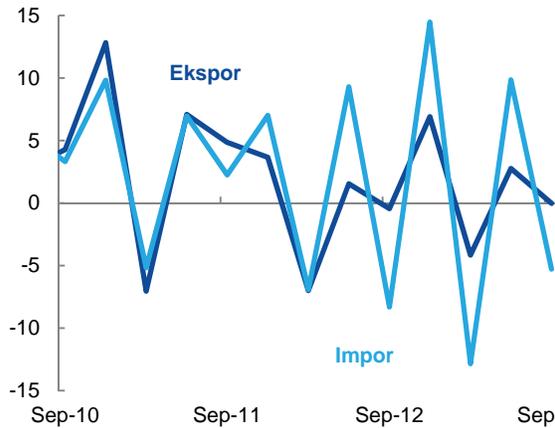
Sumber: BI

Lampiran Gambar 6: Indikator industri penjualan
(rata-rata 3 bulan, pertumbuhan yoy, persen)



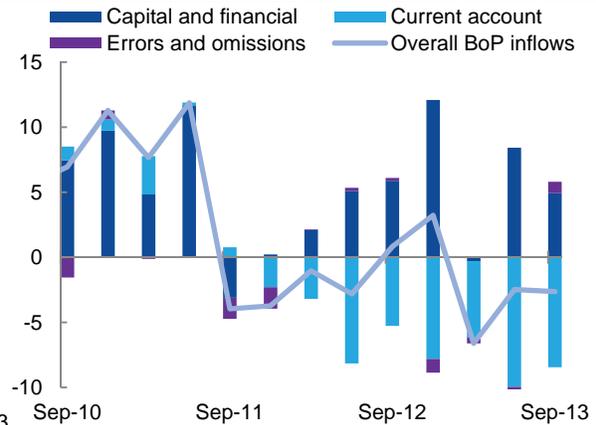
Sumber: CEIC

Lampiran Gambar 7: Arus perdagangan riil
(pertumbuhan riil triwulanan, persen)



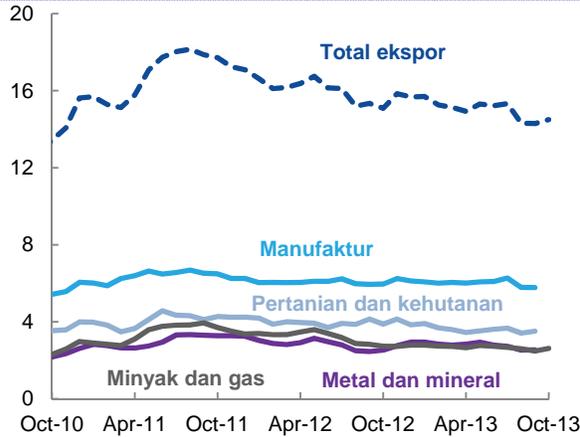
Sumber: BPS

Lampiran Gambar 8: Neraca pembayaran
(miliar dolar AS)



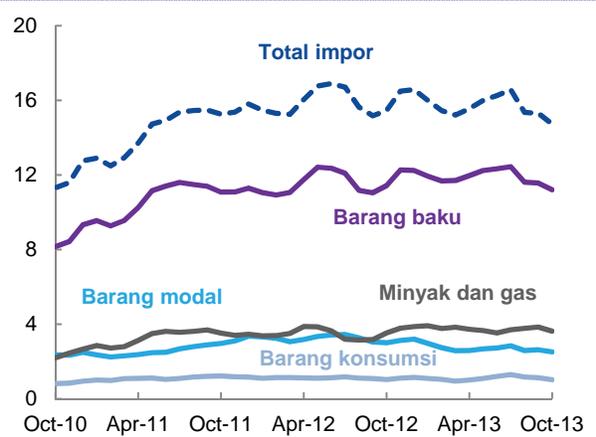
Sumber: BI

Lampiran Gambar 9: Ekspor barang
(rata-rata 3 bulanan, miliar dolar AS)



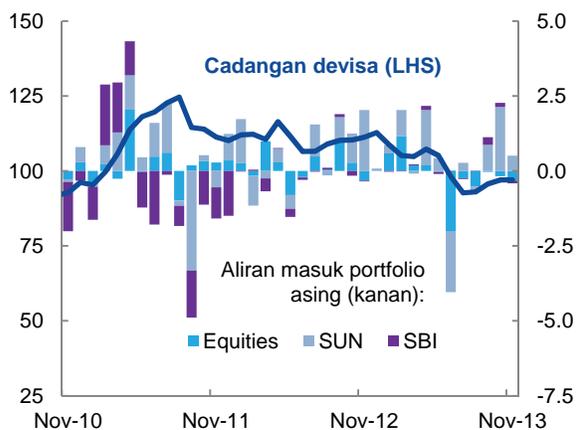
Sumber: BPS

Lampiran Gambar 10: Impor barang
(rata-rata 3 bulanan, miliar dolar AS)



Sumber: BPS

Lampiran Gambar 11: Cadangan devisa dan arus masuk modal
(miliar dolar AS)



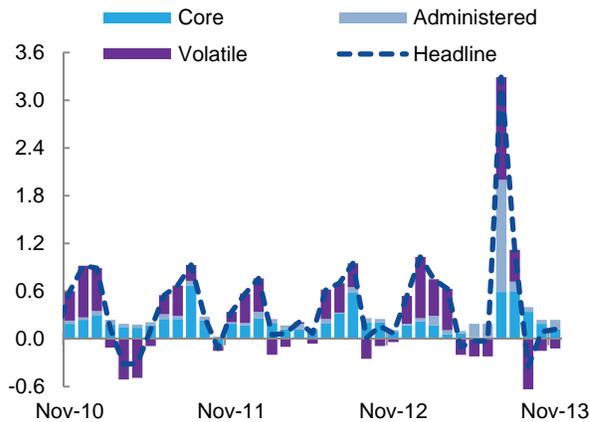
Sumber: BI; CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 12: Inflasi dan kebijakan moneter
(pertumbuhan month-on-month dan yoy, persen)



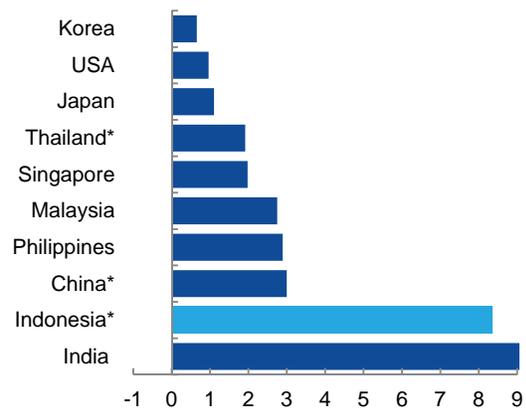
Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 13: Rincian bulanan IHK (persen kontribusi terhadap pertumbuhan bulanan)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

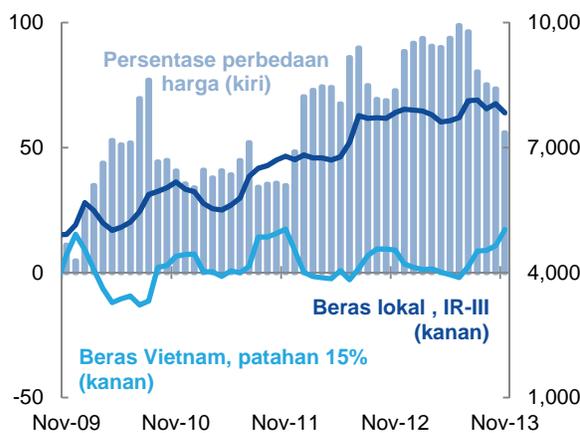
Lampiran Gambar 14: Perbandingan inflasi beberapa negara (yoy, Oktober 2013)



*Angka inflasi November

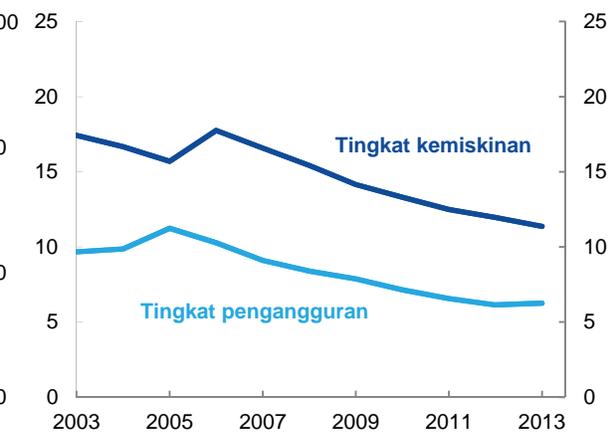
Sumber: Biro statistik nasional via CEIC; BPS

Lampiran Gambar 15: Harga beras domestik dan internasional (persen kiri, harga partai besar, dalam rupiah per kg kanan)



Sumber: PIBC; FAO; Bank Dunia

Lampiran Gambar 16: Tingkat kemiskinan dan pengangguran (persen, data Pengangguran Agustus)



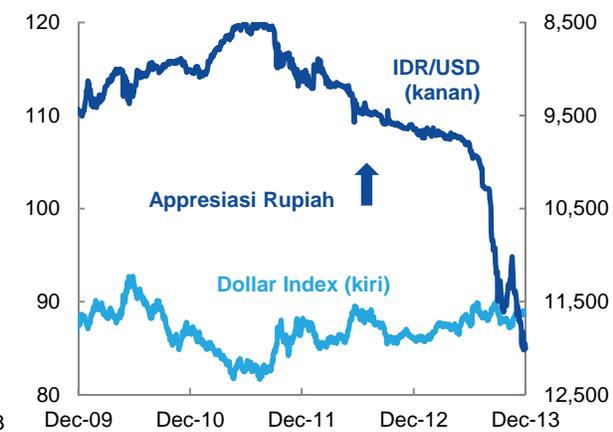
Sumber: BPS

Lampiran Gambar 17: Indeks saham regional (indeks harian September 2009=100)



Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

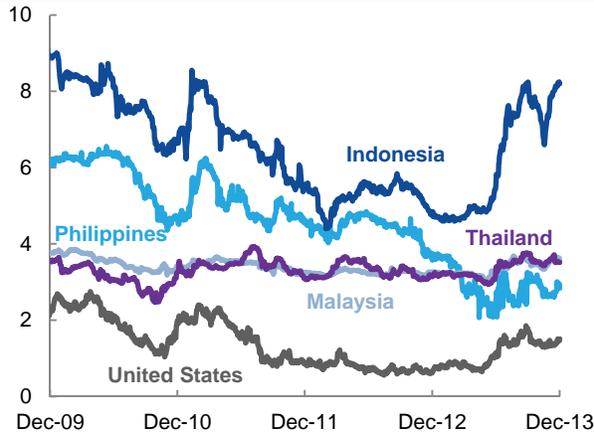
Lampiran Gambar 18: Indeks dolar AS dan Nilai tukar rupiah (indeks harian, kiri dan rupiah/dolar AS, kanan)



Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 19: Imbal hasil obligasi pemerintah 5-tahunan dalam mata uang lokal

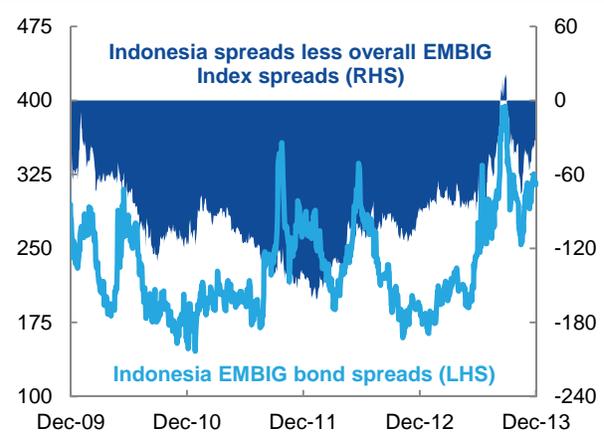
(harian, persen)



Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 20: Spread obligasi dolar AS pemerintah EMBI

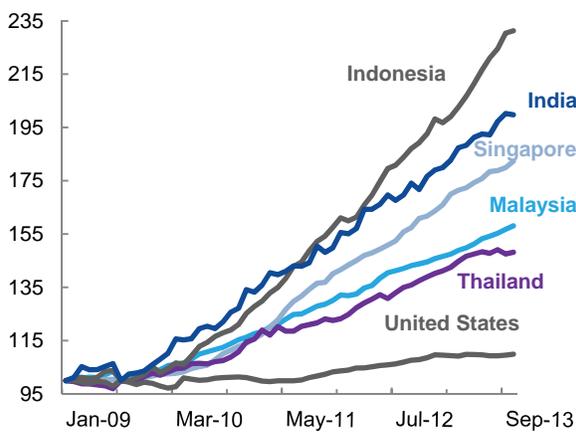
(harian, basis poin)



Sumber: JP Morgan; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 21: Pinjaman internasional perbankan komersial

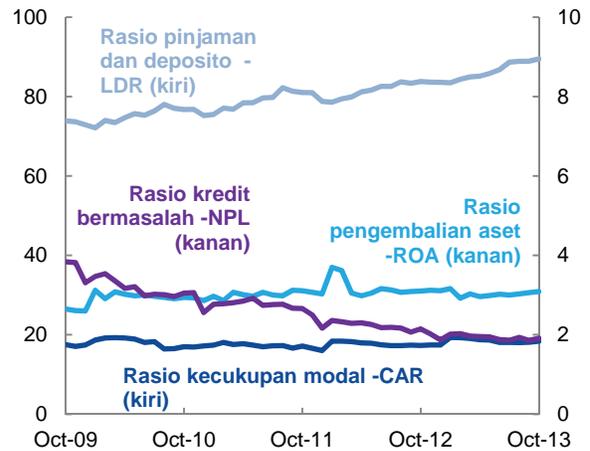
(bulanan, indeks Januari 2009=100)



Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 22: Indikator sektor perbankan

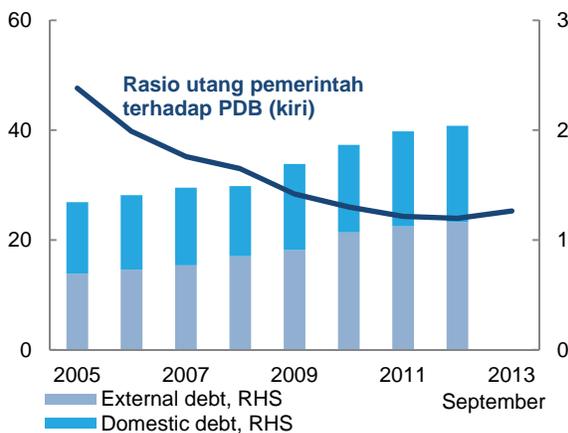
(bulanan, persen)



Sumber: BI

Lampiran Gambar 23: Hutang pemerintah

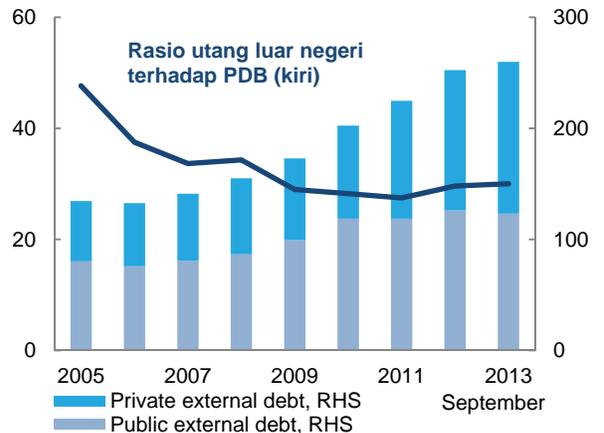
(persentase terhadap PDB; miliar dolar AS)



Sumber: MoF; BI; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 24: Hutang luar negeri

(persen terhadap PDB; miliar dolar AS)



Sumber: BI; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Tabel 1: Realisasi dan anggaran belanja Pemerintah

(Rupiah triliun)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	APBN-P	APBN
A. Penerimaan dan hibah	849	995	1,211	1,338	1,502	1,667
1. Penerimaan pajak	620	723	874	981	1,148	1,280
2. Penerimaan bukan pajak	227	269	331	352	349	385
B. Pengeluaran	937	1,042	1,295	1,491	1,726	1,842
1. Pemerintah pusat	629	697	884	1,011	1,197	1,250
2. Transfer ke daerah	309	345	411	481	529	593
C. Neraca prima	5	42	9	-53	-112	-54
D. Surplus / Defisit	-89	-47	-84	-153	-224	-175
(persen dari PDB)	-1.6	-0.7	-1.1	-1.9	-2.4	-1.7

Sumber: Kementerian Keuangan

Lampiran Tabel 2: Neraca Pembayaran

(miliar dolar AS)

	2010	2011	2012	2012			2013		
				Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
Neraca pembayaran	30.3	11.9	0.2	-2.8	0.8	3.2	-6.6	-2.5	-2.6
<i>Persen dari PDB</i>	4.3	1.4	0.0	-1.3	0.4	1.5	-3.0	-1.1	-1.2
Neraca berjalan	5.1	1.7	-24.4	-8.1	-5.3	-7.8	-5.9	-10.0	-8.4
<i>Persen dari PDB</i>	0.7	0.2	-2.8	-3.7	-2.4	-3.6	-2.7	-4.4	-3.9
Neraca perdagangan	21.3	24.2	-1.7	-2.0	0.8	-2.4	-0.8	-3.8	-2.6
Pendapatan bersih & transfer berjalan	-16.2	-22.5	-22.7	-6.2	-6.1	-5.4	-5.0	-6.1	-5.8
Neraca modal & keuangan	26.6	13.6	25.2	5.1	5.9	12.1	-0.3	8.4	4.9
<i>Persen dari PDB</i>	3.8	1.6	2.9	2.3	2.6	5.5	-0.1	3.7	2.3
Investasi langsung	11.1	11.5	14.0	3.7	4.5	4.1	3.9	3.8	5.1
Investasi porfolio	13.2	3.8	9.2	3.9	2.5	0.2	2.8	3.4	1.9
Investasi lain	2.3	-1.8	1.9	-2.5	-1.2	7.7	-6.9	1.2	-2.1
Kesalahan & pembulatan	-1.5	-3.4	-0.5	0.2	0.2	-1.1	-0.4	-1.0	0.9
Cadangan devisa*	96.2	110.1	112.8	106.5	110.2	112.8	104.8	98.1	95.7

Catatan: * Cadangan devisa pada akhir periode

Sumber: BI; BPS

Lampiran Tabel 3: Perkembangan indikator ekonomi makro Indonesia

	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012
Neraca Nasional (% perubahan)¹							
PDB riil	9.0	8.4	4.9	5.7	6.2	6.5	6.2
Investasi riil	25.3	22.6	11.4	10.9	8.5	8.8	9.8
Konsumsi riil	23.2	21.7	4.6	4.3	4.1	4.5	4.8
Swasta	23.9	22.7	3.7	0.9	4.7	4.7	5.3
Pemerintah	18.8	14.7	14.2	6.6	0.3	3.2	1.2
Ekspor riil, barang dan jasa	22.5	18.0	30.6	16.6	15.3	13.6	2.0
Impor riil, barang dan jasa	30.2	29.6	26.6	17.8	17.3	13.3	6.6
Investasi (% PDB)	28	28	20	24	32	32	33
Nominal PDB (milyar dolar AS)	114	202	165	286	709	846	878
PDB per capita (dolar AS)	636	1035	804	1,300	2,984	3,498	3,563
Anggaran Pemerintah Pusat (% GDP)²							
Penerimaan dan hibah	18.8	15.2	20.8	17.8	15.5	16.3	16.2
Penerimaan bukan pajak	1.0	4.8	9.0	5.3	4.2	4.5	4.3
Penerimaan pajak	17.8	10.3	11.7	12.5	11.3	11.8	11.9
Pengeluaran	11.8	13.9	22.4	18.4	16.2	17.4	18.1
Konsumsi	..	3.9	4.0	3.0	3.8	4.0	4.1
Modal	..	4.6	2.6	1.2	1.3	1.6	1.8
Bunga pinjaman	..	1.4	5.1	2.3	1.4	1.3	1.2
Subsidi	6.3	4.3	3.0	4.0	4.2
Surplus/defisit	0.4	1.3	-1.6	-0.6	-0.7	-1.1	-1.9
Utang Pemerintah	41.9	32.3	97.9	47.6	26.0	24.3	23.9
Utang luar negeri pemerintah	41.9	32.3	51.4	22.3	9.5	8.3	7.4
Total utang luar negeri (termasuk utang swasta)	61.0	61.5	87.1	47.7	28.2	27.5	29.6
Neraca Pembayaran (% PDB)³							
Neraca pembayaran keseluruhan	0.2	4.3	1.4	0.0
Neraca transaksi berjalan	-2.6	3.2	4.8	0.1	0.7	0.2	-2.8
Ekspor, barang dan jasa	25.6	26.2	42.8	35.0	24.7	26.2	24.1
Impor, barang dan jasa	24.0	26.9	33.9	32.0	21.6	23.3	24.3
Transaksi berjalan	1.6	-0.8	8.9	2.9	3.0	2.9	-0.2
Neraca transaksi keuangan	0.0	3.7	1.6	2.9
Penanaman modal langsung, neto	1.0	2.2	-2.8	1.8	1.6	1.4	1.6
Cadangan devisa bruto (USD billion)	8.7	14.9	29.4	34.7	96.2	110.1	112.8
Moneter (% change)³							
Deflator PDB ¹	7.7	9.9	20.4	14.3	8.3	8.1	4.5
Suku bunga Bank Indonesia (%)	9.1	6.5	6.6	5.8
Kredit domestik	28.7	17.5	24.4	24.2
Nilai tukar Rupiah/Dolar AS (rata-rata) ⁴	1,843	2,249	8,422	9,705	9,090	8,770	9,387
Harga-harga (% perubahan)¹							
Indeks harga konsumen (akhir periode)	9.9	9.0	9.4	17.1	7.0	3.8	4.3
Indeks harga konsumen (rata-rata)	7.7	9.4	3.7	10.5	5.1	5.4	4.3
Keranjang harga kemiskinan	10.8	8.7	8.2	6.5
Harga minyak mentah Indonesia (Dolar AS per barel) ⁵	..	17	28	53	79	112	113

Sumber: 1 BPS dan perhitungan staf Bank Dunia; 2 Kementerian Keuangan dan perhitungan staf Bank Dunia (untuk 1995 menggunakan tahun dasar 1995/1996, untuk 2000 hanya 9 bulan); 3 Bank Indonesia; 4 IMF; 5 CEIC

Lampiran Tabel 4: Sekilas indikator pembangunan Indonesia

	1990	1995	2000	2005	2010	2011	2012
Kependudukan¹							
Penduduk (juta)	184	199	213	227	241	244	247
Tingkat pertumbuhan penduduk (%)	1.7	1.5	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2
Penduduk perkotaan (% terhadap total)	31	36	42	46	50	51	51
Rasio ketergantungan (% penduduk usia kerja)	67	61	55	54	53	53	52
Angkatan Kerja²							
Angkatan kerja, total (juta)	75	84	98	106	117	117	118
Laki-laki	46	54	60	68	72	72	73
Perempuan	29	31	38	38	45	45	45
Kontribusi tenaga kerja sektor pertanian (%)	55	43	45	44	38	36	35
Kontribusi tenaga kerja sektor industri (%)	14	19	17	19	19	21	22
Kontribusi tenaga kerja sektor jasa (%)	31	38	37	37	42	44	43
Tingkat pengangguran, total (% angkatan kerja)	2.5	7.0	8.1	11.2	7.1	6.6	6.1
Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan³							
Konsumsi rumah tangga, median (Rp.000)	104	211	374	421	446
Garis kemiskinan nasional (Rp.000)	73	129	212	234	249
Jumlah penduduk miskin (juta)	38	35	31	30	29
Penduduk miskin (% penduduk dibawah garis kemiskinan)	19	16	13	12	12
Di perkotaan	14.6	11.7	9.9	9.2	8.8
Di perdesaan	22.4	20.0	16.6	15.7	15.1
Laki-laki sebagai kepala rumah tangga	15.5	13.3	11.0	10.2	9.5
Perempuan sebagai kepala rumah tangga	12.6	12.8	9.5	9.7	8.8
GINI indeks	0.30	0.35	0.38	0.41	0.41
Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok termiskin (%)	9.6	8.7	7.9	7.4	7.5
Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok terkaya (%)	38.6	41.4	43.5	46.5	46.7
Pengeluar publik untuk kesejahteraan masyarakat (% PDB) ⁴	4.4	3.9	3.9	4.2
Kesehatan dan Gizi¹							
Tenaga kesehatan (per 1,000 people)	0.14	0.16	0.16	0.13	0.29	..	0.20
Balita kurang gizi (% total anak usia dibawah 5)	..	27.4	24.8	24.4	18.6
Tingkat kematian balita (per 1000 anak usia dibawah 5 tahun) ⁵	98	67	52	42	34	32	31.0
Tingkat kematian bayi lahir (per 1000 kelahiran hidup) ⁵	27	26	22	19	16	15.5	15.0
Tingkat kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup) ⁵	67	51	41	34	28	26.7	25.8
Rasio kematian persalinan (perkiraan, per 100,000 kelahiran hidup)	600	420	340	270	220
Persalinan yang dibantu penolong kelahiran (% total kelahiran)	36	..	66	..	82
Imunisasi campak (% anak usia dibawah 1 tahun)	..	63	74	..	76
Belanja untuk kesehatan (% of GDP)	..	1.8	77.0	2.8	2.8	2.7	..
Belanja pemerintah untuk kesehatan (% of GDP)	..	0.7	89.0	89.0	1.0	0.9	..
Pendidikan³							
Angka partisipasi murni (APM) SD, (%)	92	92	92	93
APM perempuan (% dari total partisipasi)	48	48	49	49
Angka partisipasi murni pendidikan tingkat menengah, (%)	52	61	60	60
APM perempuan (% dari total partisipasi)	50	50	50	49
Angka partisipasi murni universitas/pendidikan tinggi, (%)	9	16	14	15
APM perempuan (% dari total partisipasi)	55	53	50	54
Angka melek huruf Dewasa (%)	91	91	91	92
Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% terhadap PDB)	2.7	3.4	3.5	3.5
Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% terhadap APBN)	14.5	19.7	19.8	18.9
Air Bersih dan Kesehatan lingkungan¹							
Penduduk dengan akses air bersih disempurnakan (% tot penduduk)	70	74	78	81	84	84	..
Di perkotaan (% penduduk perkotaan)	91	91	91	92	93	93	..
Di perdesaan (% penduduk perdesaan)	61	65	68	71	75	76	..
Penduduk dengan akses kesehatan lingkungan (% tot penduduk)	32	38	44	53	58	59	..
Di perkotaan (% penduduk perkotaan)	56	60	64	70	73	73	..
Di perdesaan (% penduduk perdesaan)	21	26	30	38	43	44	..
Lainnya¹							
Pengurangan resiko bencana, penilaian (skala 1-5; 5=terbaik)	3.3	..
Proporsi perempuan yang duduk di parlemen (%) ⁶	8	11	18	18.2	18.6

Sumber: 1 World Development Indicators; 2 BPS (Sakernas); 3 BPS (Susenas) dan Bank Dunia; 4 Kementerian Keuangan dan perhitungan staf Bank Dunia dan hanya termasuk pengeluaran aktual untuk Raskin, Jamkesmas, BLT, BSM, PKH (kecuali tahun 2012 dari APBN-P; 5 Inter-Parliamentary Union



Supported by funding from the Australian Government (Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT), under the Support for Enhanced Macroeconomic and Fiscal Policy Analysis (SEMEFPA) program.